RKPD 2026

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2025

BAPPEDA REJANG LEBONG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Rejang Lebong dapat merampungkan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 ini.

Dokumen RKPD ini disusun dengan merujuk pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 yang secara pararel dilakukan penyelarasan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah yang ada di Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah dengan menyelaraskan juga Hasil Reses Anggota DPRD Kebutuhan Rejang Lebong, Rancangan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2026. Penyelarasan dilakukan juga dengan Tema, Agenda Pembangunan dan Sasaran Pengembangan Wilayah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 serta Program Strategis Nasional lainnya.

Penyusunan dokumen RKPD ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Dalam proses penyusunannya, BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu kami ucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya yang telah berkontribusi dalam penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2026 ini. Semoga Allah SWT membalas kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas kita dalam membangun Kabupaten Rejang Lebong yang Maju, Mandiri, Berakhlak dan Berkelanjutan.

Akhirnya semoga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapan semua pihak.

Curup, 2025
Plh. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN REJANG LEBONG,
SEKRETARIS

Hj. SUTRISNI, SP
Pembina Tingkat I
Nip. 19681121 199703 2 002

DAFTAR ISI

				Halaman
HALAMAN SAMPUL				**i**
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG				**ii**
KATA PENGANTAR				**vii**
DAFTAR ISI				**ix**
DAFTAR TABEL				**xi**
DAFTAR GAMBAR				**xvi**
BABB	I.	PENDAHULUAN	I	1
	1.1.	Latar Belakang	I	1
	1.2.	Dasar Hukum Penyusunan RKPD	I	3
	1.3.	Hubungan Antar Dokumen	I	6
	1.4.	Maksud dan Tujuan	I	8
	1.5.	Sistematika Dokumen RKPD	I	8
BAB	II.	GAMBARAN UMUM	II	1
	2.1.	Kondisi Umum Kondisi Daerah	II	1
	2.1.1.	Aspek Geografis dan Demografis	II	1
	2.1.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II	13
	2.1.3.	Aspek Pelayanan Umum	II	28
	2.1.4.	Aspek Daya Saing Daerah	II	34
	2.2.	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II	40
	2.2.1.	Hasil Analisis Gambaran Umum Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2019-2023	II	40
	2.2.2.	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023	II	61
	2.2.3.	Hasil Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs)	II	134
	2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah	II	148
	2.3.1	Permasalahan Daerah Berdasarkan Hasil Evaluasi Capaian Perangkat Daerah	II	148
	2.3.2	Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah	II	187
	2.3.3	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah daerah	II	190
	2.4	Isu Strategis	II	204
	2.4.1	Isu Strategis Global	II	204
	2.4.2	Isu Strategis Nasional dan Daerah	II	206
	2.4.3	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026	II	208

BAB	III.	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III	1
		3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah		
		3.1.1.Kondisi Ekonomi Daerah	III	1
		3.1.2.Prospek Ekonomi Tahun 2025	III	21
		3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III	29
		3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III	25
		3.2.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III	30
		3.2.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah	III	32
		3.2.1.1.2. Pendapatan Transfer	III	34
		3.2.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	III	35
		3.2.1.1.4. Upaya-Upaya Pemerintahan Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan	III	35
		3.2.1.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III	35
		3.2.1.2.1. Kebijakan Operasi dan Modal	III	38
		3.2.1.2.1.1. Belanja Pegawai	III	38
		3.2.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa	III	40
		3.2.1.2.1.3. Belanja Hibah	III	40
		3.2.1.2.1.4. Bantuan Sosial	III	41
		3.2.1.2.2. Belanja Modal	III	41
		3.2.1.2.3. Belanja Tidak Terduga	III	42
		3.2.1.2.4. Belanja Transfer	III	42
		3.2.1.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III	42
BAB	IV.	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV	1
		4.1. Tujuan, Sasaran dan Tema Pembangunan Tahun 2026	IV	1
		4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026	IV	11
		4.3. Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Propinsi dengan RKPD Kabupaten Rejang Lebong	IV	18
		4.4. Pokok Pikiran DPRD	IV	28
BAB	V.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V	1
BAB	VI.	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI	1
BAB	VII.	PENUTUP	VII	1

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 ..... II-2

Tabel 2.2 Luas Wilayah Menurut Ketinggian Tanah di Kabupaten Rejang Lebong II-3

Tabel 2.3 Luas Wilayah Menurut Ketinggian Tanah per Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong II-3

Tabel 2.4 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Klimatologi Klas I Pulau Baai Bengkulu Tahun 2024 ..... II-4

Tabel 2.5 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 ..... II-5

Tabel 2.6 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Usaha (ton) di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 ..... II-7

Tabel 2.7 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan II-8

Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 ..... II-10

Tabel 2.9 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Menurut Kecamatan Tahun 2024... II-11

Tabel 2.10 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan (per Km2) di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 ..... II-12

Tabel 2.11 Profil Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024 ..... II-14

Tabel 2.12 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 ..... II-15

Tabel 2.13 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Kabupaten Rejang Lebong 2020-2024..... II-20

Tabel 2.14 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024(Miliar Rupiah)..... II-22

Tabel 2.15 Angka Partisipasi Kasar menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024..... II-23

Tabel 2.16 Angka Partisipasi Murni menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024..... II-24

Tabel 2.17 Angka Partisipasi Sekolah menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024 ..... II-25

Tabel 2.18 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024 ..... II-26

Tabel 2.19 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun) di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024 ..... II-26

Tabel 2.20 Realisasi Indikator Urusan Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024 ..... II-29

Tabel 2.21 Realisasi Indikator Urusan Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024 ..... II-31

Tabel 2.22 Realisasi Indikator Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023-2024 ..... II-31

Tabel 2.23 Realisasi Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023-2024 ..... II-32

Tabel 2.25 Realisasi Indikator Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023-2024 ..... II-33

Tabel 2.26 Realisasi Indikator Urusan Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023-2024..... II-33

Tabel 2.27 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Rejang Lebong (km) Tahun 2018 - 2022..... II-35

Tabel 2.28 Iklim Berinvestasi Tahun 2020 - 2024 ..... II-36

Tabel 2.29 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024..... II-37

Tabel 2.30 Jumlah Penduduk berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024..... II-38

Tabel 2.31 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024 ..... II-39

Tabel 2.32 Hasil Analisis Gambaran Umum Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024 ..... II-40

Tabel 2.33 Evaluasi Terhadap Hasil RPKD Kabupaten Rejang Lebong Triwulan IV Anggaran 2024 ..... II-60

Tabel 2.34 Hasil Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 ..... II-116

Tabel 3.1 Nilai PDRB Atas Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017-2022 (dalam Miliar)) dan Proyeksi Tahun 2023-2024 ..... III-1

Tabel 3.2 Nilai dan Distribusi PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) Kabupaten Rejang Lebong Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023-2024 (dalam miliar) III-3

Tabel 3.3 Nilai dan Distribusi PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) Kabupaten Rejang Lebong Menurut Pengeluaran Tahun 2023-2024 (dalam miliar) III-5

Tabel 3.4 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025-2026 ..... III-7

Tabel 3.5 Jumlah penganggur, jumlah angkatan kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023-2024 dan Proyeksi Tahun 2025-2026 ..... III-12

Tabel 3.6 Jumlah Penduduk miskin dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023-2024 dan Proyeksi Tahun 2025-2026..... III-14

Tabel 3.7 Rasio Gini Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023-2024 dan Proyeksi Tahun 2025-2026 ..... III-19

Tabel 3.8 Indeks Pembangunan Manusia, Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023-2024 dan Proyeksi Tahun 2025-2026..... III-21

Tabel 3.9 Sasaran Ekonomi Makro Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 ..... III-25

Tabel 3.10 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 s.d tahun 2026..... III-28

Tabel 3.11 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 s.d tahun 2026..... III-34

Tabel 3.12 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 s.d tahun 2026..... III-39

Tabel 4.1. Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran,Strategi, dan Arah Kebijakan IV-11

Tabel 4.2 Sinkronisasi Dan Sinergitas Antara Prioritas Daerah Dan Program Prioritas Daerah Dengan Prioritas Propinsi, Prioritas Nasional Dan Arah Kebijakan Prioritas Nasional IV-20

Tabel 4.3 Rumusan Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran IV-23

Tabel 4.4 Rumusan Usulan Program dan Kegiatan Hasil Penelahaan Pokok Pokok Pikiran DPRD pada RKPD Tahun 2026 ..... IV-79

Tabel 5.3 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 ..... V-2

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan V-18
2. Dinas Kesehatan V-35
3. Puskesmas V-48
4. Rumah Sakit Umum Daerah Curup V-134
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman V-140
6. Satuan Polisi Pamong Praja V-157
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah V-165
8. Dinas Pemadam Kebakaran V-171
9. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri V-178
10. Dinas Sosial V-187
11. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi V-195
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana V-200
13. Dinas Ketahanan Pangan V-215
14. Dinas Lingkungan Hidup V-222
15. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil V-231
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa V-239
17. Dinas Perhubungan V-244
18. Dinas Komunikasi dan Informatika V-249
19. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian V-257
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu V-265
21. Dinas Pemuda dan Olahraga V-273
22. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah V-281

23. Dinas Pertanian dan Perikanan V-290
24. Dinas Pariwisata V-296
25. Sekretariat Daerah V-303
26. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah V-328
27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah V-342
28. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah V-351
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia V-362
30. Inspektorat V-370
31. Kecamatan V-377

Tabel 6.1 Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2026 ..... VI-2

Tabel 6.2 Target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2026 ..... VI-3

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Diagram Hubungan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan I-7

Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Rejang Lebong II-1

Gambar 2.2 Peta Kawasan Rawan Bencana II-10

Gambar 2.3 Grafik Perbandingan Persentase Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2018-2022..... II-14

Gambar 2.4 Grafik Posisi Relatif Kemiskinan Ektrem Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022..... II-17

Gambar 2.5 Grafik Perkembangan Antar Waktu Persentase Penduduk Miskin Ektrem Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2022 ..... II-17

Gambar 2.6 Grafik Efektivitas Persentase Penduduk Miskin Ektrem Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2022..... II-18

Gambar 2.7 Grafik Relevansi Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2022 ..... II-19

Gambar 2.8 Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Rejang Lebong (%) Tahun 2017-2022 . II-23

Gambar 3.1. PDRB per kapita ADHB dan PDRB per kapita ADHK Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017-2022 dan Proyeksi Tahun 2023-2024..... III-5

Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rejang Lebong (%) Tahun 2017-2022 ..... III-7

Gambar 3.3 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rejang Lebong (%) Tahun 2021-2022..... III-8

Gambar 3.4 Kontribusi dan Rata-rata Pertumbuhan Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 (%)..... III-9

Gambar 3.5 Laju Inflasi Kota Bengkulu dan Nasional Tahun 2017-2022 dan Proyeksi Tahun 2023-2024 ..... III-10

Gambar 3.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2017-2022..... III-13

Gambar 3.7 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2017-2022 ..... III-15

Gambar 3.8 Rasio Gini Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017-2022 ..... III-18

Gambar 3.9 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2017-2022 ..... III-20

Gambar 4.1 Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Pertama IV-35

Gambar 4.2 Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Kedua..... IV-36

Gambar 4.3 Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Ketiga..... IV-36

Gambar 4.4 Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Keempat IV-37

Gambar 4.5 Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Kelima..... IV-37

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan maka pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap Pemerintah Daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumber daya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD. Penyusunan RKPD merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan dan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

RKPD memuat arah dan kebijakan pembangunan Daerah selama 1 (satu) Tahun, yang diperoleh dari Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) sehingga menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan Daerah. Dokumen RKPD sekurang-kurangnya memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) maupun sumber–sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam mekanismenya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 20 dinyatakan bahwa Bappeda menyiapkan rancangan RKPD sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencaa Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa rancangan RKPD sebagai bahan

pembahasan Musrenbang RKPD yang melalui mekanisme Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengakomodir usulan yang berbasis *Bottom up* dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. Rancangan yang telah disempurnakan

Dalam prosesnya, penyusunan RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 juga berpedoman pada Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, serta Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur pembangunan dan keuangan daerah serta peraturan pemutakhirannya dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2045, Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 – 2029. Dimana tahun 2026 memasuki tahap ke-2 RPJMD tahun 2025–2029. Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD Tahun 2026 merujuk pada dokumen–dokumen perencanaan yang sudah ada. Oleh karenanya RKPD Tahun 2026 ini menjadi sangat penting karena sekaligus sebagai titik awal pelaksanaan evaluasi atas kinerja pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong selama tahun sebelumnya yang merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD, untuk melihat pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Rejang Lebong yang telah dan yang belum tercapai, disamping pelaksanaan agenda pembangunan Nasional.

Dokumen RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 disusun sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 16 dengan tahapan :

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan awal;
c. Penyusunan rancangan;
d. Pelaksanaan Musrenbang;
e. Perumusan rancangan akhir;
f. Penetapan.

Selain dari itu, penyusunan RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta antara Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional. Demikian juga dengan dimasukkannya indikator kinerja utama daerah pada RKPD yang kesemuanya itu bertujuan untuk menjamin konsistensi dan akuntabilitas dokumen perencanaan dan pelaporan daerah.

Seluruh dokumen perencanaan, nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen anggaran yang tentunya akan disempurnakan melalui beberapa tahapan perumusan kebijakan

keuangan sehingga menjadi dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan RKPD

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonessia Nomor 6402) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
28. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 5);
30. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor …. Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor …..);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 161);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Nomor 182);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen Rancangan Akhir RKPD merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan yang lainnya, baik di tingkat pusat maupun Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sesuai dengan tahapan penyusunan RKPD dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Rancangan Akhir RKPD mengacu pada RPJMD Kabupaten/Kota, Rancangan Akhir RKPD Provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Rancangan Akhir RKPD digunakan untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam menyusun Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

Rancangan Akhir RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, serta atas-bawah dan bawah atas. Adapun gambaran tentang hubungan antara RKPD Kabupaten Rejang Lebong dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.

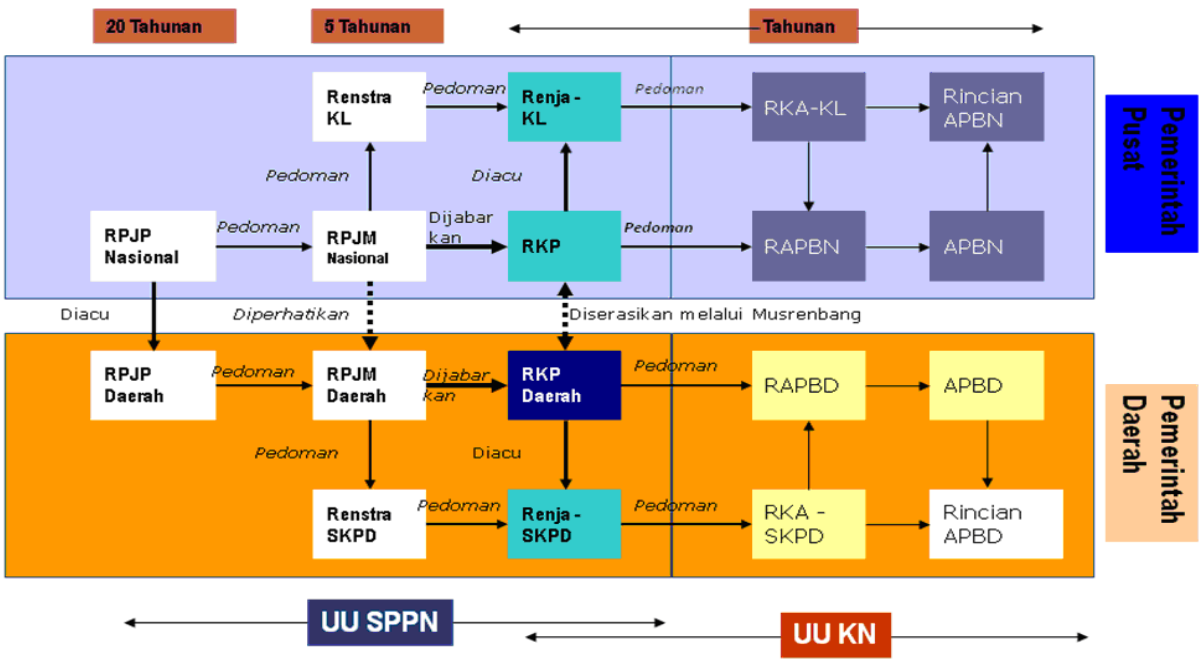

Gambar 1.1. Diagram Hubungan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Sebagai sebuah dokumen arahan, RKPD tidak berdiri sendiri namun merupakan dokumen yang memiliki keterpaduan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan Daerah lainnya. Hubungan antara RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun kedua RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 yang disusun secara pararel, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
2. RKPD Tahun 2026 merupakan acuan bagi Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun 2026, dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2026.
3. Substansi RKPD memuat program dan kegiatan OPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Renja OPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja OPD.
4. Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Rejang Lebong sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Rejang Lebong.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuan disusunnya RKPD Tahun 2026 adalah untuk:

1. Untuk mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
2. Pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.
3. Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) yang ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2026.
4. Sebagai instrumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Rejang Lebong ini disusun dengan sistematika yang disesuaikan dengan Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3 Hubungan antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

2.1 Kondisi Umum Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi Daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Menjelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan, khususnya indikator yang dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka melayani masyarakat umum.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Menjelaskan kondisi umum aspek daya saing Daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan Daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2024

Berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dari dokumen RKPD tahun 2024 yang sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024.

2.2.2 Evaluasi RPJMD

Berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dari dokumen RPJMD 2021 – 2026 yang sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Mencakup permasalahan pembangunan Daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan Daerah dan permasalahan lainnya terkait layanan dasar dan tugas dan fungsi perangkat Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah.

Membahas permasalahan prioritas yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD

2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah

Membahas permasalahan pembangunan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi perangkat Daerah.

III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat Daerah dan Nasional, rancangan kerangka ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Suatu prioritas pembangunan Daerah Tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan Tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun rencana.

V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas Daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan Tahunan, kedudukan Tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan ntuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir Tahun perencanaan.

VII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis

Kabupaten Rejang Lebong adalah sebuah kabupaten di Provinsi Bengkulu yang memiliki luas wilayah 1.550,28 km² dengan populasi sekitar 281.281 jiwa dan Ibu kotanya adalah Curup. Kabupaten Rejang Lebong terletak pada posisi 102°19'-102°57' Bujur Timur dan 2°22'07''- 3°31' Lintang Selatan. Kabupaten Rejang Lebong berada di lereng pegunungan Bukit Barisan dan berjarak 85 km dari Kota Bengkulu yang merupakan ibukota provinsi.

Secara geografis Kabupaten Rejang Lebong terletak di antara dua buah bukit yakni sebelah barat di apit oleh pegunungan Bukit Barisan dan sebelah timur diapit oleh Bukit Kaba dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi rawas Provinsi Sumatera Selatan;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu

Untuk lebih jelasnya batas administratif Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.

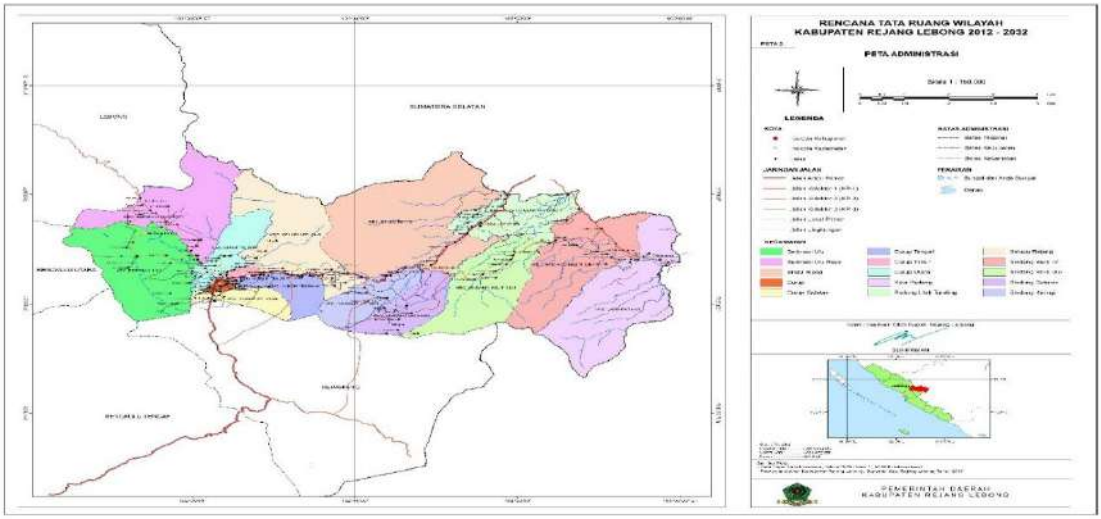

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong 2012-2032

Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong tersebar ke dalam 15 wilayah Kecamatan, wilayah terluas adalah Kecamatan Padang Ulak Tanding sebesar 242,97 km² sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Curup dengan luas wilayah sebesar 5,21 km² (Tabel 2.1). Jarak ibukota Kabupaten Rejang Lebong dari ibukota Provinsi Bengkulu adalah 85 km, dari Kota Lubuk Linggau (Provinsi Sumatera Selatan) 58,4 km, dan dari Palembang (Ibukota Provinsi Sumatera Selatan) 774 km.

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Menurut Kecamatan
di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas	
			(km2/*sq.km*)	Persentase
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Curup	Pasar Baru	5,21	0,34
2	Curup Utara	Tunas Harapan	47,08	3,04
3	Curup Timur	Talang Ulu	10,32	0,67
4	Curup Selatan	Lubuk Ubar	36,08	2,32
5	Curup Tengah	Air Bang	19,05	1,23
6	Sindang Kelingi	Beringin Tiga	68,83	4,44
7	Sindang Dataran	Bengko	80,78	5,21
8	Kota Padang	Kota Padang	190,38	12,28
9	Sindang Beliti Ilir	Lubuk Belimbing I	167,59	10,81
10	Bermani Ulu	Kampung Melayu	121,12	7,81
11	Bermani Ulu Raya	Tebat Tenong Luar	207,99	13,42
12	Padang Ulak Tanding	Padang Ulak Tanding	242,97	15,67
13	Binduriang	Kepala Curup	44,46	2,87
14	Sindang Beliti Ulu	Lubuk Alai	143,22	9,24
15	Selupu Rejang	Air Duku	165,29	10,66
Jumlah			**1.550,26**	**100**

Sumber: Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka BPS, 2025

Secara topografi, Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah yang berbukit-bukit terletak di antara dua bukit yakni sebelah barat diapit oleh pegunungan Bukit Barisan dan sebelah timur diapit oleh Bukit Kaba, dengan ketinggian kurang dari 100 m hingga di atas 1.000 m di atas permukaan laut (m.dpl). Tabel 2.2 menunjukkan wilayah Kabupaten Rejang Lebong dengan ketinggian 0 – 250 m diatas permukaan laut memiliki luas 24.477,49 ha, ketinggian 250– 500 m diatas permukaan laut seluas 23.671,78 ha, ketinggian 500 – 750 m seluas 25.698,34 ha, ketinggian 750 - 1.000 m seluas 35.841,12 ha, ketinggian 1000 – 1500 m seluas 38.906,69 ha, 1500 – 2000 m seluas 6.076,64 ha dan ketinggian diatas 2.000 m seluas 254,78 ha. Secara umum Kabupaten Rejang Lebong sangat potensial untuk dikembangkan jenis tanaman perkebunan baik untuk skala kecil maupun skala besar.

Tabel 2.2
Luas Wilayah Menurut Ketinggian Tanah di
Kabupaten Rejang Lebong

Ketinggian	Luas	
(Meter)	Ha	Persentase
(1)	*(2)*	*(3)*
0 – 250	24.477,49	15,80
250 – 500	23.671,78	15,28
500 – 750	25.698,34	16,59
750 – 1000	35.841,12	23,13
1000 - 1500	38.906,69	25,11
1500 - 2000	6.076,64	3,92
➢ 2000	254,78	0,16

Sumber: Laporan Draf Akhir Revisi RTRW Kab. Rejang Lebong 2020 - 2040

Secara rata-rata kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong terletak pada ketinggian 250 hingga 2.000 meter diatas permukaan laut dan ada 5 (lima) kecamatan yang daerahnya terletak pada ketinggian dibawah 250 meter diatas permukaan laut yaitu Kecamatan Kota Padang, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kecamatan Binduriang dan Kecamatan Sindang Beliti Ulu. Hal ini dapat dilihat dari dari Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Luas Wilayah Menurut Ketinggian Tanah per Kecamatan
di Kabupaten Rejang Lebong

Kecamatan	Ketinggian Tanah (meter)						
	0 – 250	250 – 500	500 - 750	750 – 1.000	1000-1500	1500-2000	> 2.000
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
Curup	-	-	620,79	-	-	-	-
Curup Utara	-	-	3.405,79	2.912,31	4.139,08	577,12	6,55
Curup Timur	-	-	917,32	159,36	-	-	-
Curup Selatan	-	-	2.350,73	567,04	-	-	-
Curup Tengah	-	-	662,50	783,47	302,57	-	-
Sindang Kelingi	-	73,37	2.062,80	2.597,18	3.353,46	-	-
Sindang Dataran	-	-	220,87	3.253,90	4.081,54	832,21	-
Kota Padang	9.979,50	4.333,43	1.823,77	1.050,36	1.716,41	135,47	-
Sindang Beliti Ilir	7.092,93	2.432,18	2.225,34	2.090,00	2.559,96	196,58	-
Bermani Ulu	-	-	783,92	7.130,00	3.612,50	1.067,01	194,98

Kecamatan	Ketinggian Tanah (meter)						
	0 – 250	250 – 500	500 - 750	750 – 1.000	1000-1500	1500-2000	> 2.000
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
Bermani Ulu Raya	-	-	238,62	7.000,64	7.187,95	299,58	-
Padang Ulak Tanding	6.890,56	8.588,21	3.846,74	2.293,99	2.447,38	393,00	-
Binduriang	1,32	3.466,07	972,74	6,57	-	-	-
Sindang Beliti Ulu	513,18	4.778,52	5.447,48	1.753,15	1.371,01	182,01	-
Selupu Rejang	-	-	118,93	4.243,15	8.134,83	2.393,66	53,25
Jumlah	**24.477,49**	**23.671,78**	**25.698,34**	**35.841,12**	**38.906,69**	**6.076,64**	**254,78**

Sumber: Laporan Draf Akhir Revisi RTRW Kab. Rejang Lebong 2020 - 2040

1) Iklim

Sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia, Kabupaten Rejang Lebong yang terletak di wilayah Provinsi Bengkulu juga dipengaruhi oleh dua musim. Dua musim yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong yaitu musim hujan yang terjadi di bulan Desember- Maret dan musim kemarau yang terjadi di bulan Juni-September. Sementara pada bulan April-Mei dan Oktober-November merupakan masa peralihan atau pancaroba.

Pengamatan unsur Iklim menurut bulan Stasiun Klimatologi Klas I Pulau Baai Bengkulu tahun 2023 bahwa jumlah curah hujan berkisar 1.709,30 mm per tahun dan jumlah hari hujan berkisar 174 hari setiap tahunnya. Dapat dilihat dari tabel 2.4 berikut

Tabel 2.4
Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan
di Stasiun Klimatologi Klas I Pulau Baai Bengkulu Tahun 2024

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm/bulan)	Jumlah Hari Hujan (hari)
(1)	**(2)**	**(3)**
Januari	234,30	19
Pebruari	419,50	23
Maret	364,70	25
April	266,40	23
Mei	300,50	16
Juni	249,10	15

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm/bulan)	Jumlah Hari Hujan (hari)
(1)	(2)	(3)
Juli	204,80	37
Agustus	13,30	31
September	100,10	30
Oktober	106,30	31
November	316,70	30
Desember	430,40	31

Sumber : Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka BPS, 2025

2) Penggunaan Lahan

Pada dasarnya penggunaan lahan suatu wilayah merupakan perwujudan fisik dari semua kegiatan sosial ekonomi penduduk Kabupaten Rejang Lebong dengan luas wilayah mencapai 1.550,28 km². Penggunaan lahan di Kabupaten Rejang Lebong secara umum meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung dibedakan menjadi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya. Sedangkan kawasan budidaya dibedakan menjadi kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan pertahanan negara.

Tabel 2.5
Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023

Penggunaan Lahan	Penggunaan Lahan	
	(km2/*sq.km*)	Persentase
(1)	*(2)*	*(3)*
Badan Air	3,36	0,22
Belukar	0,84	0,05
Belukar Rawa	0,05	0,00
Hutan Alam	384,65	24,81
Kawah	1,97	0,13
Perkebunan	1.019,80	65,78
Permukiman	30,05	1,94
Pertanian Lahan Kering	72,14	4,65
Sawah	32,39	2,09
Tanah Terbuka	5,03	0,32
Total	**1.550,28**	**100**

Sumber: RTRW Kab. Rejang Lebong 2020 - 2040

Berdasarkan data pada tabel 2.5 diketahui bahwa penggunaan lahan paling banyak di Kabupaten Rejang Lebong adalah dimanfaatkan untuk perkebunan yaitu sebanyak 65,78%, sedangkan penggunaan lahan yang paling kecil yaitu dimanfaatkan untuk Belukar rawa yaitu sebanyak 0,00%.

3) Potensi Pengembangan Wilayah

3.1. Pertanian dan Perkebunan

Kabupaten Rejang Lebong dengan topografi yang berbukit-bukit dan kondisi tanah yang subur sangat potensial untuk dikembangkan jenis tanaman perkebunan baik untuk skala kecil maupun skala besar. Tanaman perkebunan yang mendominasi di Kabupaten Rejang Lebong antara lain kopi. Untuk tanaman kopi pada tahun 2023 total produksinya mencapai 13.721,081 ton/tahun dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 14.826,89 ton/tahun. Ada lima kecamatan dengan produksi kopi terbanyak di Kabupaten Rejang Lebong yaitu Kecamatan Sindang Dataran memproduksi 2.971,7 Ton, Kecamatan Selupu Rejang 1.638,05 Ton, Kecamatan Bermani Ulu Raya 1.630,5 ton, Kecamatan Sindang Kelingi 1.508,75 Ton, dan Kecamatan Kota Padang 1.290,8 ton.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berperan penting dalam perekonomian Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan sektor utama yang memberikan peranan terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan share sektor ini yang mendominasi. Pada tahun 2024 peranan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Rejang Lebong adalah 32,48 persen dengan nilai nominal 4.244,46 miliar rupiah (atas dasar harga berlaku).

Berdasarkan Rejang Lebong dalam Angka Tahun 2025 Kabupaten Rejang Lebong merupakan wilayah penghasil sayuran. Pada tahun 2024 tercatat untuk hortikultura bawang merah sebanyak 2.466 kuintal, cabai merah 290.488 kuintal, kentang 28.186 kuintal, kubis mencapai 626.900 kuintal, petsai 292.664 kuintal, tomat 213.026 kuintal, bawang daun 124.378 kuintal, terong 635.098 kuintal, buncis 212.909 kuintal, cabe rawit 102.617 kuintal dan kacang panjang, 24.837 kuintal. Untuk tanaman biofarmaka, produksi terbanyak ada pada komoditas jahe yaitu mencapai 16.260.077 Kg. Sedangkan untuk tanaman buah-buahan, produksi terbanyak di Kabupaten Rejang Lebong adalah buah pisang 69.088,30 kuintal di Kecamatan Padang Ulak Tanding, alpukat 44.611,50 kuintal di Kecamatan Sindang Dataran, durian mencapai 35.932,36 kuintal di Kecamatan Padang Ulak Tanding, dan Jeruk siam 29.851 kuintal di Kecamatan Bermani Ulu Raya

3.2. Peternakan

Populasi ternak di Kabupaten Rejang Lebong dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah ternak besar yang meliputi sapi potong, sapi perah dan kerbau, Kelompok kedua disebut ternak kecil meliputi kambing, domba, dan kelinci. Sedangkan kelompok ketiga meliputi ayam

kampung, ayam petelur, dan ayam pedaging.

Data dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rejang Lebong 2024 menunjukkan terjadi kenaikan produksi daging ternak dari 2023. Jumlah total produksi daging ternak di tahun 2023 yang terdiri dari daging sapi, daging kerbau, daging kambing, daging domba, daging ayam buras dan daging ayam ras adalah sebesar 1.075,54 ton naik menjadi 1.134,48 ton di tahun 2024.

3.3. Perikanan

Usaha perikanan tangkap yang ada di Kabupaten Rejang Lebong hanya ada untuk perairan umum, tidak ada perikanan laut. Produksi perikanan pada sektor perikanan tangkap dengan sebesar 5.888,19 ton pada tahun 2024, terlihat pada Tabel 2.6 bahwa produksi kolam air deras paling banyak dibandingkan dengan jenis usaha kolam lainnya dengan produksi sebesar 4.547,13 ton pada tahun 2024.

Tabel 2.6
Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Usaha (ton)
di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Produksi (Ton)				
		Kolam Air Deras	Kolam Air Tenang	Kolam Terpal/ Fiber	Jaring Apung	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Curup Kota	42	33,5	20.10	-	95,60
2	Curup Utara	139,2	38,3	23.40	42	242,90
3	Curup Timur	-	35,1	27.72	-	62,82
4	Curup Selatan	122,67	127,35	40.95	-	290,97
5	Curup Tengah	-	55,23	17.11	-	72,34
6	Sindang Kelingi	-	5,04	1.79	-	6,83
7	Sindang Dataran	-	-	-	-	-
8	Kota Padang	119,9	59,06	-	-	178,96
9	Sindang Beliti Ilir	-	3,7	-	-	3,70
10	Sindang Beliti Ulu	-	-	-	-	-
11	Bermani Ulu	-	68,42	25.50	-	93,92
12	Bermani Ulu Raya	9,46	104,19	24.15	-	137,80
13	Padang Ulak Tanding	4113,9	443,3	130.93	-	4.688,13
14	Binduriang	-	-	-	-	-
15	Selupu Rejang	-	-	14.23	-	14,23
Jumlah		**4.547,13**	**973,19**	**325,87**	**42**	**5.888.19**

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong, 2025

3.4. Kehutanan

Urusan kehutanan menurut indikator kinerja dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memiliki empat indikator, diantaranya: kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB; rehabilitasi hutan dan lahan kritis; kerusakan kawasan hutan, dan rasio luas kawasan lindung untuk

menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan. Dari keempat indikator tersebut, dua indikator dapat terisi dan dua lainnya belum dapat terisi. Indikator kinerja yang dapat disajikan adalah rehabilitasi hutan dan lahan serta kerusakan kawasan hutan.

Informasi kehutanan pada pembahasan ini diperoleh dari UPTD KPHL Bukit Balai Rejang dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Secara umum, luas wilayah kerja KPHL Bukit Balai Rejang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor: SK.994/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Bukit Balai Rejang (Unit VII), yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu adalah seluas ± 16.059 hektar. Di lain pihak, luas TNKS yang berada di Kabupaten Rejang Lebong hingga tahun 2020 seluas 25.780 hektar.

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
UPTD KPHL Bukit Balai Rejang						
1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (ha)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.	Kerusakan kawasan hutan (ha)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)						
1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (ha)	0	78,18	192,93	192,93	192,93
2.	Kerusakan kawasan hutan	10.302,16	10.302,16	10.302,16	10.302,16	10.302,16
3.	Keanakaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	100	100	100	100	100

Sumber : UPTD KPHL Bukit Balai Rejang, 2021 dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), 2025
*) Keterangan Berdasarkan analisis spasial peta lahan kritis Tahun 2017
**) Keterangan N/A (Not Available) = Tidak ada data dari OPD terkait

Pada indikator rehabilitasi hutan dan lahan kritis (RHL) menurut UPTD KPHL Bukit Balai Rejang hanya tersedia pada tahun 2016 dan 2017. Hal tersebut dikarenakan kegiatan RHL memang hanya dilaksanakan pada tahun 2016 – 2017. Kegiatan RHL tersebut terselenggara melalui DIPA BPDASHL Ketahun sebagai UPT Kementerian LHK di Provinsi Bengkulu kemudian dilaksanakan oleh BPDASHL Ketahun melalui Pihak Ketiga, sehingga data pada tahun-tahun selanjutnya tidak tersedia.

Pada data yang bersumber dari TNKS, diketahui rehabilitasi hutan dan lahan kritis di tahun 2021 seluas 78.18 hektar dan meningkat menjadi 192.3 hektar pada tahun 2022. Selanjutnya, indikator kerusakan kawasan hutan mulai tahun 2019 luasannya sebesar 10.302,16 hektar atau setara dengan 39.96 persen dari total luas hutan Rejang Lebong yang termasuk dalam TNKS, luasan ini tidak mengalami perubahan hingga tahun 2024. Lebih lanjut, dengan melihat data yang

bersumber dari TNKS diketahui bahwa indikator rasio luasan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan mencapai 100 mulai tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan seluruh kawasan konservasi TNKS yang berada di Kabupaten Rejang Lebong seluas 25.780 hektar merupakan kawasan lindung guna menjaga kelestarian keanekaragaman hayati.

3.5. Kawasan Rawan Bencana

Resiko bencana sesuai kondisi geologi dan resiko bencana akibat perubahan lingkungan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong antara lain adalah berupa gempa bumi, letusan gunung api dan gerakan tanah.

a) Wilayah Kabupaten Rejang Lebong, khususnya wilayah bagian barat, yang berada pada jalur Sistem Sesar Sumatera (Sesar Ketaun dan Sesar Musikeruh yang merupakan jalur patahan utama),

b) Keberadaan gunung api Bukit Daun (2467 m.dpl), Bukit Lalang (1306 m.dpl), Bukit Kelang (1959 m.dpl), Bukit Kaba (1938 m.dpl), Bukit Besar (1853 m.dpl) dan Bukit Balai (1683 m.dpl). Wilayah yang termasuk dalam Daerah Bahaya dan Daerah Waspada untuk gunung Bukit Daun adalah wilayah bagian barat dari kecamatan Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya, sedangkan untuk gunung Bukit Kaba adalah wilayah bagian selatan dari kecamatan Selupu Rejang, Sindang Kelingi, dan Sindang Dataran. Selanjutnya, lokasi Daerah Bahaya dan Daerah Waspada untuk gunung Bukit Besar berada di bagian selatan dari wilayah kecamatan Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir dan Kota Padang serta bagian timur dari Kecamatan Sindang Dataran.

c) Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan maka gerakan tanah pada umumnya terjadi pada sempadan sungai atau tebing-tebing dengan kemiringan lereng yang relatif terjal dan disusun oleh masa batuan atau tanah hasil lapukan batuan breksi, lava andesit-basalt, tuf dan breksi gunung api yang bersifat lepas-lepas sehingga mudah longsor. Daerah yang berpotensi untuk terjadinya gerakan tanah adalah di sepanjang aliran sungai atau tebing-tebing yang relatif terjal di wilayah bagian utara Kecamatan Padang Ulak Tanding, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, dan Kota Padang, serta pada tebing-tebing sepanjang jalan negara di wilayah Kecamatan Selupu Rejang, Sindang Kelingi dan Binduriang.

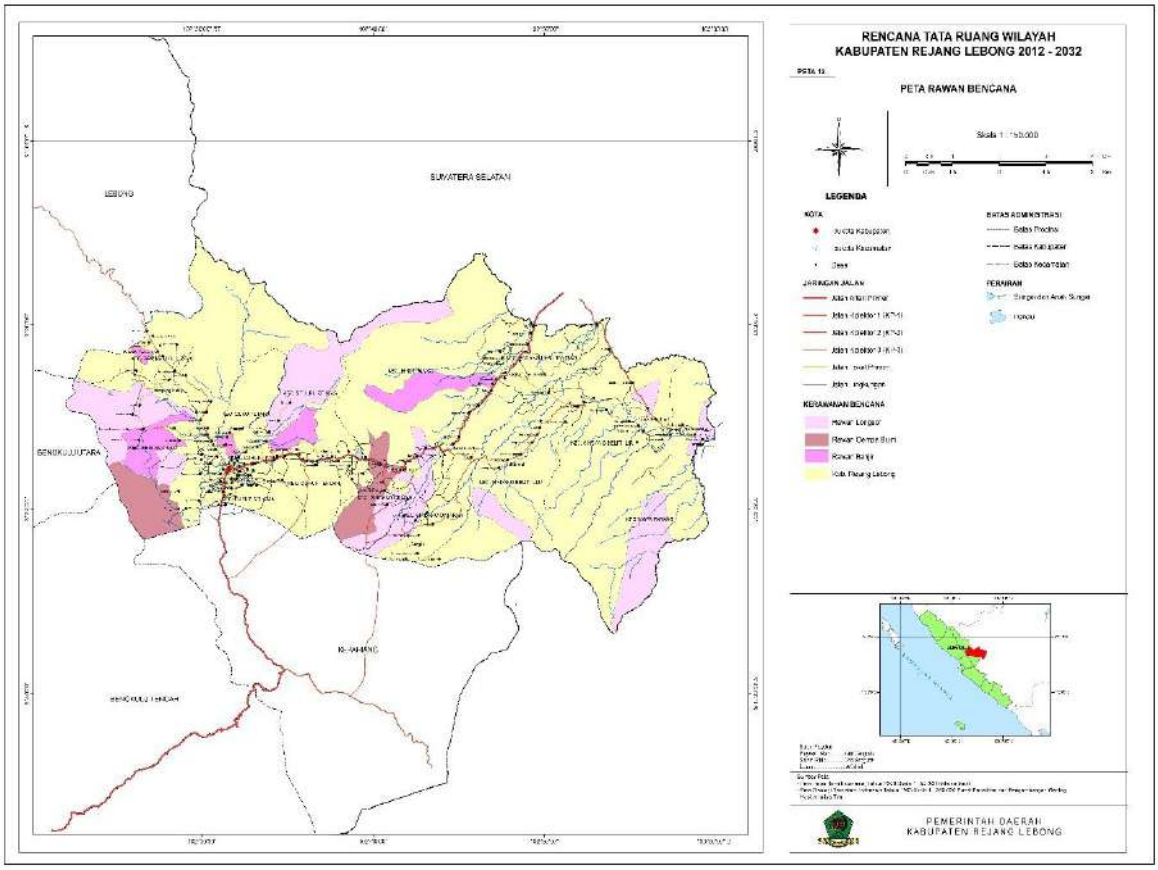

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong 2012-2032

Gambar 2.2 Peta Kawasan Rawan Bencana

4) Komposisi dan Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil perhitungan penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, jumlah penduduk Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2024 adalah 288.832 jiwa dengan rincian penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 147.148 jiwa dan perempuan sebanyak 141.684 jiwa.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

Kelompok Umur	Jenis kelamin		Jumlah total penduduk
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
0 – 4	12.101	11.589	23.690
5 – 9	11.086	10.494	21.580
10 - 14	11.386	11.028	22.414
15 - 19	12.165	11.555	23.720
20 - 24	12.487	12.003	24.490
25 - 29	12.424	11.725	24.149

Kelompok Umur	Jenis kelamin		Jumlah total penduduk
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
30 - 34	12.083	10.915	22.998
35 - 39	11.342	10.605	21.947
40 - 44	10.687	10.635	21.322
45 - 49	10.449	10.304	20.753
50 - 54	9.015	8.700	17.715
55 - 59	7.303	7.098	14.401
60 - 64	5.672	5.566	11.238
65 - 69	4.211	4.189	8.400
70 - 74	2.705	2.824	5.529
75 +	2.032	2.454	4.486
JUMLAH	**147.148**	**141.684**	**288.832**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Laju pertumbuhan penduduk menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2020-2024 sebesar 1,16%. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Rejang Lebong di 15 kecamatan mengalami pertumbuhan yang tidak signifikan. Laju pertumbuhan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Selupu Rejang sebesar 2,61% dan yang terkecil bahkan berkurang terjadi di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Sindang Kelingi, Sindang Beliti Ulu dan Kecamatan Curup sebesar 0,21%. Data dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9

Laju Pertumbuhan Penduduk Per tahun Menurut Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Penduduk (jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
	2023	***2024***	***2020-2023***	***2020-2024***
(1)	***(2)***	***(3)***	***(4)***	***(5)***
Kota Padang	12.518	12.552	0,31	0,30
Padang Ulak Tanding	20.395	20.602	1,12	1,09
Sindang Kelingi	13.289	13.262	-0,21	-0,21
Curup	26.815	26.762	-0,21	-0,21
Bermani Ulu	14.243	14.448	1,58	1,54
Selupu Rejang	38.758	39.703	2,67	2,61
Curup Utara	19.924	20.360	2,40	2,34
Curup Timur	27.546	28.156	2,43	2,37
Curup Selatan	24.733	25.208	2,11	2,06
Curup Tengah	34.954	34.957	2,67	0,02

Kecamatan	Penduduk (jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
	2023	*2024*	*2020-2023*	*2020-2024*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Binduriang	9.194	9.287	1,11	1,08
Sindang Beliti Ulu	11.334	11.311	-0,21	-0,21
Sindang Dataran	10.471	10.488	0,19	0,18
Sindang Beliti Ilir	9.191	9.213	0,27	0,26
Bermani Ulu Raya	12.345	12.523	1,58	1,55
Jumlah	**285.710**	**288.832**	**1,18**	**1,16**

Sumber : Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka, 2024 dan 2025

5) Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024, kepadatan penduduk mencapai 186,31 jiwa per km^2 tertinggi berada di Kecamatan Curup yang mencapai 5.133,78 jiwa per km^2 hal ini disebabkan karena Kecamatan Curup merupakan pusat kegiatan dan pelayanan. Kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Sindang Beliti Ilir dengan angka 54,97 jiwa per km^2. Dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan (per Km^2)
di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

Kecamatan	Persentase Penduduk		Kepadatan Penduduk per km^2	
	2023	*2024*	*2023*	*2024*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Kota Padang	4,38	4,35	65,75	65,93
Padang Ulak Tanding	7,14	7,13	83,94	84,79
Sindang Kelingi	4,65	4,59	193,04	192,65
Curup	9,39	9,27	5.146,83	5.133,78
Bermani Ulu	4,99	5,00	117,57	119,28
Selupu Rejang	13,57	13,75	234,47	240,20
Curup Utara	6,97	7,05	423,10	432,41
Curup Timur	9,64	9,75	2.666,60	2.726,51
Curup Selatan	8,66	8,73	688,94	698,62

Kecamatan	Persentase Penduduk		Kepadatan Penduduk per km^2	
	2023	*2024*	*2023*	*2024*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Curup Tengah	12,23	12,10	1.834,86	1.834,86
Binduriang	3,22	3,22	206,75	208,85
Sindang Beliti Ulu	3,97	3,92	79,14	78,97
Sindang Dataran	3,66	3,63	129,61	129,83
Sindang Beliti Ilir	3,22	3,19	54,84	54,97
Bermani Ulu Raya	4,32	4,34	59,35	60,21
Jumlah	**100**	**100**	**184,30**	**186,31**

Sumber : Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka, 2024 dan 2025

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1) Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi persoalan di banyak daerah di Indonesia. Pemerintah daerah maupun pusat berusaha untuk menanggulangi masalah kemiskinan untuk mewujudkan tujuan 1 SDGs, yaitu no poverty (tanpa kemiskinan). Pada tahun 2020 sampai 2024, kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong cenderung menurun setiap tahunnya yang ditunjukkan dengan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin yang menurun meskipun garis kemiskinan terus meningkat. Garis Kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2020 sebesar Rp. 472.555 perkapita/bulan dan meningkat menjadi Rp. 595.125 perkapita/bulan pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan 5.91% pertahun. Sementara jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2020 adalah sebanyak 41.470 jiwa dan menurun menjadi 41.160 jiwa pada tahun 2024. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Rejang Lebong juga menurun dari sebesar 15,85 persen di tahun 2020 menjadi sebesar 14,65 persen di tahun 2024 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -2,13 persen per tahun. Adapun data lebih lanjut mengenai kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 11
Profil Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	41,47	43,30	43,18	41,18	41,16	-0,19
Persentase penduduk miskin (persen)	15,85	15,85	15,65	14,79	14,65	-2,13
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	472.555	487.490	530.029	566.433	595.125	5.91

Sumber: Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka (data diolah), 2025

Walaupun mengalami penurunan tiap tahun, namun persentase penduduk miskin di Kabupaten Rejang Lebong masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu dan Nasional. Perbandingan persentase penduduk miskin di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut.

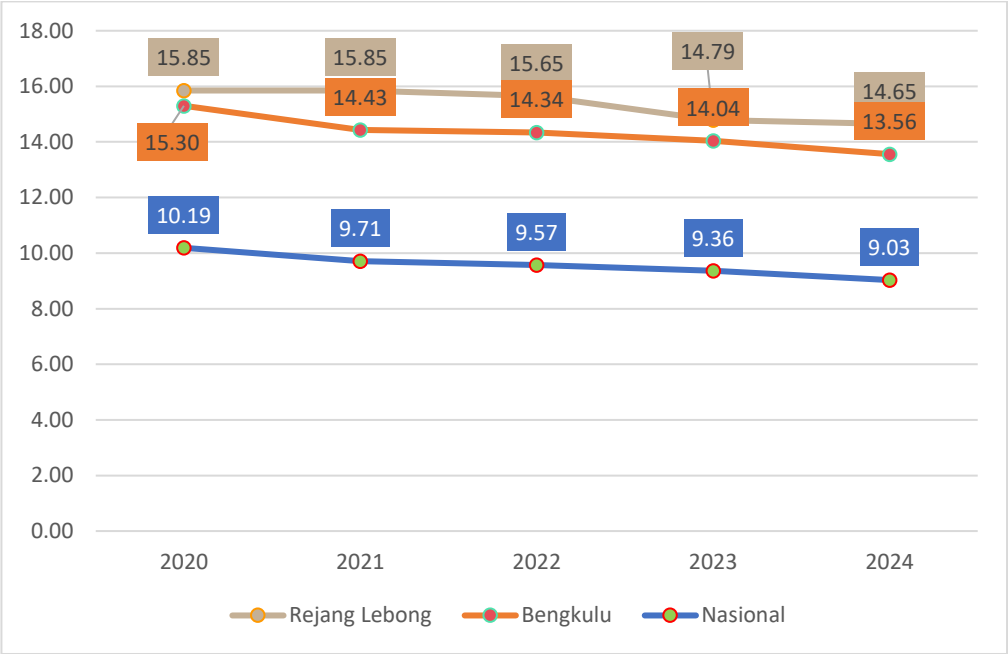

Sumber: Website BPS Kabupaten Rejang Lebong, Website BPS Provinsi Bengkulu, Website BPS Nasional, 2024

Gambar 2. 3
Grafik Perbandingan Persentase Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2020-2024

Penentu angka kemiskinan sangatlah kompleks diantaranya adalah persentase penduduk diatas garis kemiskinan, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih dan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Persoalan Kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan pemerintah juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode tahun 2020 hingga tahun 2024 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Rejang Lebong cenderung meningkat. Pada tahun 2020 indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong sebesar 1.79 persen kemudian meningkat menjadi 1,99 persen pada tahun 2024. Jika semakin besar Indeks Kedalaman Kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Jika dibandingkan dengan Provinsi Bengkulu, rata-rata pengeluaran penduduk dari garis Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong berada dibawah rata-rata pengeluaran penduduk dari garis Kemiskinan Provinsi Bengkulu. Hal yang sama juga terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Rejang Lebong yang menunjukkan nilai yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Jika dilihat maka Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong meningkat menjadi 0.38 persen pada tahun 2024 dari sebesar 0.35 persen pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan Provinsi Bengkulu, Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong berada dibawah Provinsi Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Rejang Lebong lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Bengkulu. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.12
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Wilayah	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Rejang Lebong	1.79	2.04	2.67	2.81	1,99
Provinsi Bengkulu	2.4	2.57	2.43	2.14	2,11

Wilayah	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Rejang Lebong	0.35	0.4	0.67	0.79	0,38
Provinsi Bengkulu	0.56	0.62	0.58	0.52	0,49

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2025

1.a) Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan esktrem; setara dengan USD 1.9 PPP (Purchasing Power Parity). PPP ditentukan menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antar negara dan antar waktu Atau dengan kata lain, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan (BPS,2021). Sehingga misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp. 1.288.680 per keluarga per bulan (BPS, 2021).

Seiring dengan harapan Presiden RI yang menargetkan kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024, maka Presiden RI menerbitkan Intruksi Presiden RI Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem. Berdasarkan Keputusan Menko PMK Nomor 25 tahun 2022 tentang Wilayah Prioritas Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2022-2024, Kabupaten Rejang Lebong menjadi salah satu wilayah perluasan prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2023-2024.

a. Analisis posisi relatif

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial selaku Ketua Satgas Pengelola Data P3KE Nomor: B-464/17/D-1/KPS.01.00/02/2024, tanggal 26 Februari 2024 Perihal Pemberitahuan Hasil Perhitungan Estimasi Angka Kemiskinan Ekstrem Tingkat Kabupaten/ Kota tahun 2023, estimasi tingkat kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023 sebesar 2,94%, angka ini menurun 0,54 poin (15,51%) dari tahun 2022 yang mencapai angka 3,48%. Capaian ini lebih rendah dari capain rata-rata Provinsi Bengkulu (2,08%) dan capaian rata-rata nasional (1,12 %), lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

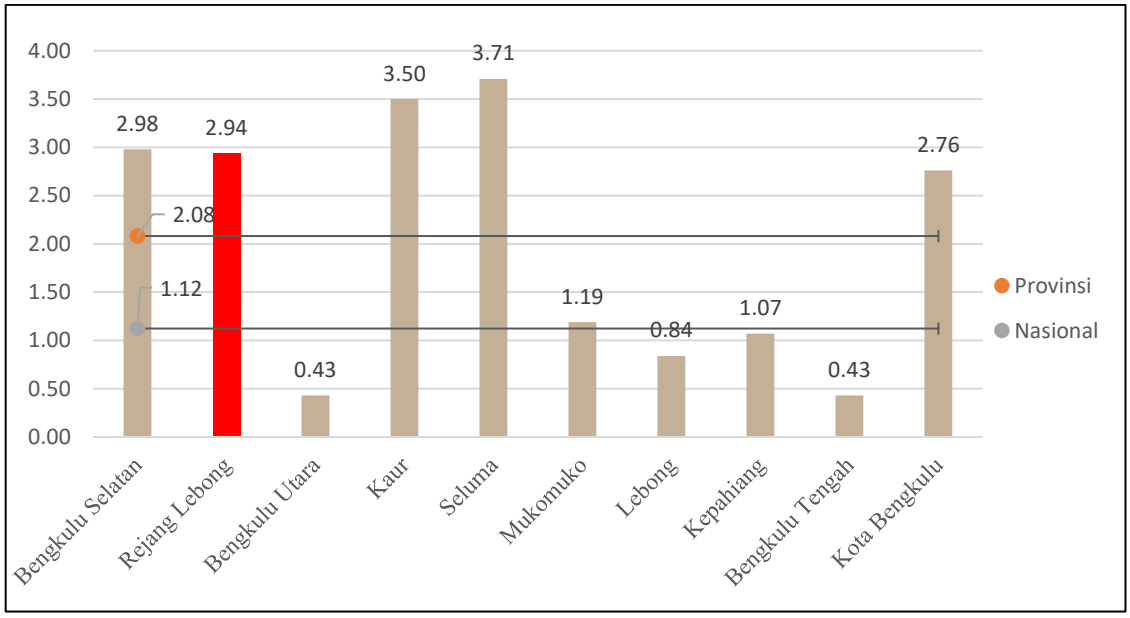

Sumber : Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD), Bappeda 2023

Gambar 2.4
Grafik Posisi Relatif Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2023

b. Analisis perkembangan antar waktu

Dilihat dari perkembangan antar waktu, persentase penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Rejang Lebong rentang waktu 2021-2023 fluktuatif, pada tahun 2021 berada pada angka 1,27% menjadi 2,94% di tahun 2023 Lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

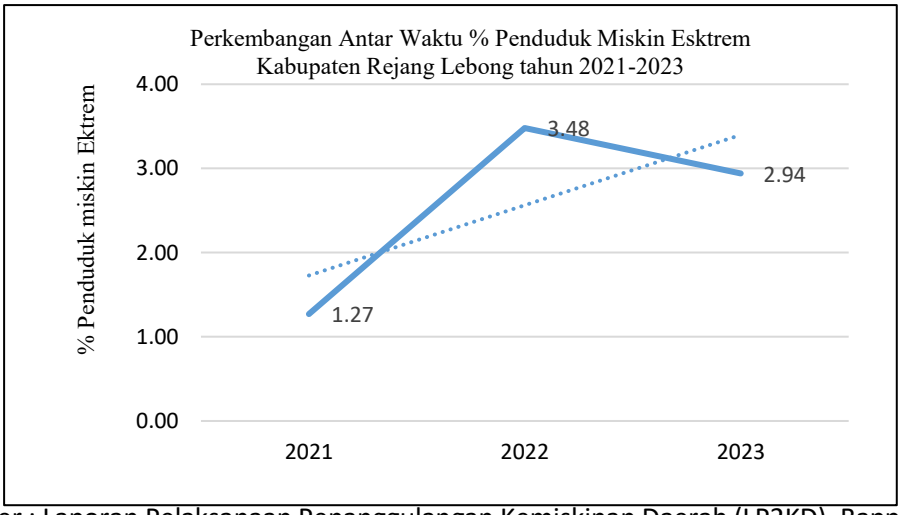

Sumber : Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD), Bappeda 2023

Gambar 2.5
Grafik Perkembangan Antar Waktu % Penduduk Miskin Ekstrem
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2023

c. Analisis efektivitas

Persentase penduduk miskin ekstrem Kabupaten Rejang Lebong berada pada urutan ke-4 tertinggi setelah Kabupaten Seluma, Kaur, Bengkulu Selatan,. Estimasi angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023 menunjukkan kinerja membaik dengan rata-rata pertumbuhan pertahun pada periode 2021-2023 sebesar 0,52% pertahun, lebih rinci sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

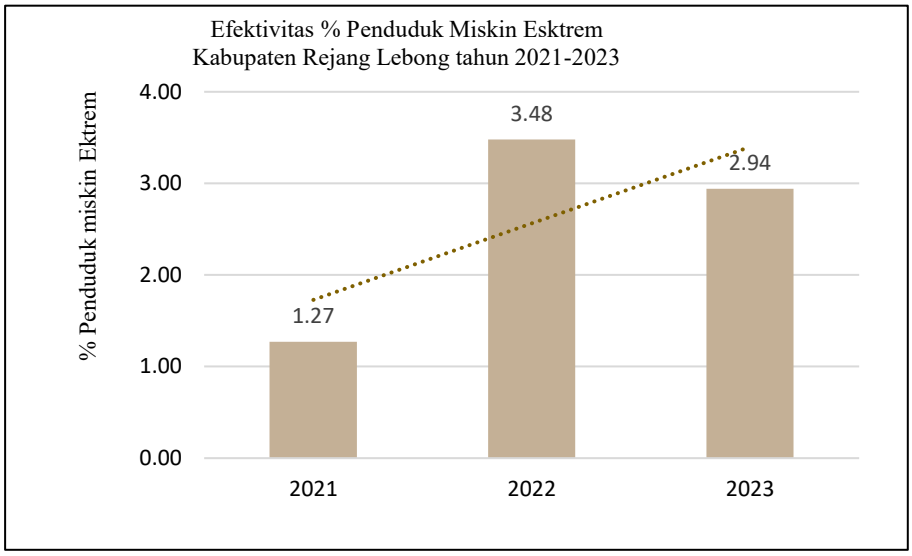

Sumber : Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD), Bappeda 2023

Gambar 2.6
Grafik Efektivitas % Penduduk Miskin Ekstrem
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2023

3.4.4 Analisis relevansi

Estimasi Angka penduduk miskin ekstrem Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023 sejalan dengan capaian provinsi dan nasional, hal ini ditandai dengan pada periode yang sama capaian nasional, provinsi dan kabupaten menurun. Lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

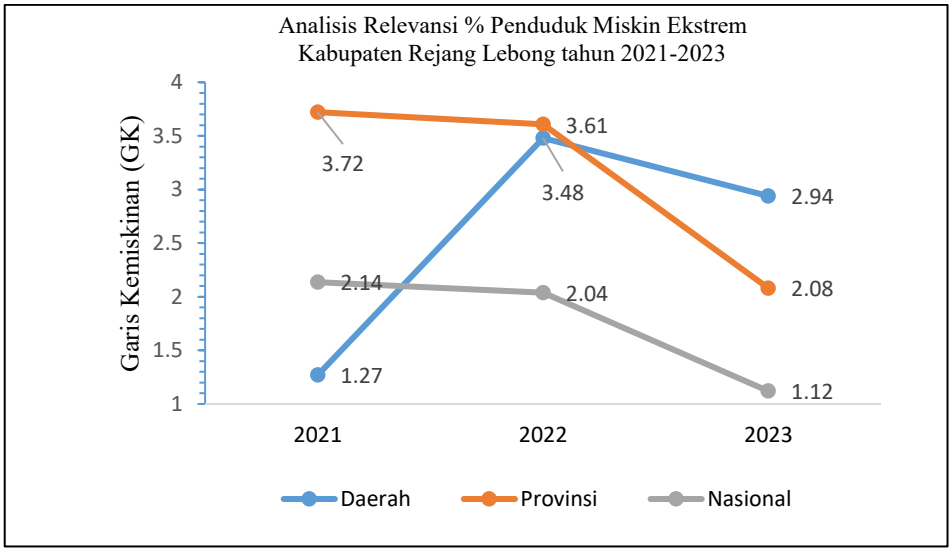

Sumber : Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD), Bappeda 2023

Gambar 2.7
Grafik Relevansi Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Rejang Lebong 2015-2023
Sumber Data: Rejang Lebong dalam angka, data diolah

Estimasi angka kemiskinan ekstrem bukan merupakan angka resmi statistik kemiskinan. Angka ini dihitung sebagai rujukan internal bagi pemerintah daerah, terutama sebagai alat bantu dalam melakukan identifikasi dan evaluasi capaian upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE) serta sebagai dasar dalam melakukan perencanaan dan pengalokasian anggaran PPKE untuk memastikan pencapaian target 0% di tahun 2045.

2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran

serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Kondisi perekonomian Rejang Lebong menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024. Hal ini terlihat dari Laju Pertumbuhan PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif ditengah perlambatan ekonomi global maupun nasional. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Rejang Lebong pada tahun 2024 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Pada Tahun 2024 nilai PDRB Kabupaten Rejang Lebong atas dasar harga konstan 2010, mencapai 7.101,11 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 6.083,03 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan terdapat peningkatan PDRB ADHK sebesar 1.018,08 triliun rupiah selama kurun waktu lima tahun tersebut.

Tabel 2.13
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta rupiah) Kabupaten Rejang Lebong 2020-2024

Lapangan Usaha/*Industry*		**2020**	**2021**	**2022**	**2023***	**2024****
(1)		***(2)***	***(3)***	***(4)***	***(5)***	***(6)***
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.816,65	1.865,52	1.962,38	2.001,38	2.059,88
B	Pertambangan dan Penggalian	83,91	85,29	86,11	90,15	92,17
C	Industri Pengolahan	249,34	255,18	264,46	273,08	277,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,32	6,82	7,26	7,50	7,77
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	10,73	10,88	11,24	11,97	12,69
F	Konstruksi	240,64	244,44	246,11	258,16	269,43
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.089,62	1.134,29	1 197,08	1.235,28	1.268,86

Lapangan Usaha/*Industry*		2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
H	Transportasi dan Pergudangan	364,98	375,49	395,53	418,10	423,33
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	117,15	118,69	127,12	138.98	152,32
J	Informasi dan Komunikasi	197,86	210,15	226,86	247.61	271,63
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	197,41	212,31	209,51	197,94	208,11
L	Real Estate	247,98	248,17	256,06	271,26	281,27
M,N	Jasa Perusahaan	9,11	8,93	9,91	10,67	11,57
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	592,140	606,92	606,73	647,81	693,62
P	Jasa Pendidikan	612,870	627,12	655,99	684,55	728,14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	168,570	186,41	197,22	217,08	235,85
R,S,T,U	Jasa Lainnya	76,760	77,60	84,55	97,46	107,13
	Produk Domestik Bruto	**6.083,03**	**6.274,23**	**6.544,12**	**6.808,99**	**7.101,11**

Catatan: * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka, BPS 2025

Selain dinilai Atas Dasar Harga (ADH) Konstan menurut lapangan usaha, PDRB ADH Konstan juga dinilai menurut pengeluaran atau produk dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir.

Tabel 2.14
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024
(Miliar Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.897,83	3.995,53	4.204,52	4.421,80	4.640,68
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	136,16	130,14	140,82	155,37	173,45
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	768,03	782,50	780,28	837,11	900,64
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.219,94	2.298,92	2.391,03	2.468,47	2.543,85
Perubahan Inventori	51,02	2,03	3,08	(59,20)	(5,14)
Ekspor Barang dan Jasa	(989,95)	(934,89)	(975,61)	(1.014,56)	(1.152,37)
Produk Domestik Regional Bruto	**6.083,03**	**6.274,23**	**6.544,12**	**6.809,00**	**7.101,11**

Catatan: * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka, BPS 2025

Selama kurun waktu 2019–2023, gambaran tentang perkembangan ekonomi Rejang Lebong berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada Tabel 2.14. Sebagian besar komponen pengeluaran akhir PDRB adh Konstan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, PDRB Rejang Lebong (adh Konstan) mencapai 7.101,11 miliar rupiah.

3) Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rejang Lebong dari Tahun 2020 sampai 2024 cenderung mengalami fluktuasi, dan mengalami penurunan yang cukup signifikan di Tahun 2020 dikarenakan kondisi pandemi Covid 19. Secara berurut pertumbuhannya masing-masing sebesar 0,07% (2020); 3,14% (2021); 4,3% (2022); 4,05 (2023); dan 4,29 (2024). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022, sebaliknya yang terendah terjadi pada Tahun 2020.

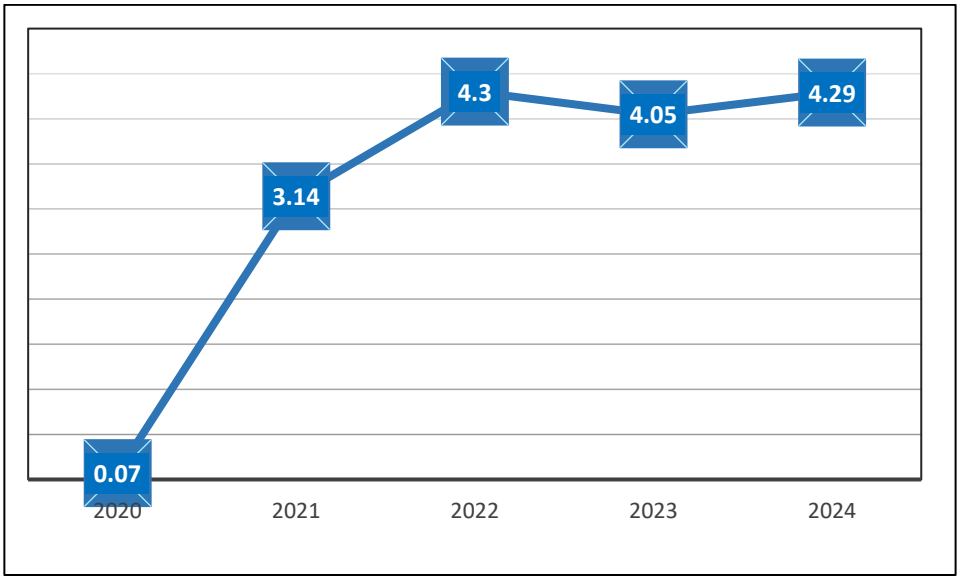

Sumber : Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka, BPS 2025

Gambar 2.8
Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Rejang Lebong (%) Tahun 2020- 2024

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1 Pendidikan

1) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Kasar (APK) menggambarkan keikutsertaan penduduk pada setiap jenjang pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Perkembangan APK di Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2020-2024 pada berbagai jenjang pendidikan adalah sebagaimana yang disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Angka Partisipasi Kasar menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
SD/MI	109.78	109,66	110,02	109,14	109,11
SMP/MTs	84,04	84,50	84,91	78,53	95,98
SMA/SMK/MA	102,93	104,32	102,72	103,16	96,06

Sumber : Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka, BPS 2025

Angka Partisipasi Kasar tingkat SD/MI dalam kurun lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan angka tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 110,02 dan terendah pada tahun 2024 yaitu sebesar 109,11. Sementara Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs mengalami peningkatan dari angka 84,04 di tahun 2020 menjadi 84,91 tahun 2022 namun mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 78,53 dan kembali meningkat menjadi 95,98 tahun 2024 yang merupakan kenaikan tertinggi. Untuk Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA juga mengalami fluktuasi, pada tahun 2020 sebesar 102,93 meningkat menjadi 104,32 pada tahun 2021 namun terjadi penurunan menjadi 102.72 pada tahun 2022, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 96,06 yang sebelumnya 103,16 pada tahun 2023.

2) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni adalah proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Perkembangan APM di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2019-2023 pada berbagai jenjang pendidikan adalah sebagaimana yang disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.16
Angka Partisipasi Murni menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
SD/MI	98.01	97.99	99,63	99,35	98,23
SMP/MTs	72.08	72.06	72,05	72,51	74,26
SMA/SMK/MA	61.47	62.95	62,91	66,59	68,56

Sumber : Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka, BPS 2025

Angka Partisipasi Murni tingkat SD/MI dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi yaitu sebesar 98.01 di tahun 2020 kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi sebesar 97.99, kemudian kembali naik pada tahun 2022 yaitu sebesar 99.63 dan terun menurun hingga tahun 2024 menjadi 98,23 atau turun sebesar 1,12 poin dari tahun sebelumnya. Angka Partisipasi Murni tingkat SMP/MTs, juga mengalami fluktuasi yaitu, ditahun 2020 sebesar 72,08 mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 72.06, kemudian tahun 2022 mengalami sedikit penurunan lagi menjadi 72,05. Akan tetapi pada tahun 2023 APM SMP/MTs mengalami peningkatan menjadi sebesar 72,51 dan pada tahun 2024 menjadi sebesar 74,26. Untuk Angka Partisipasi Murni tingkat SMA/SMK/MA

cenderung meningkat yaitu sebesar 61,47 ditahun 2020 dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 62.95 sedangkan di tahun 2022 mengalami sedikit penurunan sebesar 62.91, kemudian pada tahun 2023 berhasil meningkat menjadi sebesar 66.59 dan terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi sebesar 68,56.

3) Angka Partisipasi Sekolah

Dalam melihat seberapa besar tingkat partisipasi penduduk usia dalam kegiatan belajar/ sekolah dapat dilihat dari besaran Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS usia 7-12 tahun adalah jumlah penduduk kelompok usia pendidikan Dasar (7-12 tahun) yang sudah tamat atau masih menempuh pendidikan dasar per jumlah penduduk usia pendidikan 7-12 tahun. APS usia 13-15 tahun adalah jumlah penduduk kelompok usia pendidikan menengah pertama (13-15 tahun) yang sudah tamat atau masih menempuh pendidikan menengah pertama per jumlah penduduk usia pendidikan 13-15 tahun. Angka partisipasi sekolah di Kabupaten Rejang Lebong dalam lima tahun terakhir (tahun 2020-2024) menunjukan nilai yang semakin meningkat. Meningkatnya APS ini merupakan gambaran semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Angka partispasi menurut jenjangnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.17
Angka Partisipasi Sekolah menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
APS SD/MI	99,68	99,91	99,63	99,35	99,35
APS SMP/MTs	96,08	95,65	98,63	98,50	98,50

2.1.2.2.2) Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi di bawah usia 1 tahun per 1.000 kelahiran yang terjadi dalam kurun satu tahun. Angka ini kerap digunakan sebagai acuan dalam menilai kondisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan di suatu wilayah. Angka Kematian Bayi menggambarkan level kesehatan masyarakat.

Tabel 2.18
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Angka Kematian Bayi/1000	5,27	5,67	6,7	25	5,65

Sumber : LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, Angka Kematian Bayi di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan kecenderungan fluktuatif. Pada Tahun 2020 angka kematian bayi mencapai 5,27 per 1000 kelahiran, kemudian meningkat lagi pada tahun 2021 sebesar 5,67 hingga tahun 2023 menjadi 25 per 1000 kelahiran, namun berhasil turun cukup signifikan pada tahun 2024 menjadi 5,65 per 1000 kelahiran. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Rejang Lebong.

2) Prevalensi Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan fisik pada anak, selain ditandai dengan bertubuh pendek atau kerdil, stunting juga ditandai dengan terganggunya perkembangan otak. Jumlah kasus stunting di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan toleransi maksimal stunting yg ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu kurang dari 20%. Bila masalah ini berlanjut maka dapat berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia. Pembangunan Sumber Daya Manusia menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong. Pembangunan SDM erat kaitannya dengan asupan gizi setiap individu. Berbagai upaya dilaksanakan pemerintah untuk menekan angka prevalensi stunting dan berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar, kondisi gizi anak telah menunjukkan perbaikan.

Tabel 2.19
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun) di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Prevalensi Stunting Baduta (Bawah Dua Tahun)	27,8	26	20,2	28,6	28,6

Sumber : SSGI 2019, SSGI 2021, SSGI 2022 dan SKI 2023, 2024

Data yang di peroleh merupakan data dari SSGI (Survey Status Gizi Indonesia) Tahun 2024. Pada Tahun 2021 berdasarkan survery Kabupaten Rejang Lebong termasuk kedalam lima besar prevalensi Stunting di Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2022 prevalensi stunting menurun sebesar 5,8% menjadi 20,2%. Akan tetapi pada tahun 2023 angka prevalensi stunting meningkat menjadi sebesar

28,6% dan hingga tahun 2024 angka prevalensi tersebut masih sama. Angka ini menjadikan Kabupaten Rejang Lebong menjadi kabupaten dengan angka prevalensi stunting tertinggi dibanding dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa perlu upaya keras untuk perbaikan gizi yang harus terus didukung dengan komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah dan pusat serta berbagai pemangku kepentingan non pemerintah seperti dunia usaha, kelompok masyarakat, masyarakat sipil, perguruan tinggi mitra pembangunan, organisasi profesi dan masyarakat secara luas.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.1.2.3.1. Kebudayaan

Rejang Lebong merupakan Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk 288.830 Jiwa pada Tahun 2024. Dengan jumlah penduduk yang begitu banyak memunculkan sebuah *pluralisme* dalam beberapa aspek misalnya, keagamaan, budaya, suku, dan ras. *pluralisme* sendiri dapat di artikan sebagai keadaan masyarakat yang majemuk (bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya), kebudayaan yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat atau yang sering kita kenal sebagai keberagaman.

Dapat kita lihat dari adanya berbagai agama, seperti yang kita ketahui sekarang, Kabupaten Rejang Lebong mengakui 5 agama yang dianut oleh masyarakat, di antaranya adalah: Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan, Kristen Katolik. Dapat di lihat juga dari suku dan ras yang sangat beragam, keberagamaan suku dan ras ini diakibatkan karena terbagi menjadi beberapa Kecamatan yang disetiap kecamatannya memiliki ciri khas masing-masing. Dan yang paling mencolok adalah aspek budaya, Kabupaten Rejang Lebong memiliki banyak sekali macam budaya, baik itu berupa kebiasaan masyarakatnya ataupun keseniannya.

Budaya sendiri dapat berarti sebagai sebuah kebiasaan yang secara turun-temurun diwariskan. Budaya di Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat dari dua macam perspektif, yang pertama adalah, budaya merupakan kebiasaan. Budaya yang dimaksut dalam hal ini adalah, adat istiadat yang berlaku di masyarakat, contohnya adalah; 1) budaya bekulo, adalah dapat diartikan sebagai berunding, namun menggunakan bahasa sastra atau bahasa yang bermajas penuh sopan santun; 2) upacara pernikahan pada setiap daerah pasti berbeda, dan lain-lain. Budaya dalam perspektif kedua adalah budaya merupakan kesenian yang diwariskan. Seperti yang telah kita ketahui bersama Kabupaten Rejang Lebong terkenal dengan budayanya seperti, lagu-lagu daerah, tarian daerah, musik daerah, alat musik daerah, dan masih banyak lainnya.

2.1.2.3.2. Olahraga

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sangat memperhatikan kemajuan bidang olahraga yang dibuktikan dengan besarnya perhatian Pemerintah terhadap sarana dan prasarana penunjang keolahragaan dan memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga yang berprestasi dengan pemberian penghargaan dan *reward*.

Sarana dan prasarana penunjang yang telah disiapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong diantaranya sebagai berikut:

1) Stadion Olahraga Air Bang
2) Gedung Olah Raga Rejang Lebong
3) Kolam Renang Munatirta
4) Lapangan Tenis
5) Lapangan Volly
6) Lapangan Basket
7) Lapangan Sepak Takraw
8) Gedung Badminton

Prestasi yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong di bidang Kepemudaan dan Olahraga antara lain:

1) Penghargaan Kabupaten Layak Pemuda Tahun 2018
2) Juara 2 POPDA Tingkat Provinsi Bengkulu Tahun 2018
3) Juara 2 PORPROV Bengkulu Tahun 2018
4) Duta Pemuda Pencinta Lingkungan Asrih dan Bersih (Pepelengasih) Tingkat Nasional Tahun 2019
5) Perwakilan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Nasional untuk Putra Tahun 2019
6) Perwakilan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Provinsi sebanyak 3 orang putra dan 3 orang putri
7) Duta Jambore Pemuda Daerah (JPD) Tingkat Nasional sebanyak 1 orang putri Tahun 2019.
8) Perolehan Medali Emas dan Medali Perak untuk Pencak Silat Tradisional Kategori Perorangan Putra, Medali Perunggu untuk Aerodance Free Style dan Medali Perunggu untuk Senam Poco-poco anak-anak dalam Kegiatan Pornas Tahun 2023

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merupakan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka melayani masyarakat umum. Pelayanan tersebut terbagi menjadi urusan

wajib dan urusan pilihan. Aspek pelayanan umum juga menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Dalam aspek pelayanan umum, secara lebih detail akan dijabarkan dalam fokus layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan. Namun, pada dasarnya pelayanan umum merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

1) Kesehatan

Penyelenggaraan urusan kesehatan merupakan salah satu dari program prioritas Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kinerja sektor kesehatan adalah Angka Kematian Bayi. Secara umum, trend capaian angka kematian bayi sangat fluktuatif. Terjadi kenaikan angka kematian bayi yang cukup signifikan pada tahun 2023 yaitu 25 per seribu kelahiran hidup dibanding tahun 2022 yaitu 6,7 per seribu kelahiran hidup namun pada tahun 2024 menurun menjadi 5,65 per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi tentunya perlu untuk terus ditekan dan masih perlu adanya upaya untuk memastikan angka kematian bayi benar-benar mengalami perbaikan dengan mengupayakan sosialisasi dan pelayanan kesehatan bayi yang lebih ditingkatkan.

Tabel 2.20
Realisasi Indikator Urusan Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
AKB/1.000	Per 1000 Kelahiran Hidup	5,27	5,67	6,7	25	5,65
AKI/100.000	Per 100.00 Kelahiran Hidup	41,89	206,20	21,77	172,48	113,1
% Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita	%	0,1	0,89	5,1	5,3	28,6
% Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun)	%	27,8	26,0	20,2	28,6	28.6
% Desa yang mencapai UCI (Universal Child Imunisation)	%	83,97	92,0	86,0	87.18	87.18

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Persentase desa / kelurahan yang belum memiliki bidan desa	%	n/a	78	12	N/A	N/A

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025

Keterangan : N/A = Not Avalaible, data belum rilis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong.

Disamping Angka Kematian Bayi, indikator lain yang digunakan untuk mengukur kinerja sektor kesehatan adalah Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu mengalami kenaikan di tahun 2023 menjadi 172,48 per 100.000 kelahiran hidup, dibanding tahun 2021 yaitu hanya 21,77 per 100.000 kelahiran hidup.

Prevalensi kekurangan gizi pada balita tahun 2020 sebanyak 0,1 persen dan terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi 28,6 persen. Prevalensi *stunting* pada anak baduta pada tahun 2020 sebesar 27,8 persen menurun menjadi 26 pada tahun 2021 dan terus menurun menjadi 20,2 persen tahun 2022 namun meningkat kembali pada tahun 2023 hingga 2024 menjadi 28,6. Penanggulangan dan pencegahan *stunting* sangat penting karena berkaitan dengan kecerdasan dan berbagai penyakit terutama penyakit tidak menular. Desa yang mencapai *Universal Child Imunisation* pada tahun 2023-2024 meningkat menjadi 87,18 persen dari tahun 2022 sebesar 86 persen, sedangkan persentase desa/kelurahan yang belum memiliki bidan desa sebesar 12% pada tahun 2022.

2) Pendidikan

Penyelenggaraan urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang diprioritaskan dalam pembangunan daerah. Mewujudkan kualitas pendidikan yang merata dan berkeadilan adalah salah satu misi Kabupaten Rejang Lebong. Salah satu sasaran dalam bidang pendidikan adalah diantaranya Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Putus Sekolah. Pada tahun 2024, terjadi penurunan angka partisipasi murni untuk SD, namun terjadi peningkatan pada APM SMP dan SMA. Hal ini menunjukkan kinerja yang cukup positif dilihat dari realisasi capaian kinerja yang membaik untuk tingkat SMP dan SMA.

Tabel 2.21
Realisasi Indikator Urusan Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
(1)	*(2)*	*(4)*	*(3)*
Angka partisipasi Murni (APM) SD (%)	%	99,35	98,23
Angka Partisipasi Murni (APM)SMP (%)	%	72,51	74,26
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA (%)	%	66,59	68,56

Sumber : Kabupaten Rejang Lebong dalam Angka, BPS 2025

3) Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum merupakan salah satu kegiatan wajib Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang memiliki kontribusi sangat menentukan dalam pencapaian visi dan misi daerah.

Tabel 2.22
Realisasi Indikator Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik / sedang	%	63,61	47,38
Persentase rumah tangga berakses air bersih	%	85,53	45,46
Persentase rumah tangga bersanitasi layak	%	58,15	76,61
Persentase penanganan lingkungan permukiman kumuh	%	0,24	0,24

Sumber: LKJiP Dinas PUPRPKP Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024, 2025

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik/sedang menurun pada tahun 2024 menjadi 47,38 persen dari 63,61 persen pada tahun 2023. Persentase rumah tangga berakses air bersih juga menurun pada tahun 2024 menjadi 45,46 persen dari 85,53 persen pada tahun 2023. Untuk persentase rumah tangga bersanitasi layak mengalami kenaikan menjadi 76,61 persen pada tahun 2024 dari 58,15 persen pada tahun 2023. Persentase penanganan lingkungan permukiman kumuh pada tahun 2023 hingga 2024 masih pada angka yang sama yaitu 0,24 persen.

4) Lingkungan Hidup

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara parsial berdasarkan media yaitu udara, air dan lahan melalui Indeks

Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Lahan. Salah satu cara untuk mereduksi banyak indikator tersebut adalah dengan menggunakan indeks sehingga dapat dinilai apakah kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik atau tidak. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada periode tertentu. Secara umum capaian indikator urusan lingkungan hidup cukup menunjukkan kemajuan yang signifikan untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup maupun indeks kualitas air dan juga kualitas udara. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.23
Realisasi Indikator Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Angka	65.61	66.50	69.12	69,53	71,09
Indeks kualitas air	Angka	56,1	58,33	63,33	61,67	56,20
Indeks kualitas udara	Angka	86,12	86,56	88,41	89,58	93,00

Sumber: LPPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024, 2025

5) Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel, beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur capaian sasaran tersebut utamanya dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain adalah Kepemilikan KTP. Capaian indikator urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalami peningkatan di tahun 2024. Hal ini dapat dilihat dari persentase kepemilikan KTP sebesar 94,78 persen pada tahun 2023 meningkat menjadi 95,69 persen ditahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat upaya yang giat untuk menjangkau seluruh masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong agar memiliki identitas penduduk dan terdata oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yakni 203.783 penduduk yang memiliki KTP elektronik dari jumlah total sebanyak 212.965 penduduk berusia 17 tahun keatas.

Tabel 2.24
Realisasi Indikator Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
Persentase masyarakat memiliki e KTP	%	94,78	95,69

Sumber: LPPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024, 2025

6) Ketenagakerjaan

Sasaran dalam penyelengaraan urusan ketenagakerjaan adalah Menurunnya tingkat pengangguran. Sasaran tersebut dapat diukur dengan indikator diantaranya angka partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka.

Tabel 2.25
Realisasi Indikator Urusan Ketenagakerjaan
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
(1)	*(2)*	*(4)*	*(5)*
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	77,86	74,92
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,94	2,43

Sumber: Kabupaten Rejang Lebong dalam Angka, BPS 2025

Pada tahun 2024 terjadi penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 2,94 persen dari 77,86 persen pada tahun 2023 menjadi 74,92 pada tahun 2024. Begitu pula dengan tingkat pengangguran terbuka yang juga menurun dari 2,94 persen pada tahun 2023 menjadi 2,43 persen di tahun 2024.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1) Pertanian dan Peternakan

Urusan pertanian dan peternakan berperan penting terhadap perekonomian daerah. Pemerintah kabupaten Rejang Lebong terus berupaya untuk meningkatkan bidang pertanian melalui pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur pertanian dan Perkebunan dengan arah kebijakan pembangunan peningkatan dan rehabilitasi, pemeliharaan jalan usaha tani dan jalan sentra produksi, serta meningkatkan kapasitas dan kulitas jaringan irigasi.

Tabel 2.26
Realisasi Indikator Urusan Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
Persentase panjang jalan usaha tani dalam kondisi baik	%	75,3	75,3
Persentase jaringan irigasi wewenang kabupaten dalam kondisi baik	%	84,68	84,68
Persentase peningkatan produksi Tanaman Pangan dan holtikultara	%	-5	-11,38
Persentase peningkatan produksi daging ternak	%	-52	31,5

Sumber: LPPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

Dari tabel diatas terlihat persentase panjang jalan usaha tani dalam kondisi baik pada tahun 2023 masih sama hingga tahun 2024 sebesar 75,3 persen. Selain itu persentase jaringgan irigasi wewenang kabupaten dalam kondisi baik juga masih sama pada tahun 2023 hingga tahun 2024, yaitu sebesar 84,68 persen. Sedangkan indikator lainnya yaitu persentase peningkatan produksi tanaman pangan dan holtikultura mengalami penurunan dari -5 persen pada tahun 2023 menjadi -11,38 persen pada tahun 2024. Untuk Persentase peningkatan produksi daging ternak mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi sebesar 31,5 persen pada tahun 2024 dari sebelumnya sebesar -52 perseb tahun 2023. Penurunan produksi tanaman pangan dan holtikultura diperkirakan merupakan dampak dari fenomena cuaca El Nino yang terjadi. Keringnya lahan-lahan pertanian yang terjadi secara nasional ikut berimbas pada produktivitas.

2.1.4 Aspek daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya, baik yang berdekatan, domestik ataupun internasional. Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, iklim berinvestasi, sumber daya manusia, dan fasilitas wilayah atau infrastruktur.

Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang digunakan untuk mengetahui aspek daya saing daerah terdiri dari:

2.1.4.1. Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

Sebagai gambaran umum, panjang jalan menurut Tingkat kewenangan di Kabupaten Rejang Lebong (km) berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (1) Jalan Negara sepanjang 50.910 Km, (2) Jalan Provinsi sepanjang 125.700 Km dan (3) Jalan Kabupaten sepanjang 658.367 Km.

Panjang jalan di Kabupaten Rejang Lebong selama lima tahun terakhir masih tetap, dengan kondisi jalan yang baik cenderung berkurang, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.27
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan
di Kabupaten Rejang Lebong (km) Tahun 2020-2024

Kondisi Jalan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Baik (Km)	365,902	378,011	401,792	418,799	394,931
Sedang (Km)	92,084	75,950	54,495	40,697	20,580
Rusak (Km)	72,786	38,276	26,700	41,573	10,400
Rusak Berat (Km)	127,595	166,130	175,380	157,298	232,456
Jumlah/total	**658,367**	**658,367**	**658,367**	**658.367**	**658.367**

Sumber: Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka, BPS 2025

2.1.4.2. Iklim Berinvestasi

Iklim investasi merupakan kondisi yang bersifat multi dimensi dan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam melakukan investasi. Dalam kaitan tersebut peran pemerintah menjadi sangat penting dalam setiap proses penanaman modal, bahkan rekomendasi pemerintah daerah merupakan syarat mutlak dalam penilaian kegiatan investasi di daerah dinyatakan layak. Salah satu indikator yang berpengaruh adalah masalah keamanan suatu daerah, keamanan suatu daerah dapat dilihat dari angka laporan kejahatan yang terjadi setiap tahun. Faktor keamanan menjadi salah satu pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya, oleh karena itu penting bagi Kabupaten Rejang Lebong diharapkan memiliki berbagai strategi dalam menjaga kestabilan penurunan angka kriminalitas.

Cerminan iklim investasi yang baik dapat dilihat dari angka pendapatan daerah melalui pajak daerah dan penerimaan retribusi daerah, realisasi pajak dan retribusi daerah Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Tahun 2020 sebesar Rp. 13.759.280.231 dan terus meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp. 14.746.102.795, tahun 2022 menjadi Rp.16.909.677.686,25 dan tahun 2023 sebesar Rp.18.742.623.855,50 namun terjadi penurunan pada tahun 2024 menjadi Rp.17.364.389,57. Penerimaan retribusi daerah pada tahun 2020 sebesar 1,8 miliar rupiah, kemudian meningkat menjadi 2,3 miliar rupiah tahun 2021 dan menurun menjadi sebesar 1,6 miliar rupiah tahun 2022. Akan tetapi pada tahun 2023 berhasil meningkat menjadi sebesar 2,8 miliar rupiah namun kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 2,7 miliar.

Tabel 2.28
Iklim Berinvestasi Tahun 2020- 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana di Kabupaten Rejang Lebong	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
2.	Pajak Daerah	13.759.280.231	14.746.102.795	16.909.677.686,25	18.742.623.855,50	17.364.389,57
3.	Retribusi Daerah	1.861.124.924	2.373.989.650	1.681.368.280	2.802.534.550,00	2.717.800,85
4.	Jumlah Penerbitan Perizinan Baru dan Perpanjangan	1.528	1.033	1.033	1.033	1.033
5.	Macam Pajak Daerah	10	11	10	10	10
6.	Macam Retribusi Daerah	57	38	13	12	12
7.	Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha	1	1	1	1	1

Sumber : BPS, BPKD dan DPMPTSP Kabupaten Rejang Lebong. 2024

2.1.4.3 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah modal dan kekayaan yang penting dari setiap kegiatan manusia agar kemampuan yang dimiliki dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik. Sumber daya manusia menyangkut dimensi jumlah karakteristik (kualitas) dan persebaran penduduk. Pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan sebagai upaya untuk pengembangan aktivitas dalam bidang pendidikan dan latihan, kesehatan, gizi, penurunan fertilitas, peningkatan kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi. Peningkatan untuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia dapat meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator dari kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah salah satunya dapat dianalisis dengan melihat kualitas tenaga kerja.

Pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas sumber daya manusian (SDM) berhubungan dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri maupun luar negeri. Kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2, dan S3.

Tabel 2.29
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	**Jenis Kelamin**		
	Laki-laki	**Perempuan**	**Jumlah**
(1)	***(2)***	***(3)***	***(4)***
Tidak/Belum Pernah Sekolah	-	-	-
Tidak/Belum Tamat SD	-	-	-
Sekolah Dasar	20	23	43
Sekolah Menengah Pertama	7	5	12
Sekolah Menengah Atas Sederajat	698*	489*	1.187*
Diploma I / II / III / Akademi	42	72	114
Universitas	43	62	105
Jumlah/ Total	**810**	**651**	**1.461**
2023	71	45	116
2022	1.129	1.014	2.143
2021	116	99	215

Catatan: *Angka Sementara

Sumber: Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka BPS, 2025

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah pencari kerja cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2024 terdapat 1.461 orang pencari kerja dengan berbagai tingkatan pendidikan dari Sekolah Dasar sampai dengan Diploma dan Universitas. Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian dapat menyerap angkatan kerja.

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran, sedangkan penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Berikut jumlah penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja lebih lanjut dapat dilihat pada tabel

berikut.

Tabel 2.30
Jumlah Penduduk berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

Kegiatan utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
Angkatan Kerja	**96.711**	**69.348**	**166.069**
Bekerja	94.064	67.958	162.022
Pengangguran terbuka	2.647	1.390	4.037
Bukan Angkatan Kerja	**16.099**	**39.485**	**55.584**
Sekolah	7.452	10.519	17.971
Mengurus Rumah Tangga	5.346	27.055	32.401
Lainnya	3.301	1.911	5.212
Jumlah/ Total	**112.810**	**108.833**	**221.643**
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	85,72	63,71	74,92
Tingkat Penganguran Terbuka	2,74	2,00	2.43
Sumber: Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka, BPS 2025			

2.1.4.3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk sebagai akibat dari perluasan akses layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini menunjukkan tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. IPM tersusun dari 3 (tiga) jenis indeks utama yaitu Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan dan Indeks Paritas Daya Beli. Dari berbagai indikator makro ekonomi dan sosial yang kerap digunakan sebagai alat ukur dalam menentukan keberhasilan pembangunan di suatu daerah, implementasinya terkadang bisa menimbulkan penafsiran yang beragam. Hal ini bisa terjadi karena secara komprehensif keberhasilan pembangunan itu tidaklah cukup untuk bisa diukur dengan menggunakan berbagai indikator makro ekonomi dan sosial saja. Dengan demikian untuk menentukan keberhasilan pembangunan di suatu daerah haruslah menggunakan indikator yang secara resmi sudah digunakan oleh badan dunia, yaitu *The United Nations Development Programme* (UNDP). Program pembangunan yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan pengeluaran per kapita masyarakat merupakan program utama yang masuk ke dalam misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Disebutkan bahwa kesejahteraan masyarakat yang ditandai meningkatnya kualitas sumber daya manusia, terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha, terpenuhinya kebutuhan pokok minimal dan kebutuhan dasar lainnya secara layak, serta meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat harus bisa diwujudkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung secara komposit

berdasarkan tiga indeks yang terdiri dari indeks pendidikan, kesehatan dan pengeluaran per kapita.

Tabel 2.31
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Indeks Harapan Hidup (Tahun)	68,57	68,75	69,00	69,22	69.42
Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,83	13,93	14,01	14,19	14.47
Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,28	8,33	8,55	8,80	8.81
Pengeluaran Per Kapita (000 rupiah)	10.234	10.323	10.547	10.818	11.385
IPM Kabupaten Rejang Lebong	70,44	70,77	71,45	72,31	75.04
IPM Provinsi Bengkulu	71,4	71,64	72,16	72,78	74.91

Sumber: Kabupaten Rejang Lebong dalam Angka, BPS 2025

Berdasarkan Tabel diatas ditunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Rejang Lebong dari tahun 2019 hingga 2024 mengalami peningkatan. Dalam pengertian ini bahwa pembangunan manusia yang dilakukan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong secara berkelanjutan membuahkan hasil. Demikian pula dengan angka IPM Provinsi Bengkulu yang terus menunjukkan peningkatan, bila dibandingkan maka Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Rejang Lebong lebih rendah dibanding dengan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bengkulu, namun kedepannya IPM Kabupaten Rejang Lebong akan terus meningkat sesuai dengan trend.

Pengeluaran perkapita Kabupaten Rejang Lebong mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Dari tabel diatas dapat dilihat secara runtut bahwa di tahun 2019 Pengeluaran perkapita Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp. 10.162.000, trend ini terus membaik pada saat tahun 2024 pengeluaran perkapita Kabupaten Rejang Lebong mengalami peningkatan menjadi Rp. 10.385.000.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD merupakan bagian penting dari siklus perencanaan yang berfungsi untuk memberikan masukan balik (*feedback*) terhadap perencanaan program dan kegiatan pada tahun rencana sebagai kontrol terhadap pencapaian target RPJMD.

2.2.1. Hasil Analisis Gambaran Umum Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2020-2024

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kinerja program dan kegiatan untuk setiap aspek penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan analisis terhadap pencapaian target untuk masing-masing urusan. Analisis ini secara detil dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31
Hasil Analisis Gambaran Umum Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

Keterangan :

- n/a = data belum tersedia/ data belum rilis/data belum diproduksi diawal tahun kinerja
- Sumber data sekunder diambil dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan merupakan tolak ukur kinerja urusan pemerintahan daerah
- Standar data yang digunakan adalah angka capaian nasional/ angka yang memang menjadi standar data dari indikator yang disajikan. Apabila Indikator yang disajikan tidak tersedia standar datanya, maka digunakan pengukuran secara kualitatif terhadap pencapaian indikator tersebut
- Interpretasi data adalah kesimpulan atas pencapaian indikator mulai tahun 2020 -2024 terhadap standar data

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar Data	Interpretasi Data
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	**KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1.1	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**								
1.1.1	PDRB per kapita	Ribu Rupiah	33,886	36,200	39,080	41,647	45,238	62.200 (Indonesia 2021)	**Baik**
1.1.2	Indeks Gini	Indeks	0.29	n/a	0.30	0.30	0.28	Indeks Gini Nasional 0,381 (2022)	**Baik**
1.1.3	Angka Melek Huruf	Persen	98.31	98.18	97.84	99.12	98.48	96,35(Angka Melek Huruf Indonesia 2022)	**Baik**

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar Data	Interpretasi Data
			2020	2021	2022	2023	2024		
1.1.4	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.28	8.33	8.55	8.8	8.81	8,69(Rata -Rata lama Sekolah Indonesia 2022)	**Baik**
1.1.6	Pengeluaran perkapita	Ribu Rupiah	10,234	10,323	10,547	10,818	11,385	1,33 juta/bulan(2022) Indonesia	**Baik**
1.1.8	Prevalensi balita gizi kurang	Persen	0.97	0.60	5.1	5.3	28.6	Semakin menurun semakin baik	**Kurang**
1.1.9	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	77.93	77.93	74.46	77.86	74.92	Semakin menurun semakin baik	**Cukup**
1.1.10	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	97.16	70.06	91.96	97.10	97.50	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
1.1.11	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja	Persen	1.73	2.45	4.47	0.56	0.56	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
1.1.12	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Persen	74.15	74.22	72.76	75.57	75.57	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
1.1.13	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	Persen	17.12	24.33	15.82	25.36	25.36	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar Data	Interpretasi Data
			2020	2021	2022	2023	2024		
1.1.17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80.68	83.23	83.11	84.25	84.15	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
1.1.19	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	79.30	79.3	82.5	89.40	86.49	semakin meningkat semakin baik	**Baik**
1.1.20	Penguatan cadangan pangan	Persen	43	56	60	N/a	N/a	semakin meningkat semakin baik	
1.1.24	**Produksi sektor pertanian**								
1.1.24.1	Produksi Komoditas Makanan Utama (Padi)	Ton	57,146	59,810	62,415.77	57,942.35	52,612.00	semakin meningkat semakin baik	**Kurang**
1.1.24.2	Produksi Komoditas Palawija	Ton	18,321	31,631.40	22,307.50	32,386.62	28,286.00	semakin meningkat semakin baik	**Kurang**
1.1.24.3	Produksi Komoditas Hortikultura Sayuran	Ton	392,175.90	349,263.80	347,447.60	309,187.50	285,294.50	semakin meningkat semakin baik	**Kurang**
1.1.24.4	Produksi Komoditas Hortikultura Buah	Ton	31,634.30	38,458.70	35,706.70	N/a	N/a	semakin meningkat semakin baik	**Baik**
1.1.25	**Produksi Sektor Peternakan**								
1.1.25.1	Produksi Daging Ternak	Ton	1,731,354	2,544	2,515.13	2,310.54	2,259.09	semakin meningkat semakin baik	**Cukup**

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar Data	Interpretasi Data
			2020	2021	2022	2023	2024		
1.1.25.2	Produksi Telur	Ton/Tahun	1,664.40	967.2	879.4	709.63	713.66	semakin meningkat semakin baik	**Baik**
1.1.25.3	Produksi Susu	Liter	63.00	10,800	3,500	120.00	N/a	semakin meningkat semakin baik	**Baik**
1.1.26	**Produksi sektor perkebunan**								
1.1.26.1	Kopi Robusta	Ton	18,605	18,798	16,562	13,721	13,721	semakin meningkat semakin baik	**Cukup**
1.1.26.2	Kopi Arabica	Ton	206	213	210	139	139	semakin meningkat semakin baik	**Cukup**
1.1.26.3	Aren	Ton	4,642	5,442	5,443	5,813	5,813	semakin meningkat semakin baik	**Cukup**
1.1.31	**Kesejahteraan Rakyat**								
1.1.31.1	Persentase desa/kelurahan yang menjadi sasaran penerima pelatihan bina mental	Persen	100	19.23	19.23	N/a	N/a	semakin meningkat semakin baik	
2	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
2.1	**Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar**								
2.1.1	**Pendidikan**								
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)	Persen	22.00	27.10	41.28	37.00	49.85	Semakin meningkat semakin baik	Baik

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar Data	Interpretasi Data
			2020	2021	2022	2023	2024		
	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	Persen	109.78	109.66	110.02	109,14	109.11	Semakin meningkat semakin baik	**Cukup**
	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	Persen	84.04	84.50	84.91	78,53	95.98	Semakin meningkat semakin baik	Baik
	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	Persen	113.38	97.99	99.63	99,35	96.06	Semakin meningkat semakin baik	**Cukup**
	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	Persen	81.82	72.06	72.05	72,51	74.26	Semakin meningkat semakin baik	Baik
	Angka Putus sekolah SD/MI	Persen	0.56	0.74	0.54	0.51	0.56	semakin menurun semakin baik	**Kurang**
	Angka Putus sekolah SMP/MTs	Persen	2.20	1.00	2.81	2.19	2.20	semakin menurun semakin baik	**Kurang**
	Angka kelulusan SD/MI/ Paket A	Persen	92.46	103.63	100.43	100.00	100.00	Semakin meningkat semakin baik	Baik
	Angka kelulusan SMP/MTs/Paket B	Persen	97.67	107.22	104.84	100.00	100.00	Semakin meningkat semakin baik	Baik
2.1.2	**Kesehatan**								
	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 kelahiran hidup	5.27	5.67	6.70	25.00	5.65	Semakin menurun semakin baik	**Baik**

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar Data	Interpretasi Data
			2020	2021	2022	2023	2024		
	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 kelahiran hidup	41.89	206.20	21.77	172.48	113.10	Semakin menurun semakin baik	**Kurang**
	Angka Harapan Hidup	Tahun	68.57	68.75	69.00	69.22	69.42	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
	Prevalensi Balita Stunting	Persen	27.8	26.0	20.2	28.6	28.6	21,6(Stunting Indonesia 2022)	**Kurang**
	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	83.97	92.00	86.00	87.18	87.18	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
2.1.3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	persen	55.58	68.90	71.19	63.61	47.38	Semakin meningkat semakin baik	**Kurang**
	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	persen	39.01	9.39	58.57	58.15	76.61	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi layak	persen	41.36	50.75	58.57	58.15	76.61	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
	Persentase rumah tangga yang telah memiliki akses air minum layak	persen	81.27	23.05	86.65	85,53	45.46	Semakin meningkat semakin baik	**Kurang**

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar Data	Interpretasi Data
			2020	2021	2022	2023	2024		
2.1.4	**Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman**								
	Rasio rumah layak huni	Rasio (unit/ jiwa)	0.221	0.224	0.224	0.539	0.539	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
	Persentase Luas Kawasan Kumuh	persen	0.057	0.027	0.027	0.038	0.038	semakin turun semakin baik	**Baik**
	Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani	persen	56.13	79.54	80.08	19.45	19.45	Semakin meningkat semakin baik	**Kurang**
2.1.5	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**								
	Persentase Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Gangguan ketentraman dan ketertiban Umum	persen	100	100	90.5	90.5	90.5	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman, ketertiban dan keindahan(K3)	persen	92.86	99	99	99	99	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
	Indeks Risiko Bencana	Persen	100.71	92.58	100.51	119,28	112.35	138.81(Indonesia 20210	**Baik**

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar Data	Interpretasi Data
			2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	25.58	12.00	110	110	110	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
2.1.6	**Sosial**								
	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	2.46	3.69	5.53	32.58	32.58	Semakin rendah semakin baik	**Baik**
	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan bantuan perlindungan dan jaminan sosial	Persen	75.31	71.85	71.85	71.85	100.00	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
	Persentase layanan penanganan korban bencana selama tanggap darurat	persen	100	100	100	100	100	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
2.2	**Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar**								
2.2.1	**Tenaga Kerja**								
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3.70	3.70	2.28	2.94	2.43	5,86%(Agustus 2022) nasional	**Cukup**
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	77.93	77.93	74.46	77.86	74.92	67,26(TPAK indonesia 2018)	**Kurang**
2.2.2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91.89	93.72	93.83	93,83	91.93	91,06(IPG Indonesia 2020)	**Cukup**

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar Data	Interpretasi Data
			2020	2021	2022	2023	2024		
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	62.93	65.70	75.57	63,57	64.13	76,26 (IDG Indonesia 2021)	**Baik**
2.2.3	**Pangan**								
	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	70.64	67.54	66.68	72.67	73.11	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
	Skor Pola Pangan Harapan	Indeks	79.30	79.30	82.5	89.4	95.68	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
2.2.5	**Lingkungan Hidup**								
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65.61	66.50	69.12	69.53	71.09	70,42 IKLH Indonesia 2022	**Baik**
	Indeks Kualitas Air	Indeks	56.1	58.33	63.33	61,67	56.20	53,88 IKA Indonesia 2022	**Cukup**
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	86.12	86.56	88.41	89,58	93.00	87,23 IKU Indonesia 2021	**Baik**
	Indeks Pencemaran Udara	Indeks	0-51	0-51	0-51	0-51	0-51	Semakin meningkat semakin baik	**Cukup**

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar Data	Interpretasi Data
			2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase pelaku usaha yang melaksanakan prosedur pengolahan limbah industri dan domestik	persen	80	72.20	100	100	100	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
	Persentase pengelolaan persampahan	persen	43.80	42.53	47.88	72.66	52.35	Semakin meningkat semakin baik	**Kurang**
2.2.6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**								
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	76.81	83.20	84.30	84,30	87.00	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar Data	Interpretasi Data
			2020	2021	2022	2023	2024		
2.2.7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								
	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0.6212	0.6461	0.6740	0,6909	0.6909	0,566 (rata-rata nasional)	**Baik**
	Persentase BUMDesa yang berkembang atau maju	Persen	26.23	8.19	40.98	40,98	4.098	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
2.2.8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Rasio	0.47	0.40	0.95	1.18	1.16	1,17 (LPP Indonesia 2022)	**Baik**
	Total Fertility Rate (TFR)	Rasio	2.24	2.30	2.1	2.17	2.15	2,1 (standar TFR Nasional)	**Baik**
	Ratio Akseptor KB	Rasio	83.00	71.00			79.24	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	Persen	N/A	77.00	74.52	71.27	79.36	Semakin meningkat semakin baik	**Cukup**
2.2.9	**Perhubungan**								
	Rasio Elektrifitas	persen	87.81	87.81	87.81	87.81	87.81	Semakin meningkat semakin baik	**Cukup**
	Persentase penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten	persen	25.2	n/a	4.06	4.06	4.06	Semakin meningkat semakin baik	**Cukup**

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar Data	Interpretasi Data
			2020	2021	2022	2023	2024		
2.2.10	**Komunikasi dan Informatika**								
	Indeks SPBE	Indeks	1.62	1.84	2.80	3.23	3.24	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
	Indeks Kebijakan Internal SPBE	Indeks	0.94	2.30	4.20	4.90	3.60	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
	Indeks Tata Kelola SPBE	Indeks	0.57	1.20	2.00	2.70	3.00	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
	Indeks Manajemen SPBE	Indeks	n/a	1.00	1.82	1.82	2.09	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
	Indeks Layanan SPBE	Indeks	2.36	2.36	3.20	3.56	3.69	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
2.2.12	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**								
	Persentase koperasi aktif	Persen	46.70	47.07	36.89	36.00	48.99	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
	Persentase UMKM yang aktif	Persen	30	50.00	98.35	82.00	82.00	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
2.2.13	**Penanaman Modal**								
	Nilai investasi	Miliar rupiah	459.87	86.523	371,926	91,693	92,884	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar Data	Interpretasi Data
			2020	2021	2022	2023	2024		
	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persen	82.75	80.38	85.60		87.60	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
2.2.14	**Kepemudaan dan Olahraga**								
	Persentase Pemuda Kader Aktif	Persen	0.301	0.327	0.328	0.305	0.305	semakin meningkat semakin baik	**Cukup**
	Persentase Pemuda Pelopor	Persen	0.203	0.221	0.231	0.206	0.206	semakin meningkat semakin baik	**Baik**
	Persentase Pemuda Wirausaha	Persen	0.705	0.693	0.732	0.646	0.647	semakin meningkat semakin baik	**Baik**
	Cakupan pembinaan olahraga	persen	100	80	75	96	87	semakin meningkat semakin baik	**Kurang**
2.2.15	**Statistik**								
	Persentase OPD yang menggunakan dan mengelola data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	semakin meningkat semakin baik	**Baik**
2.2.16	**Persandian**								

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar Data	Interpretasi Data
			2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase OPD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	3.45	3.45	11.21	11.21	11.21	semakin meningkat semakin baik	**Baik**
2.2.17	**Kebudayaan**								
	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	n/a	100	17	-	35	semakin meningkat semakin baik	**Baik**
	Persentase Badan Musyawarah Adat aktif	persen	100	100	100	100	100	semakin meningkat semakin baik	**Baik**
2.2.18	**Perpustakaan**								
	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Per 1000 Penduduk	0.71	0.71	0.72	0.76	0.74	Semakin meningkat semakin baik	**Kurang**
	Persentase kunjungan perpustakaan	Persen	0.83	1.0	0.83	1.45	0.63	Semakin meningkat semakin baik	**Kurang**
2.2.19	**Kearsipan**								
	Indeks Kearsipan	Indeks	72.36	72.36	B (baik)			Semakin meningkat semakin baik	
	Persentase Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Arsip dengan kategori Baik	Persen	21.2	25.00	30.23	55.70	76.92	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar Data	Interpretasi Data
			2020	2021	2022	2023	2024		
2.3	**Fokus Layanan Urusan Pilihan**								
2.3.1	**Pariwisata**								
	Persentase peningkatan wisatawan nusantara	Persen	-63	46.38	2.47	2.47	2.47	Semakin meningkat semakin baik	**Cukup**
	Rata-rata Lama Tinggal	Hari	2.00	1.95	2.2	2.0	2.0	Semakin meningkat semakin baik	**Cukup**
	Tingkat hunian hotel	Persen	2.44	5.48	6.21	2.0	2.0	Semakin meningkat semakin baik	**Cukup**
2.3.2	**Pertanian**								
	Kontribusi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan terhadap PDRB (ADHB)	Persen	30.79	30.98	31.43	31.34	32.48	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
	Persentase Panjang Jalan Usaha Tani dalam Kondisi Baik	Persen	65	63.36	63.49	63.49	63.49	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
2.3.5	**Perdagangan**								
	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	-3,95	0.14	5.54	3.19	2.72	Semakin meningkat semakin baik	**Kurang**
	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB*	Persen	17.91	17.95	4.10	17.13	17.87	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar Data	Interpretasi Data
			2020	2021	2022	2023	2024		
2.3.6	**Perindustrian**								
	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (ADHK)	Persen	4.1	4.07	4.04	4.01	3.91	Semakin meningkat semakin baik	**Cukup**
2.3.7.1	**Transmigrasi**								
	Terbentuknya Kawasan Transmigrasi yang produktif dan berdaya saing	Kawasan	1	1	1	1	1	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
	Persentase kawasan transmigrasi yang dikembangkan	Persen	100	100	100	100	100	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
2.3.8	**Perikanan**								
	Persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya	Persen	7.62	0.02	0.05	0.05	0.05	Semakin meningkat semakin baik	**Cukup**
	Produksi perikanan (tangkap)	Ton	5,384.90	5,391	5,394	5,608	5,888	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
	Persentase pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan	Persen	n/a	24.13	37.5	37.5	37.5	Semakin meningkat semakin baik	**Cukup**
2.4	**PENUNJANG URUSAN**								
2.4.1	**Sekretariat Daerah**								

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar Data	Interpretasi Data
			2020	2021	2022	2023	2024		
	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) atas LPPD	Indeks	2.5895	2.5635	2.5635	2.8678	Belum Tersedia	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
	Nilai SAKIP Daerah	Indeks	CC	CC	B	B (61.02)	B (62.47)	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C	CC	CC (52,36)	BB (71.05)	B (64.18)	Semakin meningkat semakin baik	**Kurang**
2.4.2	**Perencanaan Pembangunan**								
	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	99.24	97.28	99.45	97.24	100.15	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	Persen	100.62	97.66	100	99.11	99.43	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	18.27	19.34	21.83	22.03	22.10	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	Nilai	12.83	14.07	14.55	14.82	15.66	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
2.4.2	**Keuangan**								
	Opini BPK terhadap pelaporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar Data	Interpretasi Data
			2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase penganggaran yang tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan dan menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan Kabupaten Rejang Lebong	Persen	7.18	6.98	7.39	6.26	5.82	Semakin meningkat semakin baik	**Kurang**
	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen	100	100	100	100	100	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
2.4.3	**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**								
	Indeks Profesionalitas ASN	indeks	45.16	73.59	63.22	76.25	58.87	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi	Persen	81.18	81.39	81.63	78.85	80.29	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
	Persentase dokter yang mendapat bantuan tugas belajar	Persen	11.63	16.29	13.46	12.72	18.60	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar Data	Interpretasi Data
			2020	2021	2022	2023	2024		
2.4.4	**Penelitian dan pengembangan**								
	Nilai Indeks Inovasi Daerah	Indeks	784 (inovatif)	44,07 (inovatif)	51,32(inovatif)	40,69 (Inovatif)	47.62	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
	Nilai Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	1.772 (sedang)	2,41033 (sedang)	2.94	3.19	3.63	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
2.4.5	**Pengawasan**								
	Persentase Kasus dan Temuan yang terselesaikan	Persen	53.04	77.63	85.45	80.00	80.00	semakin meningkat semakin baik	**Cukup**
	Nilai SAKIP Daerah Komponen Evaluasi	Nilai	4.64	4.88	13.70	13.95	14.26	semakin meningkat semakin baik	**Baik**
	Nilai Maturitas SPIP Kabupaten	Nilai	1,165	Level 1	2,684(level 2)	2.945 (Level 2)	3.003 (Level 3)	semakin meningkat semakin baik	**Baik**
2.4.6	**Sekretariat Dewan**								
	Persentase fasilitasi pembahasan rancangan perda	Persen	100	100	83.33	83.33	83.33	semakin meningkat semakin baik	**Cukup**
2.4.7	**Kesatuan Bangsa dan politik**								

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar Data	Interpretasi Data
			2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase peningkatan pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	semakin meningkat semakin baik	**Baik**
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	Persen	77	77	78.66	78.66	78.66	semakin meningkat semakin baik	**Baik**
	Persentase konflik ekonomi, sosial dan budaya yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	semakin meningkat semakin baik	**Baik**
3	**Aspek Daya Saing Daerah**								
3.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan	Rupiah	905,427	1,118,789.00	1,066,272.00		1,138,500.00	semakin meningkat semakin baik	**Baik**
3.2	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Persen	45.67	50.73	48.00	48.00	48.00	semakin meningkat semakin baik	**Baik**
3.3	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	Persen	11.48	n/a	n/a	n/a	n/a	Semakin meningkat semakin baik	**Baik**
3.5	Angka kriminalitas	Persen	10.78	15.98	11.90	13.95	10.00	Semakin menurun semakin baik	**Baik**

Sumber : Olahan data capaian kinerja RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024 per aspek kinerja daerah

2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2024

Realisasi program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

1

Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2025
Kabupaten Rejang Lebong

OPD : Kecamatan Curup
Triwulan : I (Satu)

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)		Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW I Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
						4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100 %			
1	2				3	Indikator	Satuan Indikator	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
					Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	**Nilai SAKIP Daerah**																	
					Sasaran : Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	**Nilai SAKIP OPD**																	
	7	**01**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Akuntabel dan Tepat Waktu**	**100**	**100**	**7.158.167.932**	**103**	**7.363.141.583**	**100**	**7.643.624.574**	**22**	**1.677.630.622**	**22**	**22**	**125**	**9.040.772.205**	**125**	**126**		
	7	01	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100	100	15.000.000	17	2.612.800	100	-	-	-	-	-	17	2.612.800	17	17	Kec. Curup	-
	7	01	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	100	100	6.994.225.932	104	7.269.365.559	100	7.622.958.134	22	1.675.737.401	22	22	126	8.945.102.960	126	128	Kec. Curup	-
	7	01	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	100	100	62.720.000	80	50.074.833	100	5.101.000	-	-	-	-	80	50.074.833	80	80	Kec. Curup	-
	7	01	01	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Baik	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Curup	-
	7	01	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam Keadaan Baik	100	100	24.398.000	54	13.276.891	100	8.592.240	22	1.893.221	22	22	76	15.170.112	76	62	Kec. Curup	-
	7	01	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	100	100	61.824.000	45	27.811.500	100	6.973.200	-	-	-	-	45	27.811.500	45	45	Kec. Curup	-
					Tujuan: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	**Indeks Kepuasan Masyarakat (Daerah)**																	
					Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan	**Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)**																	
	7	**01**	**02**		**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik**	**100**	**100**	**20.000.000**	**113**	**22.530.200**	**100**	**2.327.000**	-	-	-	-	**113**	**22.530.200**	**113**	**113**		
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Di Tingkat Kecamatan	Persentase Usulan Desa/ Kelurahan yang diteruskan ke Musrenbang Kabupaten	100	100	20.000.000	113	22.530.200	100	2.327.000	-	-	-	-	113	22.530.200	113	113	Kec. Curup	-
					Tujuan: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	**Pendapatan Perkapita**																	
					Sasaran: Meningkatnya Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan	**Persentase Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan**																	
	7	**01**	**03**		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**	**100**	**100**	**1.440.000.000**	**151**	**2.168.624.324**	**100**	**2.146.593.193**	-	-	-	-	**151**	**2.168.624.324**	**151**	**151**		
	7	01	03		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	27 Kegiatan	100	1.440.000.000	151	2.168.624.324	100	2.146.593.193	-	-	-	-	151	2.168.624.324	151	151	Kec. Curup	-
									Rata-rata capaian kinerja (%)	**94**	**9.554.296.107**	**100**	**9.792.544.767**	**17**	**1.677.630.622**	**17**	**17**	**111**	**11.231.926.729**	**129**	**130**		
									Predikat kinerja	**94**		**100**		**17**		**17**	**17**	**111**		**129**	**130**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja: Terlaksananya Kegiatan
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja: Ada Beberapa Kegiatan yang Belum Terlaksana dikarenakan Adanya Pergeseran
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Segera Melaksanakan Kegiatan
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:Segera Melaksanakan Kegiatan

Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2025
Kabupaten Rejang Lebong

OPD : Kecamatan Curup Tengah
Triwulan : 1 (Satu)

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)* / Kegiatan *(Output)*		Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW IV Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW IV Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
						Indikator	Satuan Indikator	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	**Nilai SAKIP Daerah**																	
					Sasaran : Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	**Nilai SAKIP OPD**																	
	7	**01**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Akuntabel dan Tepat Waktu**	**100**	**100**	**7.367.423.648**	**97,2**	**7.158.344.559**	**100**	**7.075.885.546**	**5,92**	**418.628.770**	**5,92**	**5,92**	**103,08**	**7.576.973.329,00**	**103,08**	**102,84**		
	7	01	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100	100	15.000.000	13,3	2.000.000	100	1.440.000	0,00	-	0,00	-	13,33	2.000.000,00	13,33	13,33	Kec. Curup Tengah	-
	7	01	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	100	100	7.233.481.648	97,6	7.059.641.811	100	6.994.451.706	5,93	414.876.270	5,93	5,93	103,53	7.474.518.081,00	103,53	103,33	Kec. Curup Tengah	-
	7	01	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	100	100	62.720.000	45,3	28.406.500	100	17.662.400	0,00	-	0,00	-	45	28.406.500,00	45,29	45,29	Kec. Curup Tengah	-
	7	01	01	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Baik	100	0	-	0,0	30.400.000	100	24.938.000	0,00	-	0,00	-	0,00	30.400.000,00	-	-	Kec. Curup Tengah	-
	7	01	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam Keadaan Baik	100	100	24.398.000	40,7	9.928.248	100	11.251.880	33,35	3.752.500	33,35	33,35	74,04	13.680.748,00	74,04	56,07	Kec. Curup Tengah	-
	7	01	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	100	100	31.824.000	87,9	27.968.000	100	26.141.560	0,00	-	0,00	-	88	27.968.000,00	87,88	87,88	Kec. Curup Tengah	-
					Tujuan: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	**Indeks Kepuasan Masyarakat (Daerah)**																	
					Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan	**Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)**																	
	7	**01**	**02**		**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik**	**100**	**100**	**20.000.000**	**260,4**	**52.086.600**	**100**	**12.540.000**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**260,43**	**52.086.600,00**	260,43	260,43		
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Di Tingkat Kecamatan	Persentase Usulan Desa/ Kelurahan yang diteruskan ke Musrenbang Kabupaten	100	100	20.000.000	260,4	52.086.600	100	12.540.000	0,00	-	-	-	260,43	52.086.600,00	260,43	260,43	Kec. Curup Tengah	-
					Tujuan: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	**Pendapatan Perkapita**																	
					Sasaran: Meningkatnya Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan	**Persentase Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan**																	
	7	**01**	**03**		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**	**100**	**100**	**1.440.000.000,00**	**136,7**	**2.286.000.000**	**100**	**2.250.000.000**	**1,25**	**28.231.089**	**1,25**	**1,25**	**137,99**	**2.314.231.089,00**	137,99	160,71		
	7	01	03	2.03	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	27 Kegiatan	100	1.440.000.000,00	136,7	1.969.057.043	100	2.250.000.000	1,25	28.231.089	1,25	1,25	137,99	1.997.288.132,00	137,99	138,70	Kec. Curup Tengah	-
									Rata-rata capaian kinerja (%)	**94,12**	**14.801.181.077**		**9.338.425.546**	**4,79**	**446.859.859**	**4,79**	**4,79**	**98,91**	**15.248.040.936,00**	**4,79**	**4,79**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja: Terlaksananya Kegiatan
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja: Ada Beberapa Kegiatan yang Belum Terlaksana
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Segera Melaksanakan Kegiatan
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:Segera Melaksanakan Kegiatan

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota

Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2025
Kabupaten Rejang Lebong

OPD : Kecamatan Curup Selatan
Triwulan : 1 (satu)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW I Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
		Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	B															
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	95	3.132.969.727	97	2.827.307.996	100	2.850.220.115	22	631.248.647	22	0,22	119	3.458.556.643	125	110		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	95	62.720.000	68	29.931.582	100	22.863.350	23	5.240.000	23	0,23	91	35.171.582	96	56		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0	62.720.000	0	-	100	10.423.000	0	0	0	0,00	0	-	0	0		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	95	24.398.000	77	8.950.441	100	11.680.280	0	0	0	0,00	77	8.950.441	81	37		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	95	31.824.000	98	22.115.633	100	26.123.200	19	5.014.000	19	0,19	117	27.129.633	123	85		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik yang baik	95	20.000.000	95	26.832.500	100	26.390.000	0	0	0	0,00	95	26.832.500	100	134		
		Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Di Tingkat Kecamatan	Persentase Usulan Desa/Kelurahan yang ditampung	95	20.000.000	95	26.832.500	100	26.390.000	0	0	0	0,00	95	26.832.500	100	134		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat usia produktif yang diberdayakan	95	600.000.000	66	116.336.704	100	496.000.000	0	0	0	0,00	66	116.336.704	69	19		
		Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana di Kecamatan Curup Selatan	95	600.000.000	66	116.336.704	100	496.000.000	0	0	0	0,00	66	116.336.704	69	19		
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%) :			97	3.031.474.856	100	3.443.699.945	18,63	641.502.647	16,57	16,57	116	3.672.977.503	16,57	16,57		
			Predikat Kinerja :			97		100		16,57		16,57	16,57	113,60		16,57	16,57		

Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja : Penyampaian laporan yang tepat waktu

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : sdm yang kurang memadai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : perlu adanya sdm yang dapat membantu kinerja di kecamatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : perlu adanya sdm yang dapat membantu kinerja di kecamatan

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama Provinsi/kabupaten/Kota

Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2025
Kantor Camat Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong

OPD : Curup Timur
Triwulan : 1 (Satu)

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW ITahun 2025(%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
					Urusan Kewilayahan																	
					Bid. Urusan Kecamatan Curup Timur																	
1	**7**	**01**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG AKUNTABEL DAN TEPAT WAKTU**	**100**	**3.572.558.047**	**75**	**4.157.611.541**	**100**	**4.329.221.846**	**75**	**962.990.417**	**75**	**22**	**150**	**5.120.601.958**	**150**	**143,33**	**Kantor Camat Curup Timur**	
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100	15.000.000	75	2.038.600	100	1.032.000	75	-	75	0	150	2.038.600	150	13,59		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	100	3.438.616.047	75	4.060.900.624	100	4.277.858.951	75	957.203.111	75	22	150	5.018.103.735	150	145,93		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100	62.720.000	75	54.856.614	100	11.201.000	75	999.000	75	9	150	55.855.614	150	89,06		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang baik	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	-		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam keadaan baik	100	24.398.000	75	11.580.433	100	13.967.695	75	2.182.176	75	16	150	13.762.609	150	56,41		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam keadaan baik	100	31.824.000	75	28.235.270	100	25.162.200	75	2.606.130	75	10	150	30.841.400	150	96,91		
2	**7**	**01**	**02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**JUMLAH LAPORAN KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT**	**100**	**20.000.000**	**100**	**41.494.600**	**100**	**23.024.600**	**75**	**-**	**75**	**0**	**175**	**41.494.600**	**175**	**207,47**	**Kantor Camat Curup Timur**	
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan di Tingkat Kecamatan	Persentase Usulan Desa/Kelurahan yang diteruskan ke Musrenbang Kabupaten	100	20.000.000	100	41.494.600	100	23.024.600	75	-	75	0	175	41.494.600	175	207,47		
3	**7**	**01**	**03**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**100**	**640.000.000**	**100**	**644.967.436**	**100**	**953.916.063**	**75**	**20.371.088**	**75**	**2**	**175**	**665.338.524**	**175**	**103,96**	**Kantor Lurah dalam Kecamatan Curup Timur**	
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100	640.000.000	100	644.967.436	100	953.916.063	75	20.371.088	75	2	175	665.338.524	175	103,96		
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%) :							75	327.787.168	75	8	166,67	1.942.478.361	108,33	151,59		
						Predikat Kinerja:							75	327.787.168	75	8	166,67	1.942.478.361	108,33	151,59		

Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja	: Adanya dukumen perencanaan dengan indikator yang terukur
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	: Adanya pergeseran anggaran sehingga berpengarush terhadap capaian kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	: Melakukan pengendalian internal secara tertib termasuk pengawalan terhadap capaian kinerja

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama Provinsi/kabupaten/Kota

Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2025
Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong

OPD : KECAMATAN CURUP UTARA
TRIWULAN : 1 (Satu)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*Output*)		Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW I Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
			Indikator	Satuan Indikator	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
		Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Kabupaten	B																
		Sasaran : Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B																
1	**7 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu**	**100%**	**100**	**15.437.907.363**	**1.185**	**4.365.506.017**	**100**	**2.592.633.637,22**	**20**	**537.963.013**	**20,00**	**20,75**	**1.205**	**4.903.469.030**	**1.205**	**32**		
	7 01 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	B	100	75.000.000	196	4.105.650	100	4.195.200		-	-	-	196	4.105.650	196	5		
	7 01 01 2.02	Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100%	100	14.565.522.243	198	2.091.613.264	100	2.480.299.437	21	524.827.709	21,00	21,16	219	2.616.440.973	219	18		
	7 01 01 2.06	Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	100	353.029.000	493	49.953.600	100	22.021.000	-	-	-	-	493	49.953.600	493	14		
	7 01 01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang milik daerah yang baik		100	50.000.000	-	-	100			-	-	-	-	-	-	-		
	7 01 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	100%	100	180.152.180	199	26.178.498	100	29.928.000	27	8.089.584	27,03	27,03	226	34.268.082	226	19		
	7 01 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100	214.203.940	99	21.803.993	100	56.190.000	9	5.045.720	8,98	8,98	108	26.849.713	108	13		
2	**7 01 02**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik yang baik**	**100%**	**100**	**117.272.350**	**194**	**63.935.000**	**100**	**30.799.000**	**6**	**2.000.000**	**6,49**	**6,49**	**200**	**65.935.000**	**200**	**56**		
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Persentase Usulan Desa/Kelurahan yang ditampung	100%	100	117.272.350	194	63.935.000	100	30.799.000	6	2.000.000	6,49	6,49	200	65.935.000	200	56		
3	**7 01 03**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat**	**100%**	**100**	**2.200.000.000**	**99**	**458.895.375**	**100**	**474.653.290**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99**	**458.895.375**	**99**	**21**		
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan		100	2.200.000.000	99	458.895.375	100	474.653.290	-	-	-	-	99	458.895.375	99	21		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%) :						**3.098.085.927,22**	**8,83**	**179.987.671,00**	**8,83**	**9,08**	**501**	**5.428.299.405**	**1.504**	**109**		
				Predikat Kinerja:																

Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja : Adanya dokumen perencanaan dengan indikator yang terukur
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : adanya pergeseran anggaran sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkalah
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan pengendalian internal secara tertib termasuk pengawasasn terhadap capaian kinerja

Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2025
Kabupaten Rejang Lebong

OPD : Kantor Camat Bermani Ulu
Triwulan : 1 (Satu)

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW 1 Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW 1 Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
					Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Daerah																
					Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD																
I			7	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG AKUNTABEL DAN TEPAT WAKTU**	**100**	**1.411.135.482**	**98**	**1.376.881.023**	**100**	**1.439.238.511,82**	**16,95**	**243.907.091,00**	**590,08**	**16,95**	**114,52**	**1.620.788.114**	**115**	**115**		
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100	15.000.000	79	11.848.200	100	2.580.000	-		-	-	78,99	11.848.200	79	**79**		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	100	1.275.071.882	100	1.277.985.191	100	1.353.170.181,82	17,87	241.751.091	559,74	17,87	118,09	1.519.736.282	118	**119**		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100	62.720.000	43	26.912.582,00	100	19.878.000	-		-	-	42,91	26.912.582	43	**43**		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam keadaan baik	0	24.398.000	54	13.101.550	100	10.121.770	21,30	2.156.000	469,47	21,30	75,00	15.257.550	-	**63**		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang baik	100	-	-	-	100	28.800.000	-		-	-	-	-	-	-		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam keadaan baik	100	33.945.600	139	47.033.500	100	24.688.560	-		-	-	138,56	47.033.500	139	**139**		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Daerah)											-	-		-	-		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)											-	-		-	-		
2			7	01	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**JUMLAH LAPORAN KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT**	**100**	**20.000.000**	**245**	**49.048.750**	**100**	**58.274.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**245,24**	**49.048.750**	**245**	**245**		
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100	20.000.000	245	49.048.750	100	58.274.000	-			-	245,24	49.048.750	245	**245**		
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%) :				1.425.929.773	200	1.497.512.511,82	17	243.907.091	590	17	360	1.669.836.864	180	180		
						Predikat Kinerja:				**1.425.929.773**	**200**	**1.497.512.511,82**	**17**	**243.907.091**	**590**	**17**	**360**	**1.669.836.864**	**180**	**180**		

Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja : Anggaran, Sarana prasarana Dan Aktivitas Kegiatan Yang Telah Direncanakan Sebelumnya
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Apikasi SIPD sering Gangguan dan Regulasi Pelaksanaan Kegiatan Tidak Seiring dengan waktu Pelaksanaan Kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Penambahan SDM Teknis dan Proses Penatausahaan Keuangan Perlu dilakukan Perbaikan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Koordinasi yang baik dengan Stakeholer dan Memerlukan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan dengan Regulasi Yang Telah diterbitkan

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama Provinsi/kabupaten/Kota

Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2025
Kabupaten Rejang Lebong

OPD : Kantor Camat Bermani Ulu Raya

Triwulan : 1 (satu)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW 1 Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangkat Daerah Penanggung	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
		Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Daerah																
		Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD																
I	7 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG AKUNTABEL DAN TEPAT WAKTU**	**100**	**1.411.135.482**	**100**	**1.391.420.056**	**100**	**1.553.919.268**	**16,83**	**261.568.191,00**	**16,83**	**16,83**	**117**	**1.652.988.247**	**117**	**117**		
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100	15.000.000	100	4.600.000	100	15.000.000	-	0	-	-	100	4.600.000	100	31		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	100	1.275.071.882	100	1.292.105.070	100	1.397.304.084	18,72	261.568.191	18,72	18,72	119	1.553.673.261	119	122		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100	62.720.000	100	61.983.182,00	100	63.253.000	-	0	-	-	100	61.983.182	100	99		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahdaerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang baik	100	24.398.000	100		100	30.000.000	-	0	-	-	100	-	100	-		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam keadaan baik	100	24.398.000	100	8.500.000	100	15.082.184	-	0	-	-	100	8.500.000	100	35		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang baik	100	-	0	-	100	0	-	0	-	-	-	-	-	-		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam keadaan baik	100	33.945.600	100	24.231.804	100	33.280.000	-	0	-	0	100	24.231.804	100	71		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Daerah)																	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)																	
2	7 01	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**JUMLAH LAPORAN KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT**	**100**	**20.000.000**	**100**	**31.379.250**	**100**	**20.000.000**	**-**	**0**	**-**	**-**	**100**	**31.379.250**	**100**	**157**		
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100	20.000.000	100	31.379.250	100	20.000.000	-	0	-		100	31.379.250	100	157		
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%) :				1.422.799.306	100	786.959.634	8	130.784.096	8	8	108	842.183.749	108	137		
			Predikat Kinerja:				**1.422.799.306**	100	786.959.634	8	130.784.096	8	8	108	842.183.749	108	137		

Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja : Anggaran, Sarana prasarana Dan Aktivitas Kegiatan Yang Telah Direncanakan Sebelumnya

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Apikasi SIPD sering Gangguan dan Regulasi Pelaksanaan Kegiatan Tidak Seiring dengan waktu Pelaksanaan Kinerja

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Penambahan SDM Teknis dan Proses Penatausahaan Keuangan Perlu dilakukan Perbaikan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Koordinasi yang baik dengan Stakeholer dan Memerlukan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan dengan Regulasi Yang Telah diterbitkan

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama Provinsi/kabupaten/Kota

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2025
Kabupaten Rejang Lebong

OPD : Kecamatan Selupu Rejang
Triwulan : 1 (Satu)

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)* / Kegiatan *(Output)*		Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s / d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s /d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s / d TW I Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100		12	13
						Indikator	Satuan Indikator	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	**Nilai Sakip Kabupaten**																	
					Sasaran : Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	**Nilai Sakip OPD**																	
	7	**01**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu**	**100**	**100**	**2.871.720.830**	**100**	**2.711.841.860**	**100**	**2.870.112.790**	**7**	**559.069.320**	**7**	**19**	**107**	**3.270.911.180**	**107**	**114**	**Kec. Selupu**	
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	12 dokumen	100	15.000.000	87	11.072.080	100	-	0	-	0	0	87	11.072.080	87	74	Kec. Selupu Rejang	
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	14 Bln	100	2.709.778.830	100	2.614.076.150	100	2.807.993.706	20	554.707.037	20	20	120	3.168.783.187	120	117	Kec. Selupu Rejang	
	7	01	01	2.06	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	12 Bln	100	62.720.000	81	49.804.472	100	16.822.800	0	-	0	0	81	49.804.472	81	79	Kec. Selupu Rejang	
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Baik	1 Unit	100	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	-	-	Kec. Selupu Rejang	
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	12 Bln	100	22.398.000	73	17.484.370	100	20.547.724	13	2.612.283	13	13	86	20.096.653	86	90	Kec. Selupu Rejang	
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urussan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	12 Bln	100	61.824.000	100	19.404.788	100	24.748.560	7	1.750.000	7	7	107	21.154.788	107	34	Kec. Selupu Rejang	
					Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan	**Indek Kepuasan Masyarakat (Daerah)**																	
					Sasaran : Meningkatnya pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang	**Indek Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)**																	
	7	**01**	**02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik yang baik**	**100**	**100**	**20.000.000**	**99**	**31.773.000**	**100**	**25.626.000**	**-**	**-**	**0**	**0**	**99**	**31.773.000**	**99**	**159**	**Kec. Selupu**	
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Di Tingkat Kecamatan	Persentase Usulan Desa/Kelurahan Yang Diteruskan Ke Musrenbang Kabupaten	1 kali	100	20.000.000	99	31.773.000	100	25.626.000	0	-	**0**	**0**	99	31.773.000	99	**159**	Kec. Selupu Rejang	
					Tujuan : Meningkatnya masyarakat yang berdaya saing dan inovatif	**Pendapatan Perkapita**																	
					Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan kelompok masyarakat	**Persentase masyarakat usia produktif yang diberdayakan**																	
	7	**01**	**03**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat usia produktif yang diberdayakan**	**100**	**100**	**480.000.000**	**97**	**637.516.815**	**100**	**738.197.750**	**4**	**25.998.179**	**4**	**4**	**101**	**744.185.343**	**101**	**155**	**Kec. Selupu**	
	7	01	03	2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase masyarakat usia produktif yang	6 kegiatan	100	480.000.000	97	718.187.164	100	738.197.750	4	25.998.179	4	4	101	744.185.343	101	155	Kec. Selupu	
Rata-rata capaian kinerja (%)									**3.371.720.830**	**98,67**	**1127043891,67**			**3,37**	**195.022.500**	**3**	**8**	**102**	**1.348.956.508**	**102**	**143**		

Predikat Kinerja:

Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :Terlaksananya Kegiatan

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Ada Beberapa Kegiatan yang Belum Terlaksana di karnakan ada nya pegeseran

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Segera Melaksanakan Kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Segera Melaksanakan Kegiatan

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2025
Kabupaten Rejang Lebong

OPD : KECAMATAN SINDANG KELINGI
TRIWULAN : 1 (Satu)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)* / Kegiatan *(Output)*		Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s /d TW 1 Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s / d TW 1 Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5				7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
			Indikator	Satuan Indikator	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	**Nilai SAKIP Daerah**	**B**																
		Sasaran : Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Akuntabel dan Tepat Waktu**																	
			Nilai Evaluasi SAKIP OPD	**B**																
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	**Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu**		**100**	**2.063.536.237**	**100**	**4.014.799.882**	**100**	**2.210.357.606**	**27,50**	607.740.374	**27,50**	**27,50**	**127,50**	**6.009.479.857**	**127,50**	**291,22**		
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai Evaluasi SAKIP**		100	**15.000.000**	**100**	**14.252.300**	100	10.000.000	0,00	-	-	-	**100,00**	**23.252.100**	100,00	155,01		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu**		100	**1.900.472.637**	**100**	**3.796.799.347**	100	2.131.665.606	28,09	598.740.374	28,09	28,09	**128,09**	**5.654.270.289**	128,09	297,52		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu**		100	**69.720.000**	**100**	**84.773.217**	100	18.944.600	0,00	-	-	-	**100,00**	**132.528.932**	100,00	190,09		
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang milik daerah yang baik**		100	**20.000.000**	**100**	**-**	100	-	-	-	-		**0,00**	**-**	-	-		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik**		100	**24.398.000**	**100**	**18.360.000**	100	14.471.200	27,64	4.000.000	27,64	27,64	**127,64**	**27.700.000**	127,64	113,53		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik**		100	**33.945.600**	**100**	**100.615.018**	100	35.276.200	14,17	5.000.000	14,17	14,17	**114,17**	**171.728.536**	114,17	505,89		
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik yang baik**		**100**	**20.000.000**	**100**	**61.925.500**	**100**	**25.134.000**	**19,89**	**5.000.000**	**19,89**	**19,89**	**119,89**	**93.303.500**	**119,89**	**466,52**		
		Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Di Tingkat Kecamatan	**Persentase Usulan Desa/Kelurahan Yang Diteruskan Ke Musrenbang Kabupaten**		100	**20.000.000**	**100**	**61.925.500**	100	25.134.000	19,89	**5.000.000**	19,89	19,89	**119,89**	**93.303.500**	119,89	466,52		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Persentase masyarakat usia produktif yang diberdayakan**		**100**	**160.000.000**	**95,7**	**355.151.400**	**100**	**254.730.000**	**0,00**	**0**	**-**	**-**	**95,70**	**599.976.700**	**95,70**	**374,99**		
		Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	**Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan**		100	**160.000.000**	**95,7**	**355.151.400**	100	254.730.000	0,00	**0**	-	-	**95,70**	**599.976.700**	95,70	374,99		
						Rata-rata capaian kinerja (%) :	**99**	**4.431.876.782**	**300**	**2.490.221.606**	**47**	**612.740.374**	**16**	**25**	**145,96**	**6.702.760.057**				
						Predikat Kinerja :	**99**	**8.583.827.529**	300	2.490.221.606	47	612.740.374	16	25	**145,96**	**10.854.710.804**				

Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja : Terlaksananya Kegiatan tepat waktu
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Koordinasi yang kurang baik
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Menyusun rencana penyerapan tepat waktu
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Mengontrol penyerapan tepat waktu
*) Sesuaikan atau diisi dengan nama Provinsi/kabupaten/Kota

Sindang Kelingi, Mei 2024
CAMAT SINDANG KELINGI
KABUPATEN REJANG LEBONG

ELIYENTI, SH
NIP. 19840602 200212 2 003

Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2025
Kabupaten Rejang Lebong

OPD : Kecamatan Padang Ulak Tanding
Triwulan : 1 (satu)

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)* / Kegiatan *(Output)*		Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW I Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
						Indikator	Satuan Indikator	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	**Nilai SAKIP Daerah**																	
					Sasaran : Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	**Nilai SAKIP OPD**																	
	7	**01**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Akuntabel dan Tepat Waktu**	**100**	**100**	**2.590.540.376**	**255**	**6.596.684.762**	**100**	**7.290.929.336**	**20,6**	**1.500.678.447,00**	**20,6**	**20,6**	**275,23**	**8.097.363.209**	**275,23**	**312,57**		
	7	01	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100	100	4.141.200	-	-	100	12.926.050	0,0	-	0,0	0,0	0,00	-	-	-	Kec. PUT	-
	7	01	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	100	100	2.248.781.366	289	6.507.692.885	100	7.233.481.648	20,5	1.483.134.123,00	20,5	20,5	309,89	7.990.827.008	309,89	355,34	Kec. PUT	-
	7	01	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	100	100	28.582.360	177	50.521.479	100	1.800.000	712,5	12.825.000,00	712,5	712,5	889,26	1.800.000	889,26	6,30	Kec. Put	-
	7	01	01	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Baik	0	0	-	-	-							0,00	45.555.000	-	-		-
	7	01	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam Keadaan Baik	100	100	25.251.400	35	8.762.398	100	12.121.638	38,9	4.719.324,00	38,9	38,9	73,63	15.414.000	73,63	61,04	Kec. PUT	-
	7	01	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	100	100	35.952.560	83	29.708.000	100	30.600.000	0,0	-	0,0	0,0	82,63	35.960.000	82,63		Kec. PUT	-
					Tujuan: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	**Indeks Kepuasan Masyarakat (Daerah)**																	
					Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan	**Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)**																	
	7	**01**	**02**		**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik**	**100**	**100**	**87.378.000**	**72**	**62.564.700**	**100**	**20.000.000**	**46,0**	**9.200.000,00**	**46,0**	**46,0**	**117,60**	**75.935.600**	**117,60**	**86,90**		
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Di Tingkat Kecamatan	Persentase Usulan Desa/ Kelurahan yang diteruskan ke Musrenbang Kabupaten	100	100	87.378.000	72	62.564.700	100	20.000.000	46,0	9.200.000,00	46,0	46,0	117,60	71.764.700	117,60	82,13	Kec. PUT	-
					Tujuan: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	**Pendapatan Perkapita**																	
					Sasaran: Meningkatnya Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan	**Persentase Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan**																	
	7	**01**	**03**		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**	**100**	**100**	**259.989.988**	**576**	**1.496.975.155**	**100**	**2.286.000.000**	**0,0**	**-**	**0,0**	**0,0**	**575,78**	**1.496.975.155**	**575,78**	**575,78**		
	7	01	03	2.03	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	27 Kegiatan	100	259.989.000	**576**	1.496.975.155	100	2.286.000.000	0,0	-	0,0	0,0	575,78	1.496.975.155	575,78	575,78	Kec. PUT	-
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**94,12**	############		**9.596.929.336**	**16,65**	**377.469.612**	**16,65**	**16,65**	**242,15**	**2.417.568.491**	**242,15**	**243,82**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja: Terlaksananya Kegiatan
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja: Ada Beberapa Kegiatan yang Belum Terlaksana
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Segera Melaksanakan Kegiatan
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:Segera Melaksanakan Kegiatan

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota

Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2025
Kabupaten Rejang Lebong

OPD : Kantor Camat Sindang Dataran
Triwulan : 1 (satu)

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW 1 Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW 1 Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
					Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Daerah																
					Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD																
I			**7**	**01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG AKUNTABEL DAN TEPAT WAKTU**	**100**	**7.222.347.118**	**100**	**1.134.375.721**	**100**	**1.217.668.761**	**6**	**294.697.856**	**6**	**24**	**106**	**1.429.073.577**	**106**	**20**		
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100	86.764.000	100	2.630.000	100	5.000.000	-		-	-	100	2.630.000	100	3		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	100	6.499.516.324	100	1.073.904.980	100	1.152.978.745,41	25,18	290.347.856	25	25	125	1.364.252.836	125	21		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100	347.767.700	100	21.351.800,00	100	17.953.000	-		-	-	100	21.351.800	100	6		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahdaerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang baik	100	50.000.000	0		0	10.000.000	-		-	-	-		-	-		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam keadaan baik	100	57.436.994	100	8.469.719	100	6.451.016	-		-	-	100	8.469.719	100	15		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam keadaan baik	100	230.862.100	100	28.019.222	100	35.286.000	12,33	4.350.000	12	12	112	32.369.222	112	14		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Daerah)																	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)																	
2			**7**	**01**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**JUMLAH LAPORAN KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT**	**100**	**138.454.000**	**100**	**33.308.000**	**100**	**30.994.000**	**39,78**	**12.330.000**	**40**	**40**	**140**	**45.638.000**	**140**	**33**		
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100	138.454.000	100	33.308.000	100	30.994.000	39,78	12.330.000	40	40	140	45.638.000	140	33		
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%) :				1.167.683.721	100	1.248.662.761,41	23	307.027.856	23	32	123	1.474.711.577	123	11		
						Predikat Kinerja:				**1.167.683.721**	**100**	**1.248.662.761**	**23**	**307.027.856**	**23**	**32**	**123**	**1.474.711.577**	**123**	**26**		

Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja : Anggaran, Sarana prasarana Dan Aktivitas Kegiatan Yang Telah Direncanakan Sebelumnya

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Apikasi SIPD sering Gangguan dan Regulasi Pelaksanaan Kegiatan Tidak Seiring dengan waktu Pelaksanaan Kinerja

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Penambahan SDM Teknis dan Proses Penatausahaan Keuangan Perlu dilakukan Perbaikan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Koordinasi yang baik dengan Stakeholer dan Memerlukan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan dengan Regulasi Yang Telah diterbitkan

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama Provinsi/kabupaten/Kota

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2025
Kabupaten Rejang Lebong

OPD : Kecamatan Kota Padang

Triwulan : 1 (satu)

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)* / Kegiatan *(Output)*		Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s / d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d TW I tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s /d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6+8		11 = 10/5 x		12	13
						Indikator	Satuan Indikator	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	**Nilai Sakip Kabupaten**																	
					Sasaran : Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	**Nilai Sakip OPD**	**B**																
	7	**01**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu**	**100**	**100**	**2.226.355.751**	**100**	**2.632.328.710**	**100**	**2.741.067.819,68**	**19**	**522.962.280**	**19**	**19**	**119**	**3.155.290.990**	**119**	**142**	**Kec. Kotapadan**	
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	12 dokumen	100	15.000.000	11	1.234.800	100	665.000	0		0	0	11	1.234.800	11	8	Kec. Kotapadang	
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	14 Bln	100	2.057.988.151	99	2.560.030.278	100	2.687.300.173,68	19	522.962.280	19	19	118	3.082.992.558	118	150	Kec. Kotapadang	
	7	01	01	2.06	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	12 Bln	100	69.720.000	90	31.165.980	100	18.818.350	0	-	0	0	90	31.165.980	90	45	Kec. Kotapadang	
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Baik	1 Unit	100	20.000.000	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	Kec. Kotapadang	
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	12 Bln	100	24.398.000	91	9.963.366	100	9.535.736	0	-	0	0	91	9.963.366	91	41	Kec. Kotapadang	
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urussan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	12 Bln	100	39.249.600	100	29.934.286	100	24.748.560	0	-	0	0	100	29.934.286	100	76	Kec. Kotapadang	
					Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	**Indek Kepuasan Masyarakat (Daerah)**																	
					Sasaran : Meningkatnya pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang	**Indek Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)**	85																
	7	**01**	**02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik yang baik**	**100**	**100**	**20.000.000**	**88**	**30.570.000**	**100**	**22.680.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**88**	**30.570.000**	**88**	**153**	**Kec. Kotapadan**	
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Di Tingkat Kecamatan	Persentase Usulan Desa/Kelurahan Yang Diteruskan Ke Musrenbang Kabupaten	1 kali	100	20.000.000	88	30.570.000	100	22.680.000	0	-	0	0	88	30.570.000	88	153	Kec. Kotapadang	
					Tujuan : Meningkatnya masyarakat yang berdaya saing dan inovatif	**Pendapatan Perkapita**																	
					Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan kelompok masyarakat	**Persentase masyarakat usia produktif yang diberdayakan**																	
	7	**01**	**03**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat usia produktif yang diberdayakan**	**100**	**100**	**480.000.000**	**92**	**737.550.446**	**100**	**752.208.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**92**	**737.550.446**	**92**	**154**	**Kec. Kotapadan**	
	7	01	03	2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase masyarakat usia produktif yang diberdayakan	9 kegiatan	100	480.000.000	92	737.550.446	100	752.208.000	0	-	0	0	92	737.550.446	92	154	Kec. Kotapadang	
					Rata-rata capaian kinerja (%)				**2.726.355.751**		**3.400.449.156**		**3.515.955.820**		**522.962.280**	**6**	**6**	**100**	**3.923.411.436**	**100**	**149**		
					Predikat Kinerja:																		

Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :Terlaksananya Kegiatan

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Ada Beberapa Kegiatan yang Belum Terlaksana di karnakan ada nya pegeseran

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Segera Melaksanakan Kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Segera Melaksanakan Kegiatan

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama Provinsi/kabupaten/Kota

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2025

OPD : KECAMATAN SINDANG BELITI ILIR
TRIWULAN : 1 (satu)

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)* / Kegiatan *(Output)*		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s / d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di Evaluasi 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s / d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sd TW 1 Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s / d TW 1 Tahun 2025 (%)		Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2					3	4		5				7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							Indikator	Satuan Indikator	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1						Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Kabupaten	Indek																
						Sasaran : Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indek	B		B		B						B					
I	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	%	100	8.935.827.796	199	4.732.044.281	100	1.166.449.030	0	370.275.718	0	31,74	199	5.102.319.999	199	57,10	Kec. SBI	
1	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi perangkat daerah yang disusun	%	100	87.451.000	132	20.454.580	100	5.000.000	60%	3.000.000	1	0,60	133	23.454.580	133	26,82	Kec. SBI	
2	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	%	100	8.128.487.102	200	4.524.980.067	100	1.088.010.446	32%	346.305.550	0	31,83	200	4.871.285.617	200	59,93	Kec. SBI	
3	7	01	01	2.06		Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	%	100	339.948.500	198	70.725.050	100	25.540.000	40%	10.260.000	0	40,17	198	80.985.050	198	23,82	Kec. SBI	
4	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang milik daerah yang baik	%	100	72.830.000	167	6.634.000	100	-	0%	-	0	-	167	6.634.000	167	9,11	Kec. SBI	
5	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	%	100	75.273.584	195	28.894.970	100	9.493.084	48%	4.597.668	0	48,43	195	33.492.638	195	44,49	Kec. SBI	
6	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urussan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah dalam keadaan baik	%	100	231.837.610	200	80.355.614	100	38.405.500	16%	6.112.500	0	15,92	200	86.468.114	200	37,30	Kec. SBI	
II	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik yang baik	%	100	135.000.000	200	43.680.625	100	13.113.000	21%	2.760.000	0	21,05	200	46.440.625	200	34,40	Kec. SBI	
1	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Di Tingkat Kecamatan	Persentase Usulan Desa/Kelurahan Yang Diteruskan Ke Musrenbang Kabupaten	%	100	135.000.000	200	43.680.625	100	13.113.000	21%	2.760.000	0	21,05	200	46.440.625	200	34,40	Kec. SBI	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										9.070.827.796	200	4.775.724.906	100	1.179.562.030	0	373.035.718	0	26	200	5.148.760.624	200	46		
Predikat Kinerja										9.070.827.796	200	4.775.724.906	100	1.179.562.030	93	373.035.718	193	23	11	5.148.760.624	193	23		

Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2025
KECAMATAN SINDANG BELITI ULU

OPD : KECAMATAN SINDANG BELITI ULU

Triwulan : I (satu)

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW I Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
1	**7**	**01**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu**	**100**	**1.598.827.319**	**99,4**	**1.523.951.718**	**100**	**1.373.213.829**	**15,6**	**213.760.578**	**15,6**	**15,6**	**115,0**	**1.737.712.296,0**	**115,0**	**108,7**		
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100	15.000.000	83,5	1.944.000	100	3.000.000	35,0	1.050.000	35,0	35,0	118,5	2.994.000,0	118,5	20,0		
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100	1.429.581.319	92,9	1.440.575.682	100	1.307.083.013	15,1	197.632.578	15,1	15,1	108,0	1.638.208.260,0	108,0	114,6		
	7	01	01	2.06	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100	62.720.000	93,6	39.965.040	100	20.687.550	40,1	8.288.000	40,1	40,1	133,7	48.253.040,0	133,7	76,9		
	7	01	**01**	**2.07**	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Baik	100	30.000.000	0	-	0	-										
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	100	24.398.000	95,9	7.767.000	100	8.335.270	5,5	460.000	5,5	5,5	101,4	8.227.000,0	101,4	33,7		
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urussan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	100	37.128.000	84,8	33.699.996	100	34.107.996	18,6	6.330.000	18,6	18,6	103,4	40.029.996,0	103,4	107,8		
						Indek Kepuasan Masyarakat (Daerah)	87,21															
						Indek Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	85															
2	**7**	**01**	**02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik yang baik**	**100**	**20.000.000**	**100**	**35.340.000**	**100**	**28.376.570**	**43,7**	**12.400.000**	**43,7**	**43,7**	**143,7**	**47.740.000,0**	**143,7**	**238,7**		
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Di Tingkat Kecamatan	Persentase Usulan Desa/Kelurahan Yang Diteruskan Ke Musrenbang Kabupaten	100	20.000.000	98,6	35.340.000	100	28.376.570	43,7	12.400.000	43,7	43,7	142,3	47.740.000,0	142,3	238,7		
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%) :	**99,4**	**1.559.291.718**	**100**	**1.401.590.398**	**29,6**	**226.160.578**	**29,6**	**29,6**	**129,3**	**1.785.452.296,0**	**129,3**	**173,7**		
								Predikat Kinerja:														

Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja : Komitmen Sekretariat Untuk Melaksanakan Kegiatan Tepat Waktu

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Kurang nya Sumber Daya Manusia,Sarana dan Prasarana

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama Provinsi/kabupaten/Kota

Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2025
Kecamatan Binduriang

OPD : Kecamatan Binduriang
TRIWUL : 1 (satu)

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)* / Kegiatan *(Output)*		Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s / d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s /d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s / d TW I Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
						Indikator	Satuan Indikator	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	**Nilai Sakip Kabupaten**																	
					Sasaran : Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	**Nilai Sakip OPD**																	
	7	**01**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu**	**100**	**100**	**6.919.006.607**	**100**	**3.538.827.268**	**100**	**1.294.842.693**	**19**	**238.575.696**	**19**	**19**	**119**	**3.777.402.964**	**119**	**177**	**Kec. Binduriang**	
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		100	84.055.000	100	12.620.000	100	3.643.600	0	-	0	0	100	12.620.000	100	15	Kec. Binduriang	
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu		100	6.146.013.086	100	3.285.712.289	100	1.237.374.993	19	238.575.696	19	19	119	3.524.287.985	119	57	Kec. Binduriang	
	7	01	01	2.06	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu		100	333.332.050	100	132.021.777	100	13.004.000	0	-	0	0	100	132.021.777	100	40	Kec. Binduriang	
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Baik		100	65.190.000	100	5.670.000	100	-		-	-	-	-	5.670.000	-	-	Kec. Binduriang	
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik		100	55.621.121	100	15.345.600	100	11.533.600	0	-	0	0	100	15.345.600	100	28	Kec. Binduriang	
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik		100	234.795.350	100	87.457.602	100	29.286.500	0	-	0	0	100	87.457.602	100	37	Kec. Binduriang	
					Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	**Indek Kepuasan Masyarakat (Daerah)**																	
					Sasaran : Meningkatnya pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan	**Indek Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)**																	
	7	**01**	**02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik yang baik**	**100**	**100**	**116.420.000**	**100**	**51.624.750**	**100**	**38.544.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**51.624.750**	**100**	**44**	**Kec. Binduriang**	
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Di Tingkat Kecamatan	Persentase Usulan Desa/Kelurahan Yang Diteruskan Ke Musrenbang Kabupaten		100	116.420.000	100	51.624.750	100	38.544.000	0	-	0	0	100	51.624.750	100	44	Kec. Binduriang	
							Rata-rata capaian kinerja (%)				**3.590.452.018**		**1.333.386.693**		**238.575.696**			**109,6**	**3.829.027.714,00**	**109,6**	**110,6**		

Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja	: Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur.
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	: Realisasi kinerja keuangan pada pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan belum sesuai dengan rencana Anggaran Kas
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: OPD dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan agar mengacu pada Anggaran Kas dan ROPK yang telah disusun.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	: Pengadaan barang/jasa agar dilakukan sejak awal untuk menghindari keterlambatan pekerjaan

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2025
Kabupaten Rejang Lebong

OPD : BAGIAN PEMERINTAHAN
TRIWULAN : 1 (satu)

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)* / Kegiatan *(output)*		Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai Dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW.I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW.I Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4		5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							Indikator	Satuan Indikator	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		B																
1						**Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**	Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui reformasi birokrasi		100%	440.422.242	100	736.797.623	100	176.233.000	0	7.550.000	0%	4%	1	744.347.623	1	169%		
	4	01	02	2.01		***Administrasi Tata Pemerintahan***	*Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas LKPJ*		3,000	332.322.242	3,000	615.837.623	3,000	162.153.100	0,16	26.166.800	5,38%	16%	3	642.004.423	193,19%	193%		
1	4	01	02	2.01	01	**Penataan Administrasi Pemerintahan**	Jumlah Dokumen Penyelesaian Konfilik Pertanahan	Berkas	6	202.100.000	6	493.234.767	6	162.153.100	0,16	26.166.800	2,69%	16%	6	519.401.567	0,00%	257%		
2	4	01	02	2.01	02	**Pengelolaan Administrasi Kewilayahan**	Jumlah Kecamatan (Desa/Kelurahan) yang telah dibina dalam Administrasi Pemerintahan	Kelurahan	34	130.222.242	34	122.602.856	34	-	0,00	-	0,00%	0%	34	122.602.856	94,15%	94%		
3	4	01	02	2.01	03	**Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah**	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah	Buku	110	108.100.000	110	120.960.000	110	14.079.900	0,00	-	15,65%	0%	110	120.960.000	111,90%	112%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										440.422.242	150	736.797.623	150	176.233.000		26.166.800	0%	15%	100%	762.964.423	100%	173%		
Predikat Kerja																								

Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja : Adanya Target Dan Sasaran yang Jelas dan Teratur

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi Dengan Tim Kerja dan Stakebholders

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : Tim Kerja Dan Stakebholders Agar Lebih Tanggap dan Cepat dalam Komunikasi dan Koordinasi serta dalam hal Penyampaian Data,

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : Peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan dan Lebih Aktif Dalam Proses Pengajuan Keuangan

Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2025
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KAB. REJANG LEBONG

OPD : BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA
Triwulan : 1 (satu)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Sudah Evaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW I Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
		Tujuan I : Meningkatnya masyarakat yang berdaya saing dan inovatif																	
		Sasaran I : Meningkatnya kapasitas desa/kelurahan yang mengikuti pembinaan mental																	
		Program I : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	**Persentase Desa/Kelurahan yang menjadi sasaran penerima pelatihan bimbingan mental dan spritual**	**100%**	**450.000.000**	**100,0%**	**240.280.900**	**100,0%**	**362.369.500**	**1,0%**	**2.820.000**	**100,0%**	**151%**	**1**	**243.100.900**	**101,0%**	**54%**	**BAGIAN KESRA**	
		Kegiatan I : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persenatse Masyarakat yang mengikuti bimbangan mental dan spritual dari target	100%	450.000.000	100%	240.280.900	100%	362.369.500	1%	2.820.000	100,0%	**151%**	**1**	**243.100.900**	**101,0%**	**54%**		
		Sub Kegiatan I : Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spritual	1.Jumlah dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spritual	15 Dokumen	450.000.000	30 Dokumen	240.280.900	15 Dokumen	362.369.500	-	2.820.000	100%	**151%**	**15 Dokumen**	**243.100.900**	**15 Dokumen**	54%		
		Sub Kegiatan I : Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spritual	2. Jumlah Masyarakat yang mengikuti Bimbangan Mental dan Spritual	750 orang		750		350 orang		-		100%		**750 Orang**		**350 Dokumen**			
		Tujuan II : Meningkatnya pembinaan nilai-nilai keagamaan																	
		Sasaran II : Meningkatnya kompetensi tokoh agama dan reward keagamaan																	
		Program II : Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	**1. Persentase Perangkat Agama Yang Dibina**	**100%**	**10.718.048.300**	**100%**	**8.362.177.412**	**100%**	**5.680.748.960**	**25%**	**703.555.000**	**100%**	**68%**	**1**	**9.065.732.412**	**125%**	**85%**	**BAGIAN KESRA**	
		Program II : Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	**2. Persentase Guru Agama Desa aktif**	**100%**		**100%**						**0%**		**1**		**100%**			
		Program II : Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	**3. Persentase tokoh agama teladan**	**75%**		**100%**						**0%**		**1**		**133%**			
		Program II : Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	**4. Persentase masyarakat berprestasi yang mendapatkan kesempatan perjalanan**	**100%**		**100%**						**0%**		**1**		**100%**			
		Program II : Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	**5. Persentase Tempat Ibadah aktif**	**67,5%**		**67,5%**		**67,5%**		**25,0%**		**100%**		**1**		**137%**			
		Sub Kegiatan II : Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	1. Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan capaian kinerja terkait	1 Dokumen	5.352.977.050	1 Dokumen	4.055.023.700	1 Dokumen	1.242.420.050		103.820.000	1 Dokumen	31%	2 Dokumen	4.158.843.700	2 Dokumen	7769%		
		Sub Kegiatan II : Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	2. Jumlah Lembaga yang memperoleh hibah	19 lembaga		75 lembaga		31 lembaga		1 lembaga		31 lembaga		76 lembaga		159 lembaga			
		Sub Kegiatan II : Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	3. Jumlah Masyarakat berprestasi/tokoh agama teladan yang diberangkatkan untuk	50 orang		50 orang								50 orang		100 orang			
		Sub Kegiatan III : Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1. Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan capaian kinerja terkait	1 Dokumen	5.365.071.250	1 Dokumen	4.307.153.712	1 Dokumen	4.438.328.910		599.735.000	1 Dokumen	103%	1 Dokumen	4.906.888.712	2 Dokumen	9146%		
		Sub Kegiatan III : Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	2. Jumlah tokoh Agama teladan	15 Orang												30 Orang			
		Sub Kegiatan III : Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	3. Jumlah tempat ibadah aktif	331		331		279		279		279		610		532			
		Sub Kegiatan III : Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	4. Jumlah Guru Agama Desa/Kelurahan aktif	156 Orang		153 Orang		153 Orang		153 Orang		153 Orang		306 Orang		299 Orang			
		Sub Kegiatan III : Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	5. Jumlah perayaan hari besar islam	6 Kali		6 Kali		6 Kali		2 Kali		6 Kali		8 Kali		12 Kali			
		Sub Kegiatan III : Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	6. Jumlah perayaan MTQ tingkat kabupaten dan provinsi	2 Kali		3 Kali								3 Kali		3 Kali			
		Sub Kegiatan III : Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	7. Jumlah fasilitasi keberangkatan dan kepulangan jamaah haji	2 Kali		4 Kali		2 Kali				2 Kali		4 Kali		4 Kali			

					Sub Kegiatan III : Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	8. Jumlah Guru Ngaji Kelurahan	131		131								131		262			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) :									**100%**	**8.602.458.312**	**100%**	**6.043.118.460**	**12%**	**706.375.000**	**100%**	**70%**	**112%**	**9.308.833.312**	**100**	**83%**		
Predikat Kinerja:									**100%**	**8.602.458.312**	**100%**	**6.043.118.460**	**12%**	**706.375.000**	**100%**	**7025%**	**112%**	**9.308.833.312**	**100**	**83%**		

Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja : Kerja sama antar Bidang

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Pelaksanaan Kegiatan Mengikuti Kalender Nasional, Banyaknya Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penerima Hibah, adanya refofushing anggaran dari presiden

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mempercepat pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Mempercepat pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan

Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2025
Renja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong

OPD : BAGIAN HUKUM
TRIWULAN : 1 (SATU)

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rensta perangkat Daerah Provinsi s/d TahuN 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 18		11 = 10/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatkan Fasilitas dan Koordinasi Administrasi Pemerintahan dan Perangkat Daerah yang Akuntabel	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persen	1.250.000.000	98,0	1.390.375.280	100	591.540.975	22,92	135.554.000	23	23	120,92	1.525.929.280	85,8	217,94	Bagian Hukum
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum daerah yang disusun	100	500.000.000	85,79	705.261.300	246	330.499.300	33,43	110.500.000	14	33	119,22	815.761.300	98,0	163,15	
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5	450.000.000	91,06	479.963.500	5	208.638.100	10,15	21.174.000	203	10	101,21	501.137.500	9.106	111,36	
			Jumlah Laporan Capaian Kabupaten Peduli HAM	3				2										
		Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengeloaan Informasi Hukum	Jumlah peserta penyuluhan hukum terpadu bagi masyarakat	150	300.000.000	0	160.493.776	30	52.403.575	7,40	3.880.000	25	7	7,40	164.373.776	-	54,79	
			Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasikan	1		1		1										
Rata-rata capaian kinerja (%)										22,92	135.554.000							
Predikat kinerja										120,92	1.525.929.280							

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2025
Kabupaten Rejang Lebong

OPD : BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA KABUPATEN REJANG LEBONG
Triwulan : 1 (satu)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)* / Kegiatan *(Output)*		Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s / d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s /d TW 1 Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s / d TW 1 Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100 %			
1	2	3	Indikator	Satuan Indikator	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
		Tujuan : Meningkatnya Penyelenggaraan dan Pengendalian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel	**Tingkat Inflasi**	**2,1**																
		Sasaran : Menurunnya Tingkat Inflasi Daerah																		
		Program Perekonomian dan Pembangunan	**Persentase Tingkat Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah**	Persen	**100**	**241.428.000**	**73,94**	**178.499.999**	**82,10**	**214.147.975**	4,73	**10.120.000**	**6**	**5**	**79**	**188.619.999**	**79**	**78,13**		
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Tersedianya Bahan Perumusan Kebijakan Perekonomian, dan Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD di Kabupaten Rejang Lebong**	Dokumen	**1**	**168.428.000**	77,75	**130.959.419**	**85,045**	**197.312.225**	4,39	**8.655.000**	**5**	**4**	**82**	**139.614.419**	**82**	**82,89**	Bag.Perekonomian dan SDA Setda Kab.Rejang Lebong	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengeloalan BUMD dan BLUD	Dokumen	1	68.428.000	80,04	54.768.608	90,31	147.782.150	3,74	5.520.000	**4**	**4**	84	60.288.608	83,77	88,11	Bag.Perekonomian dan SDA Setda Kab.Rejang Lebong	
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Dokumen	1	100.000.000	76,19	76.190.811	79,78	49.530.075	6,33	3.135.000	**8**	**6**	83	79.325.811	82,52	79,33		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN												-					
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya honorarium pelaksanaan tugas ASN ,Tersedianya honorarium THL												-					
		Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Tersedianya Dokumen Perumusan Kebijakan Sumber Daya Alam di Kabupaten Rejang Lebong**		**1**	**73.000.000**	65,12	**47.540.580**	**77,58**	**16.835.750**	**8,70**	**1.465.000**	**11**	**9**	**74**	**49.005.580**	**73,8**	**67,13**		
															-					
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Partambangan dan Sumber Daya Mineral,Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian.	Dokumen	1	73.000.000	65,12	47.540.580	77,58	16.835.750	8,70	1.465.000	**11**	**9**	74	49.005.580	73,8	67,13	Bag.Perekonomian dan SDA Setda Kab.Rejang Lebong	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara	Unit	12	150.000.000	12	168.728.375	0		0	-	0	0	12	168.728.375	100,00	112,49		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	Unit	1	125.000.000	0	-	0		0	-	0	0	-	-	0,00	0,00		
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi PSU yang terbangun	Lokasi	1	600.000.000	1	506.529.600	0		0	-	0	0	1	506.529.600	100,00	84,42		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Dukungan SDM Yang Memadai, dan Sarana Prasarana Mulai Mendukung, dan SOP dan sistem pelaksanaan kegiatan yang sudah terbangun dengan baik.
Faktor Penghambat Pencapian Kinerja	1. Keterbatasan SDM Teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan 2.Aplikasi SIPD sering error dan mengalami gangguan
Tindak Lanjut Yang diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya	1. Aplikasi Proses Penataanusahaan Keuangan Perlu dilakukan Perbaikan 2. Penambahan SDM Teknis 3. Perbaikan pada aplikasi SIPD
Tindak Lanjut Yang diperlukan Dalam RKPD Berikutnya	Diperlukan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan dengan Regulasi Yang Telah diterbitkan

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2025
KABUPATEN REJANG LEBONG

OPD : BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH

Triwulan : 1 (satu)

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)* / Kegiatan *(Output)*		Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s / d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s /d TW 1 Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s / d TW I Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
						Indikator	Satuan Indikator	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Meningkatnya efektifitas Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	**Nilai Persentase Laporan Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Pembangunan**																	
					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Persentase Laporan Capaian Realisasi fisik Pelaksanaan Pembangunan**	**%**	**100**	**396.573.000**	94	287.576.129	**100**	129.405.850	25	5.250.000	25,00	4,06	119	292.826.129	119	73,84		
3	2	02			Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Pembangunan Daerah	Dokumen	45	396.573.000	44	287.576.129	44	129.405.850	25	5.250.000	56,82	4,06	69	292.826.129	153,3	73,84		
						Jumlah Laporan Penyerapan Anggaran	Dokumen	45		44								44		97,8			
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Monev Pembangunan	Kecamatan	15		15								15		100			
3	2	02	01		Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen TOR OPD	Dokumen	45	75.027.000	45	54.029.846	44	27.061.375		1.050.000	-	3,88	45	55.079.846	100	73,41		
						Jumlah Dokumen Anggaran OPD Sumber Dana APBD dan Non APBD	Dokumen	1		1								1		100			
						Jumlah DPA OPD	Dokumen	45		44				44		44,00		88		195,6			
3	2	02	02		Sub Kegiatan : Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen TEPRA	Dokumen	45	225.082.000	45	156.997.507	4	78.602.800		3.150.000	-	4,01	45	160.147.507	100	71,15		
						Jumlah Dokumen Realisasi berkala Sumber Dana non APBD	Dokumen	1		1								1		100			
						Jumlah Laporan hasil Koordinasi Pembangunan Lintas Sektor	Laporan	1		1								1		100			
3	2	02	03		Sub Kegiatan : Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan Monitoring pelaksanaan Pembangunan	Laporan	15	96.464.000	15	76.548.776	5	23.741.675	3	1.050.000		4,42	18	77.598.776	120	80,44		
						Jumlah Dokumen RFK	OPD	45		44		44		44		100,00		88		196			
						Jumlah Telaah Kebijakan Hasil Laporan Evaluasi Pembangunan	Laporan	15		15								15		100			
RATA- RATA CAPAIAN KINERJA (%)										**94**	**287.576.129**	**100**	**129.405.850**	**25**	**5.250.000**	**25,00**	**4,06**	**119**	**292.826.129**	**119**	**73,83914916**		
PREDIKAT KINERJA																							

Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan
Provinsi Bengkulu Kabupaten Rejang Lebong

OPD : BAGIAN BARANG DAN JASA
TRIWULAN : 1 (satu)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW I Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
		Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	**Nilai SAKIP Daerah**																
		Sasaran : Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	**Persentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang Kredibel dan Transparan**																
1		**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu**																
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Presentase Penyelesaian Proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Ketentuan**																
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Permohonan Proses Pengadaan Barang Dan Jasa dengan kriteria lengkap dan dapat ditindakanjuti	100	306.108.351	97	541.214.790	85	282.741.487	2,3	6.510.000	2,7	2,3	99	547.724.790	179	179		
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	level tingkat kematangan UKPBJ	98	170.852.120	100	208.888.060	85	141.898.000	1,1	1.500.000	1,2	1,1	101	210.388.060	123	123		
		Pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah permohonan Pembinaan dan Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa	88	53.848.835	81	65.659.105	85	20.256.750	4,4	900.000	5,2	4,4	85	66.559.105	124	124		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) :						278	815.761.955	255	444.896.237	8	8.910.000	9	8	286	824.671.955	426	426		
Predikat Kinerja:																			

Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong

OPD : Bagian Organisasi

Triwulan : 1 (satu)

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW 1 Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW 1 Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
	4				Urusan: UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
	4	01			Bid. Urusan: SEKRETARIAT DAERAH																	
1	**4**	**01**	**01**		**Program: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Kematangan Organisasi**	**B**	**1.935.916.241,91**	**B**	**312.341.109**	**B**	**146.012.600**	**0**	**5.475.000**	**0**	**3,75**	**-**	**317.816.109**	**B**	**16,42**	**Bagian Organisasi**	**Indikator kinerja baru terukur di**
	4	01	01	2.13.001		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis	24	561.552.760,00	4	93.935.000	4	34.309.000	0	-	0	-	4	93.935.000	16,67	16,73	Bagian Organisasi	
	4	01	01	2.13.002		Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6	560.944.720,00	1	89.148.000	1	46.890.700	1	-	1	-	2	89.148.000	33,33	15,89	Bagian Organisasi	
	4	01	01	2.13.003		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	12	813.418.761,91	2	129.258.109	2	64.812.900	1	5.475.000	50	8,45	3	134.733.109	25,00	16,56	Bagian Organisasi	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) :									**2,33**		**2,33**		**0,67**		**17**	**2,82**	**3**		**25,00**	**16,39**		
Predikat Kinerja:																						
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja : Tim kerja yang solid																						
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Kurang pedulinya OPD dan keterlambatan dalam penyampaian data yang dibutuhkan																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Diperlukan kepedulian yang lebih dari pimpinan OPD terkait kinerja bersama dalam pencapaian indikator daerah																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : diperlukan pemahaman dan komitmen pimpinan terhadap kinerja indikator daerah																						
*) Sesuaikan atau diisi dengan nama Provinsi/kabupaten/Kota																						

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2025
Kabupaten Rejang Lebong

OPD : BAGIAN UMUM
TRIWULAN : 1 (satu)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)* / Kegiatan *(output)*		Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai Dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW.I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW.I Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
			Indikator	Satuan Indikator	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	B																
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Persen		12.919.853.400		21.778.863.464	100%	8.147.902.362		1.441.745.587				23.220.609.051				
	4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	Persen	100%	3.126.649.220	92%	5.485.065.672	100%	2.178.596.000	23,77%	517.947.079	23,77%	23,77%	116,02%	6.003.012.751	116,02%	192,00%		
	4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100%	1.995.093.790	91%	3.715.784.586	100%	1.847.000.555	7,08%	130.825.000	7,08%	7,08%	98,17%	3.846.609.586	98,17%	192,80%		
	4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100%	3.725.431.930	99%	5.499.619.350	100%	1.254.502.070	18,21%	228.428.620	10,32%	18,21%	109,29%	5.728.047.970	109,29%	153,76%		
	4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100%	2.331.339.400	89%	4.210.068.481	100%	1.402.659.137	13,30%	186.509.432	9,97%	13,30%	99,00%	4.396.577.913	99,00%	188,59%		
	4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Persen	100%	503.225.700	95%	778.343.675	100%	481.020.400	32,85%	157.994.456	9,51%	32,85%	104,04%	936.338.131	104,04%	186,07%		
	4 01 01 2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen fasilitas kerumahtanggaan sekretariat daerah	Persen	100%	1.238.113.360	94%	2.089.981.700	100%	984.124.200	22%	220.041.000	0%	22%	93,59%	2.310.022.700	93,59%	186,58%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						12.919.853.400		21.778.863.464		8.147.902.362		1.441.745.587				23.220.609.051				
Predikat Kerja																				

Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja : Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan time schedule yang direncanakan
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Regulasi pelaksanaan kegiatan tidak seiring waktu pelaksanaan
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : Bimtek dan pendampingan untuk SDM pengelola keuangan
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : Peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2025
Kabupaten Rejang Lebong

OPD : Bagian Protokol dan Komunikasi

Triwulan : 1 (satu)

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)* / Kegiatan *(Output)*		Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai Dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW.I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s / d TW.I Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4		5		6		7		8		9 = 8/7X100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							Indikator	Satuan Indikator	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	**Nilai Sakip OPD**	B																
1						**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu**	**Persen**	**100**	**600.386.906**	**98**	**524.884.248**	**100**	**257.195.550**	**24**	**62.245.445**	**0,00**	**24,20**	**122**	**587.129.693**	**122,20**	**97,79**		
	4	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tepat Waktu**	**Persen**	**100**	**138.180.000**	**100**	**71.280.000**	**100**	**72.600.000**	**25**	**18.150.000**	**25,00**	**25,00**	**125**	**89.430.000**	**125,00**	**64,72**		
	4	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan & Perat. Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan & Perat. Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	100	138.180.000	100	71.280.000	100	72.600.000	25	18.150.000	25,00	25,00	125	89.430.000	125,00	64,72		
	4	**01**	**01**	**2,14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase Pelaksanaan Tugas dan Komunikasi Pimpinan Dalam Keadaan Baik**	**Persen**	**100**	**462.206.906**	**99**	**453.604.248**	**100**	**184.595.550**	**24**	**44.095.445**	**23,89**	**23,89**	**123**	**497.699.693**	**122,89**	**107,68**		
	4	01	01	2,14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	100	322.206.906	97	222.725.072	100	134.316.500	25	33.420.625	24,88	24,88	122	256.145.697	121,88	79,50		
	4	01	01	2,14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	100	70.000.000	95	48.266.600	100	18.629.300	42	7.884.820	42,32	42,32	137	56.151.420	137,32	80,22		
	4	01	01	2,14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	100	70.000.000	99	182.612.576	100	31.649.750	9	2.790.000	8,82	8,82	108	185.402.576	107,82	264,86		
Rata-rata capaian Kinerja (%)									**10000%**	**600.386.906**	**9800%**	**524.884.248**	**100%**	**257.195.550**	**24%**	**62.245.445**	**24%**	**24%**	**9824%**	**587.129.693**	**122,20**	**97,79**		
Predikat Kerja																								

Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja : Pelaksanaan Kegiatan Yang sesuai dengan time Schedule yang direncanakan

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Regulasi Pelaksanaan Kegiatan Tidak Seiring Waktu Pelaksanaan

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Bimtek dan pendampingan Untuk SDM Pengelola Keuangan

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Keuangam

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2025 KABUPATEN REJANG LEBONG

OPD : BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Triwulan : 1 (satu)

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)		Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW I Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							Indikator	Satuan Indikator	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan																		
						Sasaran: Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	**Terlaksananya dan terkelolanya Administrasi Penatausahaan Keuangan dengan baik**	**Persen**																
	4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Akuntabel dan Tepat Waktu**																	
	4	**01**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**Persen**	**100**	**14.225.540.809**	**100**	**15.149.283.100**	**100**	**14.225.540.809**	**6**	**1.536.651.453**	**6**	**10,80**	**106**	**16.685.934.553**	**106**	**117,30**		
	4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	13.362.246.059	12	12.535.623.100	12	13.362.246.059	3	1.318.161.453	**25**	**9,86**	15	13.853.784.553	**125**	**103,68**		
	4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium Pelaksana Tugas ASN / Tersedianya Honorarium TKS	Bulan	12	863.294.750	12	2.613.660.000	12	863.294.750	3	218.490.000	**25**	**25,31**	15	2.832.150.000	**125**	**328,06**		
	4	**01**	**01**	**2.05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**	**Paket**	**100**	**192.520.000**	**100**	**259.229.000**	**100**	**192.520.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**259.229.000**	**100**	**134,65**		
	4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	20	192.520.000	20	259.229.000	20	192.520.000	-	-	-	-	20	259.229.000	**100**	**134,65**		
	4	**01**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor dan Barang Cetak Penggandaan yang disediakan, serta Laporan Penyelenggaraan Rapat Konsultasi dan Koordinasi SKPD**		**100**	**707.703.000**	**100**	**938.915.900**	**100**	**707.703.000**	**3**	**13.530.343**	**3**	**1,91**	**103**	**952.446.243**	**103**	**134,58**		
	4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Paket	3	82.327.000	3	86.531.900	3	82.327.000	-	-	-	-	3	86.531.900	**100**	**105,11**		
	4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	625.376.000	12	852.384.000	12	625.376.000	3	13.530.343	**25**	**2,16**	15	865.914.343	**125**	**138,46**		
	4	**01**	**01**	**2.08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Keadaan Baik**		**100**	**1.750.991.570**	**100**	**1.744.229.947**	**100**	**1.750.991.570**	**3**	**148.182.727**	**3**	**8,46**	**103**	**1.892.412.674**	**103**	**108,08**		
	4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Paket	3	18.192.000	3	22.230.000	3	18.192.000	-	-	-	-	3	22.230.000	**100**	**122,20**		
	4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1.732.799.570	12	1.721.999.947	12	1.732.799.570	3	148.182.727	**25**	**8,55**	15	1.870.182.674	**125**	**107,93**		
	4	**01**	**01**	**2.11**		**Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100**	**647.999.966**	**100**	**573.389.771**	**100**	**647.999.966**	**25**	**37.698.913**	**25**	**5,82**	**125**	**611.088.684**	**125**	**94,30**		
	4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	247.999.966	2	173.389.771	2	247.999.966	2	37.698.913	**100**	**15,20**	4	211.088.684	**200**	**85,12**		
	4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Operasional Penunjang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibayarkan	Orang	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	-	**100**	-	4	400.000.000	**200**	**100,00**		
								Rata-rata capaian kinerja (%)		**17.524.755.345**		**18.665.047.718**		**17.524.755.345**		**1.736.063.436**		**9,91**		**20.401.111.154**	**107,40**	**117,78**		
								Predikat kinerja																

Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2025
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Rejang Lebong

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Triwulan : 1 (satu)

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s / d		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah /Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
								Indikator	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
								Nilai SAKIP daerah																
							Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	**Nilai SAKIP**																
	1	1	1				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**100**	**217.655.641.715**	**135,84**	**204.436.888.443**	**100**	**219.778.550.206**	**17,58**	**38.641.887.985**	**17,58**	**17,58**	**153,42**	**243.078.776.428**	**111,68**	**111,68**	**Sekretariat**	
	1	1	1	2	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi perangkat daerah yang disusun	100	9.600.000	146,39	3.865.000	0	-	0	-	-	0	**0**	-	0	0		
	1	**1**	**1**	**2**	**2**		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100	216.537.885.560	163,99	203.423.971.132	100	218.551.594.931,40	17,66	38.600.713.465	17,66	17,66	181,65	242.024.684.597	111,77	111,77		
	1	**1**	**1**	**2**	**6**		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100	838.279.728	137,96	771.706.231	100	687.045.875	3,39	23.268.000	3,39	3,39	141,35	794.974.231	94,83	94,83		
	1	**1**	**1**	**2**	**8**		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	100	129.636.427	100,08	103.192.068	100	340.272.400	5,26	17.906.520	5,26	5,26	105,34	121.098.588	93,41	93,41		
	1	**1**	**1**	**2**	**9**		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	100	140.240.000	130,79	134.154.012	100	199.637.000	0,00	-	0,00	-	130,79	134.154.012	95,66	95,66		
							Meningkatnya Pelayanan Dasar dan Kualitas	**Rata-rata Lama Sekolah**											**-**	-				
							PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**Angka Putus Sekolah SD/MI (APS) SD/MI**	**100**	**58.935.454.346**	**131,90**	**70.862.861.969**	**100**	**58.344.235.498**	**0,25**	**144.073.000**	**0,25**	**0,25**	**132,15**	**71.006.934.969**	120,48	120,48		
	1	1	2	1			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD, MI	100	31.409.500.646	140,68	39.113.842.375	100	31.251.011.900	0,18	56.138.000	**0,18**	**0,18**	140,86	39.169.980.375	124,71	124,71	Sekretaris,Pembinaan Bidang SD,Pembinaan Ketenagaan	
	1	1	2	2			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/ MTs	100	19.635.875.040	127,18	24.580.649.144	100	17.597.563.650	0,35	61.355.000	0,35	0,35	127,53	24.642.004.144	125,49	125,49	Sekretaris,Pembinaan Bidang SMP,Pembinaan Ketenagaan	
	1	1	2	3			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pendidikan Anak Usia Dini	100	3.600.058.620	153,99	5.147.178.500	100	7.589.995.448	0,35	26.580.000	0,35	0,35	154,34	5.173.758.500	143,71	143,71	Pembinaan Bidang PAUD/PNF,Pembinaan Ketenagaan	
	1	1	2	4			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	- Angka Partisipasi Sekolah (APS) Paket A - Angka Partisipasi Sekolah (APS) Paket B	100	4.290.020.040	105,75	2.021.191.950	100	1.905.664.500	0,00	-	0,00	-	105,75	2.021.191.950	47,11	47,11	Pembinaan Bidang PAUD/PNF,Pembinaan Ketenagaan	
							Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Budaya dan kearifan lokal	**1. Persentase Pelaku Pelestari Budaya yang aktif 2. Persentase pelestarian warisan budaya**											**-**					
							Meningkatnya Peranan BMA dan meningkatnya keikutsertaan seni etnis nusantara yang ditampilkan	**Persentase BMA Aktif**											**-**					
								Persentase Keikutsertaaan seni Etnis Nusantara yang ditampilkan											**-**					
	2	#	2				**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Adat dan Seni Budaya yang dikembangkan**	**100**	**2.060.425.562**	**184,81**	**3.446.154.055**	**100**	**4.842.185.600**	**0,46**	**22.050.000**	**0,46**	**0,46**	**185,26**	**3.468.204.055**	**168,32**	**168,32**		
	2	#	2	2	1		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keikutsertaaan seni Etnis Nusantara yang ditampilkan	100	1.148.025.562	176,96	2.216.455.355	100	2.554.243.400	0,59	14.970.000	0,59	0,59	177,55	2.231.425.355	194,37	194,37	Bidang Kebudayaan	
	2	#	2	2	2		Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/kota	Persentase kesenian tradisional dan Lembaga adat yang dilestarikan	100	912.400.000	192,65	1.229.698.700	100	2.287.942.200	0,31	7.080.000	0,31	0,31	192,96	1.236.778.700	135,55	135,55	Bidang Kebudayaan	
																			-	-				
	2	#	0 4				**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase sejarah lokal yang terdokumentasi**	**100**	-	26,36	-	**100**	**141.720.850**	**0,00**	-	0,00		26,36	**-**				

	2	#	'0 4	2			Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan sejarah lokal yang didokumentasikan	100	-	26,36	-	100	141.720.850	0,00	-	0,00		26,36	-			Bidang Kebudayaan	
										-									-	-				
	2	#	5				**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan**	**100**	-	-	171.376.577	**100**	123.254.450	**0,00**	-	0,00	-	-	**171.376.577**	0	**0**		
	2	#	5	2			Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan, Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di Kelola	100	-	-	171.376.577	**100**	123.254.450	0,00	-	0,00	-	-	171.376.577	0	0	Bidang Kebudayaan	
Rata-rata capaian kinerja (%)											119,73	**278.917.281.044**	**100**	**283.229.946.604,40**	**13,70**	**38.808.010.985**	**13,70**	**3,09**	**133,43**	**317.725.292.029**	**120,55**	**120,55**		

Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja : 1. Dukungan SDM yang kompeten 2. SOP dan sistem pelaksanaan kegiatan udah terjalan dengan baik dan seoptimal mungkin 3. Koordinasi yang baik dengan stakeholder

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :1. Keterbatasan SDM Teknis yang kurang kompeten terkait pelaksanaan peningkatan mutu layanan pendidikan dan inovasi ;

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :1.Mengedarkan Surat Himbauan kepada masing-masing pengelola kegiatan agar segera melakukan percepatan realisasi sesuai angkas yang direncanakan,menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu,2.Mengingatkan ke pengelola kegiatan BOS/BOSP terkait pelaporan penerimaan/pengeluaran belanja BOS dan Hibah (Swasta)

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :Pemenuhan/ketersediaan anggaran pendidikan yang lebih efektif sesuai dengan program pusat/provinsi yang harus diakomodir khususnya untuk pemenuhan SPM.

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama Provinsi/kabupaten/Kota

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Rejang Lebong

OPD **Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong**

TRIWULAN **1 (Satu)**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)* / Kegiatan *(Output)*		Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s / d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s /d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s / d TW I Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
			Indikator	Satuan Indikator	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	**Nilai SAKIP Daerah**	**predikat**	**BB**		**B**	**-**	**BB**	-	-	-	-	-	-	-				
		Sasaran : Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Akuntabel dan Tepat Waktu**	**%**	100		100,00	-	100	-	100		100		200	-	200			
			Nilai Evaluasi SAKIP OPD	**predikat**	BB		B	-	B	-	-		-	-	-	-	-			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	***Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu***	***%***	***100***		***100***	***117.224.192.094***	***100***	***69.462.076.633***	-	***15.754.806.828***	-	23	100	132.978.998.922	100			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu**	**%**	**100**		**100**	**57.623.913**	**100**	**31.974.000**	-	**1.212.000**	-	4	100	58.835.913	100			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	42		14	32.199.413	7	24.334.000	-	1.212.000	-	5	14	33.411.413	33			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7		2	25.424.500	1	7.640.000	-	-	-	-	2	25.424.500	29			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu**	**%**	**100**		**195,71**	**115.217.920.868**	**100**	**68.554.335.844**		**15.651.269.295**	-	23	196	130.869.190.163	196			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	4732		13.703	110.818.438.868	11.550	66.903.895.844	1.938	15.651.269.295	17	23	15.641	126.469.708.163	331			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	84		4.608	4.399.482.000	12	1.650.440.000	3	-	25	-	4.611	4.399.482.000	5.489			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik**	**%**	**100**		**100,00**	**27.134.000**	**100**	-	-	-	-	-	100	27.134.000	100			
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	161		46	27.134.000	-	-	-	-	-	-	46	27.134.000	29			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu**	**%**	100		100	96.192.950	100	37.220.000		**2.260.000**	-	6	100	98.452.950	100			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	100		24	96.192.950	15	37.220.000	3	2.260.000	20	6	27	98.452.950	27			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu**	**%**	**100**		**100**	**910.700.753**	**100**	**257.798.807**		**14.910.000**	-	6	100	925.610.753	100			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12		24	70.621.200	12	46.972.000	-	-	-	-	24	70.621.200	200			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12		12	99.390.000	5	41.214.000	-	-	-	-	12	99.390.000	100			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	7		24	89.457.300	8	50.000.000	1	1.910.000	13	4	25	91.367.300	357			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	7		22	56.294.000	12	28.197.932	-	-	-	-	22	56.294.000	314			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	84		22	45.000.000	12	20.000.000	3	13.000.000	25	65	25	58.000.000	30			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	84		24	549.938.253	12	71.414.875	-	-	-	-	24	549.938.253	29			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu**	**%**	**100**		**200**	**419.154.892**	**100**	**300.000.000**	**25**	**54.495.852**	25	18	225	473.650.744	225			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	84		24	419.154.892	12	300.000.000	3	54.495.852	25	18	27	473.650.744	32			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik**	**%**	**100**		**107**	**533.114.118**	**100**	**280.747.982**		**30.659.681**	-	11	107	563.773.799	107			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	42		13	166.316.701	7	99.990.000	2	14.420.181	29	14	15	180.736.882	36			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	35		16	182.970.117	5	60.767.982	1	3.957.500	20	7	17	186.927.617	49			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara1	unit	7		12	69.067.500	23	19.990.000	-	-	-	-	12	69.067.500	171			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	7		2	114.759.800	1	100.000.000	-	12.282.000	-	12	2	127.041.800	29			
							0	**60.932.534.801**		**39.078.519.600**		**31.582.000**	#DIV/0!	0	-	60.964.116.801	#DIV/0!			
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	***Angka Kematian Bayi***		***4***		***11***	-	***16***	-	-	-	-	-	11	-	281			
			Angka Kematian Ibu		***30***		***285***	-	***124***	-	-	-	-	-	285	-	951			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	***%***	***100***		***194***	-	***100***	-	***16***	-	16	-	210	-	210			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	***%***	***100***		***197***	-	***100***	-	***18***	-	18	-	215	-	215			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	***%***	***100***		***198***	-	***100***	-	***19***	-	19	-	217	-	217			
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	***%***	***100***		***161***	-	***100***	-	***16***	-	16	-	177	-	177			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	***%***	***100***		***200***	-	***100***	-	-	-	-	-	200	-	200			
			Persentase orang usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	***%***	***100***		***181***	-	***100***	-	***18***	-	18	-	199	-	199			

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Rejang Lebong

OPD **Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong**

TRIWULAN **1 (Satu)**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)* / Kegiatan *(Output)*		Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s / d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s /d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s / d TW I Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
			Indikator	Satuan Indikator	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	***%***	***100***		***175***	***-***	***100***	***-***	***19***	***-***	19	-	193	-	193			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	***%***	***100***		***195***	***-***	***100***	***-***	***22***	***-***	22	-	217	-	217			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	***%***	***100***		***193***	***-***	***100***	***-***	***21***	***-***	21	-	214	-	214			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	***%***	***100***		***185***	***-***	***100***	***-***	***69***	***-***	69	-	254	-	254			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	***%***	***100***		***150***	***-***	***100***	***-***	***7***	***-***	7	-	157	-	157			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	***%***	***100***		***185***	***-***	***100***	***-***	***23***	***-***	23	-	208	-	208			
			Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	***%***	***100***		***100***	***-***	***100***	***-***	***100***	***-***	100	-	200	-	200			
			Persentase Masyarakat yang terlayani jaminan kesehatan	***%***	***23,11***		***190***	***-***	***100***	***-***	***99***	***-***	99	-	288	-	1.247			
			Persentase puskesmas rawat inap	***%***	***57,14***		***114***	***-***	***57***	***-***	***57,14***	***-***	100	-	171	-	300			
			Rasio puskesmas per satuan penduduk	***%***	***0,075***		***0,15***	***-***	***0,075***	***-***	***0,075***	***-***	100	-	0	-	300			
			Rasio pustu per satuan penduduk	***%***	***0,181***		***0,36***	***-***	***0,181***	***-***	***0,181***	***-***	100	-	1	-	300			
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang dibangun/renovasi/rehab**	**%**	**10%**		**10**	**20.951.635.231**	**10%**	**14.848.004.292**		**11.442.000**	-	0	10	20.963.077.231	10.000			
		Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	unit	12		0	-	1	3.846.072.000	-	-	-	-	-	-	-			
		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	unit	26		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pengembangan Fasilitas Kesehatan lainnya	unit	1		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	unit	20		0	475.222.285	-	-	-	-	-	-	-	475.222.285	-			
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	2		1	115.289.000	-	-	-	-	-	-	1	115.289.000	50			
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket alat kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Paket	7		2	13.183.645.838	1	4.611.000.000	-	6.630.000	-	0	2	13.190.275.838	29			
		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	7		1	2.002.991.778	1	6.040.179.892	-	-	-	-	1	2.002.991.778	14			
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	7		2	4.947.042.080	1		-	-	-	-	2	4.947.042.080	29			
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	695		268	227.444.250	100	227.644.400	-	4.812.000	-	2	268	232.256.250	39			
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Kesehatan di Puskesmas dapat terkalibrasi	Unit			0	-	304	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Distribusi Alat Kesehatan, obat, bahan habis pakai,bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan		Paket					1	123.108.000	-	-	-	-	-	-	-			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pelayanan SPM Kesehatan**	**%**	**100**			**39.761.174.670**		**24.009.695.308**		**16.510.000**	-	0	-	39.777.684.670	-			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	6.524		9.545	63.711.000	5.327	23.328.800	874	-	16	-	10.419	63.711.000	160			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	5.917		9.253	250.623.100	5.275	163.614.800	948	-	18	-	10.201	250.623.100	172			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	5.387		8.896	74.420.750	4.898	8.630.000	948	-	19	-	9.844	74.420.750	183			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	26.176		48.475	25.030.300	28.887	10.574.800	4.531	-	16	-	53.006	25.030.300	202			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Penduduk Usia Pendidikan dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	5.254		60.717	75.029.100	43.737	25.300.000	-	-	-	-	60.717	75.029.100	1.156			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	org	228.445		397.401	38.275.000	194.853	18.068.000	35.350	-	18	-	432.751	38.275.000	189			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	42.021		54.467	54.809.000	30.451	44.893.000	5.738	-	19	-	60.205	54.809.000	143			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	5.613		122.152	47.606.200	43.325	18.170.000	8.935	1.200.000	21	7	131.087	48.806.200	2.335			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	1.363		5.617	548.414.900	2.338	20.570.000	524	900.000	22	4	6.141	549.314.900	451			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	595		1.113	45.710.500	617	19.570.000	425	-	69	-	1.538	45.710.500	258			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	org	5.686		4.004	32.224.700	7.911	13.630.000	575	-	7	-	4.579	32.224.700	81			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	org	7.666		12.679	48.148.200	6.479	21.395.000	1.493	-	23	-	14.172	48.148.200	185			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	84		24	171.171.900	12	90.504.000	3	-	25	-	27	171.171.900	32			
			Persentase Ibu Hamil KEK	%	9		12	-	15	-	5	-	30	-	16	-	178			
			Jumlah Balita stunting	orang	80		485	-	11.525	-	279	-	2	-	764	-	955			
			Jumlah Bayi < 6 bulan mendapat ASI eksklusif	orang	2000		1.933	-	531	-	520	-	98	-	2.453	-	123			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	84		24	165.382.400	12	22.320.000	3	-	25	-	27	165.382.400	32			
			Persentase Rumah Tangga yang memiliki Sanitasi Sehat	%	98		100	-	100%	-	94%	-	94	-	101	-	103			
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan Limbah B3	PKM	21		42	-	21	-	21	-	100	-	63	-	300			

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Rejang Lebong

OPD **Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong**
TRIWULAN **1 (Satu)**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)* / Kegiatan *(Output)*		Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s / d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s /d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s / d TW I Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
			Indikator	Satuan Indikator	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Tempat-tempat umum yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	TTU	25		12	-	30	-	5	-	17	-	17	-	68			
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen					12	311.860.000	3	-	25	-	3	-	-			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	84		24	111.263.200	21	22.340.000	21	-	100	-	45	111.263.200	54			
			Jumlah Puskesmas melaksanakan Yankestrad	PKM	4		25	-	21	-	21	-	100	-	46	-	1.150			
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	84		24	91.540.000	12	129.928.000	3	-	25	-	27	91.540.000	32			
			Jumlah kejadian yang dilakukan penyelidikan epidemiologi	%	80		95	-		-		-	-	-	95	-	119			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA Yang Meendapat Pelayanan Kesehatan	org					100	11.994.000	-	-	-	-	-	-	-			
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dokumen	84		12	91.907.000	-	-	-	-	-	-	12	91.907.000	14			
			Persentase penanganan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	%	100		100	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100			
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	84		24	647.917.589	12	194.965.000	3	2.020.000	25	1	27	649.937.589	32			
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	84		24	32.079.011.251	12	21.921.183.800	3	8.760.000	25	0	27	32.087.771.251	32			
			Jumlah Masyarakat yang mendapat Jaminan Kesehatan	orang	297269		282.111	-					-	-	282.111	-	95			
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	84		24	111.871.400	12	101.583.000	3	3.630.000	25	4	27	115.501.400	32			
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	84		24	4.412.561.734	12	13.750.000	3	-	25	-	27	4.412.561.734	32			
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	84		24	94.627.000	12	369.416.108	3	-	25	-	27	94.627.000	32			
			Jumlah sampel yg mampu diperiksa	sampel	500		481	49.658.136	350	-	85	-	24	-	566	49.658.136	113			
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	pkm	21		42	375.737.704	21	19.250.000	21	-	100	-	63	375.737.704	300			
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	84		24	18.068.800	12	-	3	-	25	-	27	18.068.800	32			
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan						-	39.900.000	-	-	-	-	-	-	-			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Malaria	org					2.739	26.010.000	464	-	17	-	464	-	-			
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen					12	346.947.000	3	-	25	-	3	-	-			
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	**Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi**	**buah**	1		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	14		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pengajuan rekomendasi penerbitan izin oleh Fasyankes yang diproses**	**%**	100		100	450.564.900	100	220.820.000		3.630.000	-	2	100	454.194.900	100			
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	PKM	21		42	450.564.900	21	220.820.000	5	3.630.000	24	2	47	454.194.900	224			
			Jumlah organisasi penerima hibah	Org	1		2	-	1	-	1	-	100	-	3	-	300			
			Jumlah Puskesmas dengan jenis Pelayanan standar	PKM	21		42	-	21	-	21	-	100	-	63	-	300			
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	***Persentase tenaga kesehatan (dinas) memiliki sertifikat kompetensi***	***%***	***17,1***		***43***	***1.223.281.000***		***894.113.000***		-	-	-	43	1.223.281.000	250			
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah nakes memiliki sertifikat kompetensi**	**orang**	**350**		**137**	**1.223.281.000**	**330**	**894.113.000**	-	-	-	-	137	1.223.281.000	39			
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	orang	350		137	1.223.281.000	330	894.113.000	-	-	-	-	137	1.223.281.000	39			
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	***Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan***	***%***	***100***		***200***	***370.820.700***		***255.435.000***		-	-	-	200	370.820.700	200			
			Persentase PIRT yang bersertifikat	***%***	***100***		***129***	***59.930.000***	***100***				-	-	129	59.930.000	129			
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**Persentase PIRT memenuhi syarat yang diterbitkan sertifikat PIRTnya**	**%**	**100**		**139**	**131.875.800**	**100**	**1.352.000**	-	-	-	-	139	131.875.800	139			
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	84		24	71.945.800	12	1.352.000		-	-	-	24	71.945.800	29			
			Jumlah Sarana Produksi IRTP yang memenuhi ketentuan	sarana	100		103	92.926.000	39	-		-	-	-	103	92.926.000	103			
			Jumlah SPP-IRT yang diterbitkan Sesuai Ketentuan	Dokumen	100		103	92.926.000	39	-		-	-	-	103	92.926.000	103			
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**Persentase Pangan IRT yang memenuhi syarat**	**%**	**100**		**93**	**146.018.900**		**254.083.000**		-	-	-	93	146.018.900	93			

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Rejang Lebong

OPD **Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong**

TRIWULAN **1 (Satu)**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)* / Kegiatan *(Output)*		Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s / d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s /d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s / d TW I Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
			Indikator	Satuan Indikator	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	sarana	156		123	355.014.900	13	254.083.000	-	-	-	-	123	355.014.900	79			
			Persentase Hasil Pemeriksaan Pangan IRT yang ditindaklanjuti	%	100		84	208.996.000		-		-	-	-	84	208.996.000	84			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	***Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan***	***%***	***15,2***		***75***	***769.167.485***		***170.350.000***		***4.230.000***	-	2	75	773.397.485	493			
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**persentase pemberdayaan dan peran serta masayarakat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan**	**%**	**15,2**		**43**	**769.167.485**		**50.000.000**		**4.230.000**	-	8	43	773.397.485	283			
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	84		24	-	**12**	**50.000.000**	**3**	-	25	-	27	-	32			
			Jumlah Rumah Tangga yang menerapkan Germas	RT	17474		25.092	-	16.680	-	11.511	-	69	-	36.603	-	209			
			Jumlah Sekolah yang menerapkan Germas	Sekolah	80		115	-	70	-	80	-	114	-	195	-	244			
			Jumlah Kantor yang menerapkan Germas	OPD	40		100	-	40	-	40	-	100	-	140	-	350			
			Jumlah Strata Posyandu Aktif	Sekolah	900%		4.309	-	190	-	202	-	106	-	4.511	-	50.122			
			Jumlah Kader Kesehatan yang aktif	%	6640		6.460	-	66.640		6.374		10	-	12.834	-	193			
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								**120.350.000**		-	-	-	-	-	-			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Peelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen					12	120.350.000	3	-	25	-	3	-	-			
			total realisasi OPD					180.519.996.080,00		109.860.494.233,44		15.790.618.828		14	-	196.310.614.908	-			
						Rata-rata capaian kinerja (%)														

Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja : Secara umum keberhasilan kinerja karena pelaksanaan kegiatan terkait kinerja yang sesuai jadwal pada TW III dan telah diwujudkannya UHC bagi pelayanan jaminan kesehatan

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Di TW III ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan karena memang belum terjadwal dan masih dalam proses pengadaan barang dan jasa

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa; meningkatkan capaian target pemeriksaan kesehatan sesuai jadwal pelaksanaan kinerja

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : melakukan penyesuaian target terhadap pelaksanaan kegiatan yang capaian kinerjanya masih belum tercapai

Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Rejang Lebong

OPD : DINAS PUPRPKP
TRIWULAN : 1 (satu)

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja rensta Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah 2024		Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		12 (8+9+10+11)		13=6+12		14=13/5*100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	**Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten**	**Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu**	**100**	**7.716.654.980**	**100**	**6.127.779.808**	**100**	**9.263.483.100**	**9,03%**	**836.708.006**	**1107,13**	**6.964.487.814**	**221,43**	**1.392.897.563**	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi perangkat daerah yang disusun	100	147.379.559	100	273.925.126	100	210.125.883	0,00%	-	0,00	273.925.126	0,00	54.785.025	DPUPRPKP
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100	6.966.302.318	100	5.428.623.031	100	8.400.385.939	9,57%	804.021.396	1044,80	6.232.644.427	208,96	1.246.528.885	DPUPRPKP
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100	218.892.318	100	130.579.658	100	115.924.642	23,80%	27.585.270	420,24	158.164.928	84,05	31.632.986	DPUPRPKP
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	100	189.080.785	100	144.450.418	100	187.926.636	2,71%	5.101.340	3683,87	149.551.758	736,77	29.910.352	DPUPRPKP
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	100	195.000.000	100	150.201.575	100	349.120.000	0,00%	-	0,00	150.201.575	0,00	30.040.315	DPUPRPKP
2	**Meningkatnya kualitas infrastruktur**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik**	**85,1**	**4.555.476.546**	**84,09**	**5.617.546.397**	**82,5**	**570.000.000**	**0,00%**	**-**	**0,00**	**5.617.546.397**	**0,00**	**1.123.509.279**	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Ha)	188,23	4.555.476.546	3766	5.617.546.397	188,23	570.000.000	0,00%	-	0,00	5.617.546.397	0,00	1.123.509.279	DPUPRPKP
3	**Meningkatnya kualitas infrastruktur**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum**	**88**	**3.306.546.545**	**97,25**	**590.040.600**	**93,76**	**4.105.680.000**	**0,04%**	**1.500.000**	**266184,92**	**591.540.600**	**53236,98**	**118.308.120**	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum	610	3.306.546.545	57505	590.040.600	598	4.105.680.000	0,04%	1.500.000	157398085,60	591.540.600	31479617,12	118.308.120	DPUPRPKP
4	**Meningkatnya kualitas infrastruktur**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai**	**44**	**2.200.000.000**	**19,03**	**1.486.671.669**	**76,54**	**5.779.292.550**	**0,09%**	**5.340.000**	**20595,49**	**1.492.011.669**	**4119,10**	**298.402.334**	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten yang tertangani	280	2.200.000.000	271	1.486.671.669	280	5.779.292.550	0,09%	5.340.000	293293,69	1.492.011.669	58658,74	298.402.334	DPUPRPKP
5	**Meningkatnya kualitas infrastruktur**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat**	**35,13440984**	**1.389.180.633**	**55,1**	**1.737.590.350**	**40**	**7.944.130.125**	**0,01%**	**500.000**	**875443,14**	**1.738.090.350**	**175088,63**	**347.618.070**	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase dalam kondisi baik	35,13440984	1.389.180.633	55,1	1.737.590.350	40	7.944.130.125	0,01%	500.000	875443,14	1.738.090.350	175088,63	347.618.070	DPUPRPKP
6	**Meningkatnya kualitas bangunan gedung**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Peningkatan ketersediaan bangunan gedung daerah dalam kondisi baik**	**97,87**	**5.205.833.651**	**69**	**10.735.842.622**	**57**	**19.618.505.200**	**0,22%**	**42.480.000**	**31866,22**	**10.778.322.622**	**6373,24**	**2.155.664.524**	
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	97,87	5.205.833.651	69	10.735.842.622	57	19.618.505.200	0,22%	42.480.000	31866,22	10.778.322.622	6373,24	2.155.664.524	DPUPRPKP
8	**Meningkatnya kualitas infrastruktur**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik**	**75,6**	**38.833.856.528**	**76,19**	**42.094.128.552**	**78,95**	**36.347.463.708**	**0,10%**	**35.480.000**	**78052,80**	**42.129.608.552**	**15610,56**	**8.425.921.710**	
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	75,6	38.833.856.528	76,19	42.094.128.552	78,95	36.347.463.708	0,10%	35.480.000	78052,80	42.129.608.552	15610,56	8.425.921.710	DPUPRPKP
9	**Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Kesesuaian terhadap RTRW**	**88**	**2.085.762.090**	**104,14**	**342.939.337**	**85,45**	**546.570.875**	**2,71%**	**14.800.000**	**3845,94**	**357.739.337**	**769,19**	**71.547.867**	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang tersusun		300.000.000	95	153.250.642	1	415.439.250	2,45%	10.190.000	3873,08	163.440.642	774,62	32.688.128	DPUPRPKP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Pemanfaatan ruang yang tersusun		285.762.090	95	132.247.654	1	131.131.625	3,52%	4.610.000	2702,28	136.857.654	540,46	27.371.531	DPUPRPKP
10	**Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase penanganan rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten**	**100**	**108.243.216**	**0,05**	**193.468.500**	**87,5**	**147.201.000**	**11,36%**	**16.720.300**	**0,44**	**210.188.800**	**0,09**	**42.037.760**	
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Rusun yang dipelihara	1	108.243.216	2	103.120.200	1	147.201.000	11,36%	16.720.300	17,61	119.840.500	3,52	23.968.100	DPUPRPKP

11	**Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Rasio Rumah Layak Huni**	**97,28**	**34.780.020.315**	**80,13**	**371.760.600**	**0,712**	**3.406.385.625**	**0,64%**	**21.810.000**	**12515,07**	**393.570.600**	**2503,01**	**78.714.120**	
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase RTLH ditingkatkan kualitasnya	89,17	34.780.020.315	80,13	371.760.600	0,712	3.406.385.625	0,64%	21.810.000	12515,07	393.570.600	2503,01	78.714.120	DPUPRPKP
Total										24,19%	1.596.230.949	1289611,151	70.273.106.741	257.922,23	14.054.621.348	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										2,02%	1.596.230.949	107.467,5959	70.273.106.741	21.493,5192	14.054.621.348	
Predikat kinerja										2%	1.596.230.949	107.467,5959	70.273.106.741	21.493,5192	14.054.621.348	

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2025
Kabupaten Rejang Lebong

OPD **:Dinas Pemadam Kebakaran**
TRIWULAN **: 1 (Satu)**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)* / Kegiatan *(Output)*		Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s / d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s /d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s / d TW I		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100 %			
1	2	3	Indikator	Satuan Indikator	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1		**Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah**																	**DAMKAR**	
		Sasaran : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	**Nilai Sakip OPD**																	
		Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Akuntabel dan Tepat Waktu**		**100**	**3.618.146.317**	**100**	**3.810.986.346**	**100%**	**6.593.805.144**	**13,05%**	**860.349.467**	**13,05%**	**13,05%**	**100,13**	**4.671.335.813**	**100%**	**129%**		
		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP		100	7.750.000	85	7.450.000	100%	6.269.600	0,00%	-	0,00%	0,00%	85,00	7.450.000	85%	96%		
		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu		100	3.250.193.069	98,69	3.143.757.546	100%	6.243.282.193,82	13,48%	841.874.624	13,48%	13,48%	98,82	3.985.632.170	99%	123%		
		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah		100	-	87	78.750.000	100%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	87,00	78.750.000	87%	100%		
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum pemerintah daerah		100	83.861.948	100	54.751.800	100%	36.848.750	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00	54.751.800	100%	65%		
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Keadaan Baik		100	43.945.900	100	45.561.600	100%	49.349.200	6,96%	3.433.793	6,96%	6,96%	100,07	48.995.393	100%	111%		
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Baik		100	232.395.400	99	480.715.400	100%	258.055.400	0,00%	15.041.050	0,00%	0,00%	99,00	495.756.450	99%	213%		
2		**Tujuan : Megurangi Resiko Bahaya Kebakaran**																		
		Sasaran : Meningkatnya Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	**Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran**																	
		Program : Peningkatnya Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaan Kabupaten	**Persentase Layanan Pemadam, Penyelamatan, dan Evakuasi (dalam Waktu Respontime) yang Ditanggapi**		**100**	**339.205.000**	**100**	**448.600.200**	**100%**	**249.881.250**	**17,07%**	**42.643.750**	**17,07%**	**17,07%**	**100,17**	**491.243.950**	**100%**	**145%**		
		Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadam, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Kejadian Kebakaran Yang Ditanggapi		100	318.085.000	99	443.905.200	100%	249.881.250	17,07%	42.643.750	17,07%	17,07%	99,17	486.548.950	99%	153%		
		Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang Diberdayakan		100	21.120.000	82	4.695.000	100%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00	4.695.000	0%	22%		
			Rata-rata capaian kinerja (%)		**100**	**3.957.351.317**	82	**4.259.586.546**	100%	**6.843.686.394**	**13,19%**	**902.993.217**	**13,19%**	**13,19%**	**82,13**	**5.162.579.763,00**				
			Predikat Kinerja		**100**	**3.957.351.317**	82	**4.259.586.546**	100%	**6.843.686.394**	**13,19%**	**902.993.217**	**13,19%**	**13,19%**	**82,13**	**5.162.579.763,00**				

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : 1. SDM yang memadai, sarana prasarana serta anggaran yang mendukung 2. Koordinasi yang baik antar Bidang 3.
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : 1. Keterbatasan SDM yang dapat mengoprasikan Komputer 2. Aplikasi yang digunakan sering error 3. Kurangnya ada kerjasama antar Bidang
Tindak Lanjut uang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1 . Penambahan SDM yang dapat mengoperasikan Komputer/Leptop 2. Aplikasi yang digunakan dapat dilakukan perbaikan 3. Sebelum bertindak hendaknya berkoordinasi dengan bidang2
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1. Koordinasi yang baik dengan stakeholder baik itu sesama intern OPD maupun ekstern

Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan
DINAS SOSIAL KABUPATEN REJANG LEBONG

OPD : Dinas Sosial
Triwulan : 1 (Satu)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW I Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
		Tujuan 1 : Meningkatkan Akuntabilitas pemyelenggaraan pemerintahan																	
1		**Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah**	**Nilai Sakip OPD**																
		Program 1: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu**	100	**2.247.476.830**	**931**	**2.219.596.118**	**100**	**2.166.817.711**	**-**	**354.728.553**	**-**	**16,37**	**931**	**2.574.324.671**	**931,43**	**114,54**		
		Kegiatan 1 : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun**	100	**14.340.288**	**100**	**14.219.700**	**100**	**32.112.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**14.219.700**	**99,99**	**99,16**		
		Sub Kegiatan 1 :Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	14.340.288	99,99	14.219.700	100	32.112.600	-	-	**-**	**-**	**100**	**14.219.700**	**99,99**	**99,16**		
		Kegiatan 2: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu**	100	**1.810.362.353**	**188**	**1.830.046.285**	**100**	**1.851.314.917**	**30,30**	**312.679.677**	**30**	**16,89**	**218**	**2.142.725.962**	**218,16**	**118,36**		
		Sub Kegiatan 1: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	1.665.176.353	98,73	1.616.146.285	100	1.603.034.917,18	17,53	280.954.677	**18**	**17,53**	**116**	**1.897.100.962**	**116,26**	**113,93**		
		Sub Kegiatan 2: Penyediaan administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	145.186.000	89,13	213.900.000	100	248.280.000	12,78	31.725.000	**13**	**12,78**	**102**	**245.625.000**	**101,91**	**169,18**		
		Kegiatan 3: Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyedian jasa administrasi umum perangkat Daerah yang tepat waktu**	100	**249.627.936**	**492**	**243.023.841**	**100**	**106.609.908**	**96,26**	**30.135.756**	**96**	**28,27**	**588**	**273.159.597**	**588,15**	**109,43**		
		Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Komponen Instanlasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	6.393.600	100	5.127.200	100	7.444.000	-	-	**-**	**-**	**100**	**5.127.200**	**100,00**	**80,19**		
		Sub Kegiatan 2: Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100		0	-	0	-	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
		Sub Kegiatan 3 : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	100	27.631.680	0	-	0	47.848.000	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		Sub Kegiatan 4: Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	18.455.136	100	14.098.100	100	14.209.192	-	-	**-**	**-**	**100**	**14.098.100**	**100,00**	**76,39**		
		Sub Kegiatan 5:Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang Disediakan	100	9.343.680	100	6.952.800	100	4.003.960	-	-	**-**	**-**	**100**	**6.952.800**	**100,00**	**74,41**		
		Sub Kegiatan 6:Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	19.200.000	91,94	11.400.000	100	1.799.000	-	-	**-**	**-**	**92**	**11.400.000**	**91,94**	**59,38**		
		Sub Kegiatan 7: Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	168.603.840	99,95	205.445.741	100	31.305.756	96,26	30.135.756	**96**	**96,26**	**196**	**235.581.497**	**196,21**	**139,72**		
		Kegiatan 4: Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik**	100	**62.170.253**		**44.701.792**	**100**	**65.207.286**	**6,42**	**2.728.620**	**6**	**4,18**	**6**	**47.430.412**	**6,42**	**76,29**		
		Sub Kegiatan 1 : Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	1.929.600	100,00	1.900.000	100	6.000.000	-	-	**-**	**-**	**100**	**1.900.000**	**100,00**	**98,47**		
		Sub Kegiatan 2 : Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	47.637.850	92,87	30.751.292	100	42.490.000	6,42	2.728.620	**6**	**6,42**	**99**	**33.479.912**	**99,29**	**70,28**		
		Sub Kegiatan 3 : Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	4.636.800	100,00	4.420.000	100	6.410.000	-	-	**-**	**-**	**100**	**4.420.000**	**100,00**	**95,32**		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW I Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
					Sub Kegiatan 4 : Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang Disediakan	100	7.966.003	100,00	7.630.500	100	10.307.286	-	-	-	-	**100**	**7.630.500**	**100,00**	**95,79**		
					Kegiatan 5: pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah dalam keadaan baik**	100	**110.976.000**	**152**	**87.604.500**	**100**	**111.573.000**	**18,91**	**9.184.500**	**19**	**8,23**	**171**	**96.789.000**	**170,60**	**87,22**		
					Sub Kegiatan 1: Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100	37.036.800	99,35	34.100.000	100	34.324.200	11,84	4.065.000	**12**	**11,84**	**111**	**38.165.000**	**111,19**	**103,05**		
					Sub Kegiatan 2: Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operational atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operational atau lapanagan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	100	73.939.200	96,15	53.504.500	100	72.398.800	7,07	5.119.500	**7**	**7,07**	**103**	**58.624.000**	**103,22**	**79,29**		
					Sub Kegiatan 3: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-		-	100	4.850.000	-	-	-	-	-	-	-			
					Tujuan 2 : Meningkatnya kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial										-	-	-	-	-			
					Sasaran 2: Meningkatnya penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	**Persentase Keluarga Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial**									-	-	-	-	-			
					Program 2: Program Pemberdayaan sosial	**Persentase rumah tangga yang mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai bersyarat**	100	**265.516.769**	**164**	**160.046.500**	**100**	**47.463.250**	**4,47**	**1.010.000**	**4**	**2,13**	**169**	**161.056.500**	**168,53**	**60,66**		
						Persentase rumah tangga yang mendapatkan program keluarga harapan									-	-	-	-	-			
					Kegiatan 1: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah orang yang terlibat dalam pendampingan Program Keluarga Harapan**	100	**265.516.769**	**164**	**160.046.500**	**100**	**47.463.250**	**4,47**	**1.010.000**	**4**	**2,13**	**169**	**161.056.500**	**168,53**	**60,66**		
					Sub Kegiatan 1: Peningkatan kemampuan Potensi sumber Sosial Keluarga kewenangan Kabupaten	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100	214.274.869	76,00	118.744.200	100	22.584.250	4,47	1.010.000	**4**	**4,47**	**80**	**119.754.200**	**80,47**	**55,89**		
						Jumlah rumah tangga yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan	100						-		-	-	-	-	-			
					Sub Kegiatan 2: Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahtraan sosial kelembangaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100	51.241.900	88,06	41.302.300	100	24.879.000	-	-	-	-	**88**	**41.302.300**	**88,06**	**80,60**		
					Program 3: Program rehabilitasi sosial	**Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti**	100	**122.480.000**	**331**	**210.441.400**	**100**	**298.979.000**	**6,18**	**6.440.000**	**6**	**2,15**	**337**	**216.881.400**	**336,94**	**177,07**		
						Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti									-	-	-	-	-			
						Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti									-	-	-	-	-			
						Rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti									-	-	-	-	-			
					Kegiatan 1: Rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar,serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	**Persentase PMKS yang tertangani**	**100**	**35.000.000**	**272**	**169.748.600**	**100**	**143.717.500**	**3,84**	**2.810.000**	**4**	**1,96**	**276**	**172.558.600**	**276,05**	**493,02**		
					Sub Kegiatan 1: Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100	15.000.000	98,75	86.417.400	100	78.610.000	2,29	1.800.000	**2**	**2,29**	**101**	**88.217.400**	**101,04**	**588,12**		
					Sub Kegiatan 2: Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	15.000.000	99,36	50.137.000	100	65.107.500	1,55	1.010.000	**2**	**1,55**	**101**	**51.147.000**	**100,91**	**340,98**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW I Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
		Sub Kegiatan 3: Pemberian Bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar,serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100	5.000.000	74,10	33.194.200	100	-	-	-	-	-	**74**	**33.194.200**	**74,10**	**663,88**		
		Kegiatan 2: Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahtraan sosial (PMKS)lainya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti	**Persentase PMKS yang tertangani**	**100**	**87.480.000**	**59**	**40.692.800**	**100**	**155.261.500**	**2,34**	**3.630.000**	**2**	**2,34**	**61**	**44.322.800**	**60,89**	**50,67**		
		Sub Kegiatan 1: Pemberian layanan kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	28.728.000	58,55	40.692.800	100	155.261.500	2,34	3.630.000	**2**	**2,34**	**61**	**44.322.800**	**60,89**	**154,28**		
		Sub Kegiatan 2: Pemberian layanan rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	28.752.000	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Sub Kegiatan 3: Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	100	30.000.000	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Program 4: Program Perlindungan dan jaminan sosial	**Prosentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di Verifikasi dan validasi**	**100**	**251.001.456**	**87**	**170.985.200**	**100**	**164.410.000**	**3,17**	**5.205.000**	**3**	**3,17**	**90**	**176.190.200**	**90,33**	**70,19**		
		Kegiatan 1: Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten /kota	**Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan perlindungan dan jaminan sosial**	**100**	**251.001.456**	**87**	**170.985.200**	**100**	**164.410.000**	**3,17**	**5.205.000**	**3**	**3,17**	**90**	**176.190.200**	**90,33**	**70,19**		
			Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan (DTKS) yang di verifikasi dan validasi									-	-	-	-	-			
		Sub Kegiatan 1: Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten /kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100	251.001.456	87,16	170.985.200	100	164.410.000	3,17	5.205.000	**3**	**3,17**	**90**	**176.190.200**	**90,33**	**70,19**		
		Sub Kegiatan 2: Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-			
		Sasaran 3:Meningkatnya pelayanan korban bencana selama tanggap darurat	**Persentase layanan penanganan korban bencana selama tanggap darurat**	**100**	**96.666.232**	**191**	**76.656.800**	**100**	**115.022.500**	**2,27**	**1.800.000,00**	**2,27**	**2,27**	**193**	**78.456.800**	**193,11**	**81,16**		
		Program 5: Program Penanganan Bencana	**Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat**	**100**	**96.666.232**	**191**	**76.656.800**	**100**	**115.022.500**	**2,27**	**1.800.000,00**	**2,27**	**2,27**	**193**	**78.456.800**	**193,11**	**81,16**		
		Kegiatan 1: Perlindungan Sosial Korban bencana alam dan sosial kabupaten/Kota	**Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam/sosial**	**100**	**56.711.232**	**191**	**76.656.800**	**100**	**115.022.500**	**2,27**	**1.800.000,00**	**2,27**	**2,27**	**193**	**78.456.800**	**193,11**	**138,34**		
		Sub Kegiatan 1: Penyediaan makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100	19.079.808	94,41	27.942.200	100	79.182.500	2,27	1.800.000	**2**	**2,27**	**97**	**29.742.200**	**96,68**	**155,88**		
		Sub Kegiatan 2: Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	18.431.424	96,43	48.714.600	100	30.840.000	-	-	-	-	**96**	**48.714.600**	**96,43**	**264,30**		
		Sub Kegiatan 3: Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100	19.200.000	-	-	0	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Kegiatan 2: Penyelengaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapan bencana kabupaten/kota	**Jumlah Taruna siaga bencana**	100	**39.955.000**	**-**	**-**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		Sub Kegiatan 1: Koordinasi,sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100	39.955.000			0	-		-	-	-	-	-	-	-		
					2.983.141.287	**1.704**	**2.837.726.018**	**500**	**2.792.692.461,18**	**16**	**369.183.553**	**16**	**26**	**1.720**	**3.206.909.571**		**107,50**		
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%) :																
			Predikat Kinerja:																

Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja : Kerja sama antar bidang

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Keterlambatan memulai kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melakukan kegiatan sesegera mungkin

Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2025
Kabupaten Rejang Lebong

OPD : **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
Triwulan : **I (Satu)**

NO	SASARAN	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW I Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5*100%		12	13
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		2				**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**																	
		2	**7**			**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga kerja**																	
1	**Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah**						**Nilai SAKIP OPD**	**B**															
		2	**7**	**01**		**Program Penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu**	**100**	**22.257.084.910**	**97**	**3.171.742.090**	**100**	**2.977.115.458**	**98**	**550.636.503**	**98%**	**18%**	**98**	**3.722.378.593**	**98%**	**16,72%**	**Sekretariat**	
		2	7	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100	118.646.100	100	99.897.400	100	18.906.400	10	-	10%	0%	100	99.897.400	100%	84,20%		
		2	7	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100	20.708.222.066	98	2.852.929.201	100	2.744.045.068	30	547.767.381	30%	20%	98	3.400.696.582	98%	16,42%		
		2	7	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100	863.604.100	89	149.853.502	100	116.731.750	20	-	20%	0%	89	149.853.502	89%	17,35%		
		2	7	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	100	206.453.044	83	29.247.117	100	37.114.240	23	2.869.122	23%	8%	83	32.116.239	83%	15,56%		
		2	7	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	100	360.159.600	92	39.814.870	100	60.318.000	15	-	15%	0%	92	39.814.870	92%	11,05%		
	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja																						
		2	7	03		**Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**	**100**	**226.000.000**	**100**	**29.312.150**	**100**	**-**	0	**-**	**0%**	0%	**100**	**29.312.150**	**100%**	**12,97%**	**Bidang Pentalatas**	
		2	7	03	2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	3.744	226.000.000	100	29.312.150	624	-	0	-	0%	0%	100	29.312.150	3%	12,97%		
		2	**7**	**04**		**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan**	**72,59**	**278.855.500**	**99**	**23.166.700**	**72,20**	**56.591.750**	75	**-**	**104%**	0%	**100**	**23.166.700**	**138%**	**8,31%**	**Bidang Pentalatas**	
		2	7	04	2.03	Kegiatan Pengelolaan informasi pasar kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	96,7	238.855.500	99	23.166.700	97	56.591.750	97,6	-	101%	0%	100	23.166.700	103%	9,70%		
		2	7	04	2.04	KegiatanPelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan	100	40.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%		
	Meningkatnya kualitas hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan industrial																						
		2	**7**	**05**		**Program Hubungan Industrial**	**Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama**	**100**	**404.500.000**	**89**	**25.684.000**	**100**	**122.754.000**	97	**-**	**97%**	0%	**90**	**25.684.000**	**90%**	**6,35%**	**Hubungan Industrial**	
		2	7	05	2.02	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kasus hubungan industrial	1	404.500.000	**89**	25.684.000	**1**	122.754.000	0	-	**0%**	0%	**89**	**25.684.000**	**8900%**	**6,35%**		
		3				**Urusan Pemerintahan Pilihan**																	
		3	**32**			**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**																	
	Terwujudnya pemukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan berusaha yang layak																						

NO	SASARAN	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW I Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
		3	**32**	**03**		**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**Dokumen perencanaan pembangunan di kawasan transmigrasi**	**6**	**401.900.000**	**99**	**17.290.100**	**1**	**18.162.000**	**94**	**0**	**9400%**	0%	**193**	**17.290.100**	**3217%**	**4,30%**	**Bidang PK Trans**	
		3	32	03	2.01	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen dibidang Pengadaan Lahan Permukiman, Pengadaan Sarana dan Prasarana Permukiman, serta Kelayakan Permukiman	6	401.900.000	99	17.290.100	1	18.162.000	0	-	0%	0%	99	17.290.100	1650%	4,30%		
									Total		3.267.195.040		**3.174.623.208**		**550.636.503**				**3.817.831.543**				
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**96,0**				91,00									
									Predikat kinerja	Berhasil				Berhasil									

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Sarana prasarana yang memadai

Faktor Penghambat pencapaian kinerja : Aplikasi yang digunakan sering error

tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Koordinasi yang baik antar Bidang

tindak lanjut diperlukannya dalam renja Perangkat Daerah : Koordinasi yang baik dengan stakeholder baik itu sesama intern OPD maupun ekstern

Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan
Provinsi Bengkulu /Kabupaten Rejang Lebong)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangkat Daerah Penanggu	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
1		**Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemerintahan**																Dinas PMD	
		Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD																
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	3.050.960.858	98,8	3.349.818.724	100	2.983.563.404	19	569.469.030	19%	19%	118	3.919.287.754	118	128%		
		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100	28.799.232	100	11.964.800	100	10.143.800	-	-	0%	0%		11.964.800	-	42%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	9.599.424	100	3.072.400	100	3.323.775	-	-	0%	0%	100	3.072.400	100	32%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	19.199.808	100	8.892.400	100	6.820.025	-	-	0%	0%	100	8.892.400	100	46%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	100	2.571.097.778	98,85	2.578.726.228	100	2.656.876.759,20	20	534.629.248	0%	20%	119	3.113.355.476	119	121%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100	2.440.537.778	98,97	2.369.816.228	100	2.501.206.759,20	20	501.809.248	20%	20%	119	2.871.625.476	119	118%		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	130.560.000	97,67	208.910.000	100	155.670.000	21	32.820.000	21%	21%	119	241.730.000	119	185%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	100	258.581.160	99,96	644.492.360	100	105.137.375	11	11.545.993	0%	11%	111	656.038.353	111	254%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100	68.419.680	98	68.086.100	100	54.779.500	-	-	0%	0%	98	68.086.100	98	100%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	19.433.136	99	18.623.000	100	13.157.000	-	-	0%	0%	99	18.623.000	99	96%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	8.363.520	100	8.004.000	100	8.711.000	21	1.800.000	21%	21%	121	9.804.000	121	117%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	162.364.824	99,96	549.779.260	100	28.489.875	34	9.745.993	34%	34%	134	559.525.253	134	345%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	100	79.046.400		-	100	63.748.000					-		-	0%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	79.046.400	-	-	100	63.748.000		-			-	-	-	0%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam keadaan baik	100	33.945.437	90,01	40.580.936	100	39.084.112	26	10.293.789	0%	26%	116	50.874.725	116	150%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	7.094.304	100	6.800.000	100	6.940.000	40	2.800.000	40%	40%	140	9.600.000	140	135%		

				Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	9.664.531	68,78	11.945.986	100	15.350.112	11	1.698.789	11%	11%	80	13.644.775	80	141%		
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	4.540.320	96,24	4.350.000	100	4.418.000	-	-	0%	0%	96	4.350.000	96	96%		
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	12.646.282	99,97	17.484.950	100	12.376.000	47	5.795.000	47%	47%	147	23.279.950	147	184%		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	100	79.490.851	98,27	74.054.400	100	108.573.358	12	13.000.000	0%	12%	110	87.054.400	110	110%		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100	45.970.675	99,95	44.042.000	100	45.012.000	24	11.000.000	24%	24%	124	55.042.000	124	120%		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak , dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	22.761.648	94,44	19.724.000	100	22.287.158	9	2.000.000	9%	9%	103	21.724.000	103	95%		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	10.758.528	100	10.288.400	100	41.274.200	-	-	0%	0%	100	10.288.400	100	96%		
																	-				
2				**Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat**													-				
				Sasaran 1 : Meningkatnya Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)												-				
				PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Perubahan Status desa, terutama status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal	100	72.000.000	89,49	20.562.100	-		-	-	0%	0%	89	20.562.100	89	29%		
				Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Penataan Desa											-	-				
				Fasilitasi Prasarana dan Sarana Desa	Jumlah Prasarana dan saranaPelayanan Pemerintah Desa yang terfasilitasi	100	72.000.000	89,49	20.562.100	-	-	-	-	0%	0%	89	20.562.100	89	29%		
				Sasaran 2 : Meningkatnya Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan.	Persentase Masyarakat Usia Produktif yang Diberdayakan											-	-		0%		
				Program Administrasi Pemerintah Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi	100	2.400.800.000	98,1	246.815.355	100	87.433.425	-	-	0%	0%	98	246.815.355	98	10%		
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Persentase Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik, Presentase Bumdes yang aktif, Persentase LSM aktif, Persentase LPM Berprestasi , Persentase Swadaya Masyarakat terhadap program Pemberdayaan Masyarakat	100	2.400.800.000	98,1	246.815.355	100	87.433.425	-	-	0%	0%	98	246.815.355	98	10%		
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa/Kecamatan dalam pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	100	124.800.000	96,27	81.817.600	100	43.855.750	-	-	0%	0%	96	81.817.600	96	66%		
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah Desa yang terfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	100	120.000.000		64.198.855	0	-	-	-	-	-	-	64.198.855	-	-		
				Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terlaksananya pemilihan kepala desa dalam kabupaten Rejang Lebong	100	1.960.000.000	98,33	-		-		-	0%		98	-	98	0%		
				Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa yang dibina	100	100.000.000	90,98	100.798.900	100	20.827.675	-	-	0%	0%	91	100.798.900	91	101%		
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Desa yang terfasilitasi peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan BPD	100	96.000.000		-		-					-	-	-			
				Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa					100	22.750.000	-	-	0%	0%	-	-	-	0%		
																-	-	-			
3				**Tujuan : Meningkatnya Masyarakat yang berdaya saing dan inovatif**												-	-				
				Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	Persentase Pemberdayaan Kelompok Masyarakat											-	-				

					PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat aktif	100	**819.710.238**	**29,16**	**713.194.064**	100	**351.449.355**	**5**	**17.001.600**	**5%**	**5%**	**34**	**730.195.664**	**34**	**89%**		
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Fasilitasi Kelembagaan Pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunan Desa/Kelurahan	100	819.710.238	29,16	713.194.064	100	351.449.355	5	17.001.600	5%	5%	34	730.195.664	34	89%		
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kelompok masyarakat Desa/Kelurahan yang terlibat dalam program pemberdayaan	100	275.000.000	95,44	119.296.520	100	92.965.000	2	2.020.000	2%	2%	98	121.316.520	98	44%		
					Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kecamatan pengembangan pemanfaatan teknologi tepat guna	100	124.800.000	91,36	546.528.694	100	34.838.130	3	1.011.600	3%	3%	94	547.540.294	94	439%		
					Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK aktif, jumlah kelompok binaan PKK, Jumlah Posyandu Aktif	100	419.910.238	23,38	47.368.850	100	223.646.225	6	13.970.000	6%	6%	30	61.338.850	30	15%		
						Rata-rata capaian kinerja (%)	100	6.343.471.096	78,88	4.330.390.243	100	3.422.446.184		586.470.630	24%	24%	85	4.008.916.814	85	63%		
						Predikat Kinerja																

Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja : 1.SDM yang memadai, sarana prasarana penunjang dan anggaran yang memadai. 2. Kondisi lingkungan kerja yang baik/ harmonis

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : 1. Keterbatasan SDM dalam mengoperasikan alat kerja/komputer. 2. Adanya gangguan Aplikasi. 3. lingkungan kerja yang tidak harmonis

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1. Penambahan Personil/SDM yang dapat mengoperasikan peralatan kerja (Komputer/ laptop). 2. Perlunya perbaikan Aplikasi. 3. Adanya koordinasi dan sinkronisasi dilingkungan kerja

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1. Koordinasi yang baik sesama intern OPD , Instansi terkait /stakeholder yang ada

Curup, April 2025

Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2025

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
Triwulan : I (Satu)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW I. Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
		WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai Evaluasi SAKIP OPD**	**100%**	**23.766.102.942**	**100**	**13.575.657.244**	**100**	**3.600.822.485**	**3,08**	**613.763.988**	**3,08**	**3,08**	**103,079**	**14.189.421.232**	**76,54**	**87,47**		
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%	142.884.209	100	63.193.425	100	8.261.200,00	0,00	0	0,00	0,00	50	63.193.425	50,00	44,23		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100%	22.813.311.339	100	12.702.262.782	100	3.322.569.938,24	18,47	613.763.988	18,47	18,47	59,2363	13.316.026.770	59,24	58,37		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	100%	15.280.000	100	13.829.400	100	3.550.000,00	0,00	0	0,00	0,00	50	13.829.400	50,00	90,51	**Sekretariat**	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	303.169.100	100	289.546.297	100	29.271.956,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00	289.546.297	100,00	95,51		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	100%	316.945.467	100	210.613.767	100	106.847.091,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00	210.613.767	100,00	66,45		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	100%	174.512.829	100	296.211.573	100	130.322.300,00	0,00		0,00	0,00	100,00	296.211.573	100,00	169,74		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													0				
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG)**	**27,27**	**686.406.326**	**18,18**	**1.023.533.033**	**27,27**	**311.961.203,00**	**0**	**0**	0,00	**0,00**		1.023.533.033				
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	48,8	32.606.326	36,9	31.472.000	48,8	25.071.050,00	**0**	0	0,00	0,00	36,9	31.472.000	75,61	96,52	**Bidang KHPKK**	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	48,8	653.800.000	36,9	992.061.033	48,8	286.890.153,00	**0**	0	0,00	0,00	36,9	992.061.033	0,76	151,74		
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Presentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif**	**100 %**	**1.713.899.120,00**	**100**	**39.792.000,00**	**100**	**147.606.000,00**	**0**	**3.030.000,00**	0,00	**2,05**		42.822.000,00				
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota	Jumlah dokumen laporan kekerasan terhadap perempuan Rasio kekerasan terhadap perempuan	1 Dok0,07	696.710.800	1	0	1	5.159.000,00			0,00	0,00	1	0	0,00	0,00	**Bidang PHPPKAPHA**	
		Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota	korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	100 %	1.017.188.320	100	39.792.000	100	142.447.000,00	0	3.030.000	0,00	2,13	100	42.822.000	100,00	4,21		
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Usia Harapan Hidup Perempuan**	**71,20 tahun**	**507.303.163**	**71,34**	**30.061.000**	**71**	**15.440.000**		**0**	0,00	**0,00**		30.061.000				
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Partisipasi angkatan kerja perempuan	97,81	507.303.163	87,16	30.061.000	57,8	15.440.000,00			0,00	0,00	87,16	30.061.000	0,89	5,93	**Bidang KHPKK**	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Persentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar**	**31**	**143.370.000**		**26.951.000**	**35**	**12.327.550,00**		**0**	0,00	**0,00**		26.951.000				
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Nindya	89.550.000	0	26.951.000	Madya	6.547.750,00			0,00	0,00	0	26.951.000	0,00	30,10	**Bidang PHPPKAPHA**	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas hidup anak Kewenangan Kabupaten/Kota						0	5.779.800,00			0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Prevalensi kekerasan terhadap anak**	**Menurun**	**1.251.492.120**	**Meningkat**	**258.769.236**	**Menurun**	**107.615.600,00**		**0**	0,00	**0,00**		258.769.236				
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase korban kekerasan terhadap anak yang mendapat layanan komprehensi	100	1.108.373.320	100	258.769.236	100	107.615.600,00			0,00	0,00		258.769.236	0,00	23,35	**Bidang KHPKK**	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													0				
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**Angka kelahiran total (Total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun**	**2,11**	**118.200.000**	**2,1**	**540.829.500**	**2,1**	**454.241.150,00**		**0**	0,00	**0,00**		540.829.500				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW I. Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	16	40.000.000	1	47.434.700	4	68.289.150,00			0,00	0,00		47.434.700	0,00	118,59	**Bidang DALDUK**	
1		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan data dan informasi program kependudukan dan KB di Kabupaten	100	78.250.000	100	493.394.800	100	385.952.000,00			0,00	0,00		493.394.800	0,00	630,54		
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate /mCPR)**	**80,92**	**25.540.022.496**	**64,31**	**7.539.048.654**	**80,13**	**6.947.727.644**		**369.990.000**	**0,00**	**5,33**		**7.909.038.654**	**0,00**	**30,97**	**Bidang KBKK**	
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-19 tahun kelahiran total	2,11	9.577.157.000	2,1	2.932.158.150	2,1	1.546.208.000,00	0	81.000.000	0,00	5,24		3.013.158.150	0,00	31,46		
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	6,55	3.744.000.000	6,55	3.154.777.100	6,55	4.837.284.000,00	0	288.990.000	0,00	5,97		3.443.767.100	0,00	91,98		
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	21	394.125.000	2,1	807.962.000	32	426.373.000,00			0,00	0,00		807.962.000	0,00	205,00		
			Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	1,667		0,62		1,667				0,00				0,00			
			Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	29		16,7		25,78				0,00				0,00			
			Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (CPR)	25,05		73		25,05				0,00				0,00			
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan anggota BKB ber-KB	63,22	4.706.768.332	62,04	644.151.404	62,65	137.862.644,00			0,00	0,00		644.151.404	0,00	13,69		
			Cakupan anggota BKL ber-KB	71,36		45,77		46,21				0,00				0,00			
			Cakupan anggota BKR ber-KB	46,66		59,5		67,72				0,00				0,00			
			Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	42,79		58		42,58				0,00				0,00			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)**			**8**	**1.618.785.000**	**7,72**	**2.209.000.000,00**		**0,00**		**0,00**		1.618.785.000	0,00	0,00	**Bidang KBKK**	**Program Baru yang tidak ada di renstra**
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rat e/ASFR 15-19) per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun			**29,6**		**32**							0	0,00			
			Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)			**22,9**		**22**							0	0,00			
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					239.085.000		763.600.000,00			0,00	0,00		239.085.000	0,00	0,00		
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					1.379.700.000		1.445.400.000,00			0,00	0,00		1.379.700.000	0,00	0,00		
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%) :	53,11	24.653.426.667	52,86	13.806.741.632,24	7,15	986.783.988,00	0,60	1,36	58,88	25.640.210.655	21,61	81,85		
					Predikat Kinerja:	Kurang													

Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :		Kolaborasi Efektif dengan Stakeholder Terkait : Kerjasama dengan dinas lain atau mitra eksternal membantu percepatan pelaksanaan program.Ketersediaan Anggaran Tepat Waktu : Pencairan anggaran yang tepat waktu mendukung kelancaran pelaksa
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :		Keterlambatan Pencairan Anggaran : Proses birokrasi yang lambat menghambat pelaksanaan program/kegiatan.Kurangnya Koordinasi Antarunit Kerja : Kurangnya sinkronisasi antar unit kerja menyebabkan inefisiensi.Kapasitas SDM yang Terbatas : K
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :		Mempercepat Pencairan Anggaran : Mengajukan revisi anggaran atau mempercepat proses administrasi untuk memastikan dana tersedia.Meningkatkan Koordinasi Internal : Menyelenggarakan rapat rutin lintas unit kerja untuk memastikan sinkronisasi
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :		Revisi Target Kinerja : Menyesuaikan target kinerja agar lebih realistis dan dapat dicapai.Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor : Membangun mekanisme kerjasama yang lebih kuat dengan dinas lain atau mitra eksternal.Pengawasan yang Lebih Ketat : M

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TAHUN ANGGARAN 2025

OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN

TRIWULAN : I (SATU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)		Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW. I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW. I Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
			Indikator	Satuan Indikator	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	**Nilai SAKIP Daerah**	**Nilai**	**CC**		**B**													
		Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	**Nilai SAKIP OPD**	**Nilai**	**CC**	**6.204.117.792**	**0**	**4.347.946.019**	**0**	**3.843.284.130**	**0**	**694.796.558**	**0**	**0,18078199**	**0**	**694.796.558**	**100**	**11%**		
1.		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu**	**%**	**100**	**3.415.838.992**	**195**	**3.853.500.019**	**100**	**3.500.462.822**	**100**	**685.154.963**	**1**	**0,19573268**	**295**	**685.154.963**	**295%**	**20%**	Dinas Ketahan Pangan Kab. Rejang Lebong	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**%**	**100**	**5.465.000**	**13**	**11.943.000**	**100**	**10.085.500**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0%**	**0%**		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	4.372.100	3	4.998.200	100	6.456.000	0	-	0	0	0	-	0%	0%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	10	1.092.900	10	6.944.800	100	3.629.500	0	-	0	0	0	-	0%	635%		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu**	**%**	**100**	**3.293.501.868**	**26**	**3.482.035.359**	**100**	**3.339.431.119**	**7**	**676.342.541**	**0,07**	**0,20253226**	**33**	**676.342.541**	**33%**	**21%**		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14	3.065.601.868	14	3.337.335.359	100	3.254.471.119	4	655.102.541	0,04	1,02546166	18	655.102.541	129%	21%		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya honorarium pelaksanaan tugas ASN, Tersedianya honorarium THL	Bulan	12	227.900.000	12	144.700.000	100	84.960.000	3	21.240.000	0,03	1,70315443	15	21.240.000	125%	9%		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu**	**%**	**100**	**80.879.000**	**60**	**276.113.958**	**100**	**64.624.160**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0%**	**0%**		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12	1.987.000	12	1.978.000	100	2.179.000	0	-	0	0	0	-	0%	0%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bulan	0	-	0	3.530.000	100	2.835.000	0	-	0	0	0	-	0%	0%		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan Rumah Tangga	Bulan	0	-	0	-	100	2.671.160	0	-	0	0	0	-	0%	0%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Bulan	12	13.654.800	12	18.172.400	100	17.595.000	0	-	0	0	0	-	0%	0%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Bulan	12	1.340.700	12	2.991.600	100	3.080.000	0	-	0	0	0	-	0%	0%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	1.920.000	12	2.880.000	100	2.999.000	0	-	0	0	0	-	0%	0%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	61.976.500	12	246.561.958	100	33.265.000	0	-	0	0	0	-	0%	0%		
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang milik daerah yang baik**	**%**	**100**	**-**	0	**28.880.000**	**100**	**28.155.000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0%**	**0%**		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Kantor yang memadai	%	100	-	0	28.880.000	100	28.155.000	0	-	0	0	0	-	0%	0%		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik**	**%**	**100**	**19.806.248**	**48**	**18.088.202**	**100**	**22.299.095**	**67,16**	**4.812.422**	**0,6716**	**0,21581244**	**115,16**	**4.812.422**	**115%**	**24%**		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Bulan	12	1.996.000	12	3.000.000	100	3.000.000	50	1.500.000	0,5	0,5	62	1.500.000	517%	75%		